



MOBILITAS PENDUDUK
Strategi Penghidupan Berkelanjutan,
Pendekatan Keruangan

oleh
Puji Hardati

Penerbit
UNENS PRESS
Jl. Raya No. 2, Semarang
Telp/Fax: 024 8415032

Copyright @ 2018 Hak cipta pada penulis dan dilindungi undang-undang Penerbitan, Hak Penerbitan pada UNENS PRESS, d cetak oleh Unens Press.

Dilarang mengutip, menggandakanm mengkopi, dan memperbanyak sebagian maupun seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari penerbit.

MOBILITAS PENDUDUK

Srtategi Penghidupan Berkelanjutan, Pendekatan Keruangan

Puji Hardati

Design Cover: Team Unnespress

Setting dan Layout: Team Unnespress

Cetakan pertama 2018

900 Mobilitas Penduduk, Strategi Penghidupan
PUJ Berkelanjutan, Pendekatan Keruangan/Puji Hardati;
M Cet.1-illus,-Semarang: Unnes Press, 2018
Xii + 160 hal, 23,5 cm

1. Geografi Umum dan Sejarah Umum
2. Puji Hardati; II. Judul

ISBN 978-602-285-149-3

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan an/atau denda paling sedikit 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
 2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima tahun dan/atau paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
-

MOTTO PERSEMBAHAN

Hidup untuk bermanfaat bagi orang lain, sekecil apapun.

Buku ini dipersembahkan untuk kedua orang tua dan semua pembaca yang terhormat, semoga bermanfaat.

PRAKATA

Puji Syukur Alhamdulillah, dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karuniaNya, sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan lancar.

Buku ini disusun dengan harapan dapat digunakan oleh semua pihak yang tertarik dengan geografi, khususnya mobilitas penduduk, semoga menjadi bahan pengayaan untuk menambah wawasan pembaca. Mobilitas penduduk merupakan salah satu dari proses demografi yang dialami oleh sebagian besar insan, dan itu merupakan salah satu bentuk strategi penghidupan berkelanjutan.

Pemahaman yang lengkap dapat diikuti melalui sistematika buku ini, supaya pembaca mudah memahami isinya, yang dimulai dari bab 1 sampai dengan bab 7, dan masing-masing bab merupakan rangkaian yang saling terkait satu dengan lainnya. Bab 1 pendahuluan, bab 2 strategi penghidupan berkelanjutan, bab 3 teori mobilitas penduduk, bab 4 pola mobilitas penduduk, bab 5 faktor-faktor mobilitas penduduk, bab 6 karakteristik mobilitas penduduk, dan bab 7 penutup, serta dilengkapi dengan glosarium, indeks dan daftar pustaka.

Bantuan, masukan, dan sumbangsih, yang berupa moril dan materiil, dari berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu pesatu, dalam rangka mewujudkan harapan penulis,

dalam kesempatan ini dihaturkan ucapan terimakasih. Semoga kebaikan ibu, bapak dan saudara menjadi amal jariah dan diterima oleh Allah SWT, aamiin.

Kesempurnaan hanya milik Allah, tulisan ini masih jauh dari sempurna, sehingga para pembaca berkenan memberikan masukan, saran, kritik untuk keperluan bahan revisi edisi selanjutnya. Mobilitas penduduk merupakan salah satu implikasi dari bentuk interaksi keruangan, yang terjadi setiap saat dan semakin menarik untuk dikaji dalam menghadapi revolusi industri 4.0 abad 21.

Semarang, 17 Agustus 2018

ttd

Penulis

Puji Hardati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN KATALOG	Error! Bookmark not defined.
MOTTO PERSEMBAHAN.....	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Makna Ruang dan Interaksi dalam Ruang.....	3
1.2 Pendekatan Keruangan	7
1.3 Penduduk dan Persebaran Keruangan	13
BAB II STRATEGI PENGHIDUPAN BERELANJUTAN	19
2.1. Pembangunan Berkelanjutan	19
2.2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	22
2.3. Strategi Penghidupan Berkelanjutan	30
BAB III TEORI MOBILITAS PENDUDUK	47
3.1. Pengertian Konsep Mobilitas Penduduk.....	47
3.2. Bentuk Mobilitas Penduduk	49
3.3. Teori Mobilitas Penduduk	56
3.4. Pendekatan Mobilitas Penduduk	64
BAB IV POLA MOBILITAS PENDUDUK	67
4.1. Model Analisis Mobilitas Penduduk	67
4.2. Pola Mobilitas Penduduk Global.....	75
4.3. Pola Mobilitas Penduduk Nasional.....	79
BAB V FAKTOR-FAKTOR MOBILITAS PENDUDUK	100
5.1. Faktor-faktor di Derah Asal dan Daerah Tujuan	101
5.2 Faktor Antara dan Aksesibilitas	104
5.3 Keberagaman Wilayah	112
5.4 Mobilitas Penduduk dan Urbanisasi	114

BAB VI KARAKETRISTIK MIGRAN	122
6.1. Alasan Migran	122
6.2. Karakteristik Migran Nasional	123
6.3. Karakteristik Migran Lokal	126
6.4. Struktur Penduduk	129
BAB VII PENUTUP	143
7.1. Peraturan Perundangan Kependudukan.....	143
7.2. Sistem Informasi Kependudukan.....	145
7.3. Manfaat dan Kendala.....	146
DAFTAR PUSTAKA	151
GLOSARIUM	158
INDEKS	167

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul tabel	Halaman
1.1.	Jumlah Penduduk Dunia Tahun 2015	15
1.2.	Penduduk Indonesia berdasarkan Pulau Besar...	16
2.1.	Persebaran Jumlah Negara di Dunia	24
2.2.	Tujuan Pembangunan Milleium dan Berkelanjutan (MDGs dan SDgs)	25
2.3.	Ringkasan Keterkaitan antara Nawacita dengan RPJMN dan SDGs	29
2.4.	Strategi Penghidupan Berkelanjutan	45
3.1.	Batas Ruang Wilayah Mobilitas Penduduk.....	52
4.1.	Persebaran Penduduk berdasarkan Benua.....	76
4.2.	Mobilitas Permanen Neto atau Migrasi Neto di Dunia Berdasarkan Benua	78
4.3.	Pertanyaan Migrasi Penduduk pada Sensus Penduduk di Indonesia 1971, 1980, 1990, 2000 dan 2010	81
4.4.	Angka Migrasi Seumur Hidup, Risen, dan Total di Indonesia Tahun 2015	86
4.5.	Pola Mobilitas Penduduk di Tingkat Lokal Jawa Tengah	88
4.6.	Arus Migrasi Seumur Hidup Provinsi Jawa Tengah	90
4.7.	Daerah Tujuan Migrasi di Kabupaten Semarang.....	92
4.8.	Migrasi Masuk dan Migrasi Keluar di Kabupaten Semarang.....	94
4.9.	Mobilitas Non Permanen di Indonesia.....	97
5.1.	Aglomerasi Penduduk dan Kriteria Kota.....	115
5.2.	Persentase Penduduk Dunia yang bertempat tinggal di Kota Tahun 2015	117
5.3.	Persentase Penduduk Asia Tenggara Bertempat Tinggal di Kota Tahun 2015	118
5.4.	Persentase Penduduk Indonesia di Perkotaan Tahun 2015-2035	120

6.1.	Karakteristik Migran Risen Nasional di Indonesia	125
6.2.	Karakteristik Migran Lokal di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah	127
6.3.	Jumlah Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Ungaran Barat	132
6.4.	Struktur Demografi di Kecamatan Ungaran Barat	133
6.5.	Struktur Pendidikan di Kecamatan Ungaran Barat	135
6.6.	Tahapan Keluarga di Kecamatan Ungaran Barat Tahun 2015	136
6.7.	Struktur Mata Pencaharian Penduduk di Kecamatan Ungaran Barat	140
7.1.	Peraturan Perundang-undangan Kependudukan	144

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Nama	Halaman
2.1.	Ilustrasi Hubungan Aspek Ekonomi, Ekologi, dan Sosial dalam Keseimbangan Berkelanjutan	21
2.2.	Kerangka Kerja Strategi Penghidupan Berkelanjutan	31
3.1.	Bentuk Mobilitas Penduduk	50
3.2.	Bentuk Arus Mobilitas Penduduk Permanen (Migrasi) Horisontal	53
3.3.	Bentuk Arus Mobilitas Penduduk Permanen (Migrasi) Parabolik	54
3.4.	Bentuk Arus Mobilitas Penduduk Permanen (Migrasi) Diagonal.....	55
3.5.	Bentuk Arus Mobilitas Penduduk Permanen (Migrasi) Fungsional Pusat Pinggiran.....	55
3.6.	Teori Mobilitas Penduduk dari Mechel dengan Modifikasi	57
3.7.	Teori Migrasi Lee	58
3.8.	Teori Migrasi Todaro dan Modifikasi.....	62
4.1.	Peta Mobilitas Penduduk di Kabupaten Semarang..	95
4.2.	Peta Arus Migrasi Penduduk Ke Luar Jawa	99
5.1.	Faktor Aksesibilitas pada Proses Mobilitas Penduduk	101
5.2.	Rute Transportasi Laut di Indonesia.....	106
5.3.	Persebaran Lokasi Jalan TOL di Indonesia...	107
5.4.	Jalur Penerbangan Nasional	108

BAB I PENDAHULUAN

Abad 21, merupakan era revolusi industri 4.0, dan diprediksi pola gerakan mobilitas penduduk mengalami pergeseran, dari mobilitas permanen ke non-permanen. Gerakan atau perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak harus menginap di daerah tujuan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu adanya sifat umum wilayah, saling melengkapi atau *complementarity*, dua wilayah atau lebih memiliki jarak atau *intervening opportunity*, sehingga diantaranya akan terjadi *transferability*, juga didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Ciri abad 21, adalah kemajuan di bidang teknologi informasi komunikasi, kebutuhan setiap orang di semua aspek kehidupan, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya dan lainnya, dapat dijangkau dengan cara lebih mudah, jarak di antara dua wilayah atau lebih menjadi lebih dekat, aksesibilitas wilayah menjadi semakin tinggi, sehingga bentuk mobilitas penduduk nonpermanen semakin banyak dan bervariasi.

Pola pergerakan penduduk dapat dikaji secara global, nasional dan lokal, walaupun masih sangat terbatas data yang dapat memberikan informasi secara detail mengenai mobilitas non-permanen. Kajian mobilitas non-permanen

dilengkapi dari hasil pengamatan secara langsung dari hasil penelitian, sedangkan data mobilitas permanen dapat diperoleh dari berbagai instansi, salah satunya seperti Badan Pusat Statistik.

Mobilitas penduduk masih menarik untuk dikaji, karena merupakan salah satu variabel proses demografi yang menentukan jumlah penduduk masa datang di suatu wilayah. Mobilitas penduduk merupakan variabel demografi yang sangat dinamis, karena setiap orang setiap individu selama hidupnya lebih dari satu kali pindah tempat tinggal terutama yang tidak menetap, sedangkan variabel dua lainnya, yaitu fertilitas dan mortalitas lebih statis. Mortalitas hanya dilakukan satu kali dalam kehidupan manusia. Sifat sangat dinamis dari variabel mobilitas penduduk, sehingga perekaman data mobilitas penduduk non permanen sering kurang lengkap, walaupun demikian data mobilitas penduduk digunakan untuk perencanaan. Misalnya, proyeksi penduduk Indonesia sudah mulai menggunakan asumsi data mobilitas penduduk untuk memperkirakan jumlah penduduk.

Mobilitas penduduk merupakan gerakan penduduk, pada umumnya dapat dibedakan menjadi gerakan horizontal atau geografis dan gerakan vertikal. Kajian dalam buku ini yang dimaksud dengan mobilitas penduduk adalah gerakan horizontal atau geografis. Untuk memahaminya, sebelumnya

dijelaskan tentang makna ruang, interaksi dalam ruang dan pendekatan keruangan.

1.1 Makna Ruang dan Interaksi dalam Ruang

Ruang merupakan suatu unsur lingkungan, wadah bagi manusia dan makhluk hidup dalam melakukan aktivitas untuk kelangsungan hidup, dan benda tidak hidup yang menyertainya menjadi satu kesatuan wilayah. Wadah meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya (Anonim, 2007). Mempelajari ruang dapat membantu meningkatkan kecerdasan keruangan, karena kecerdasan keruangan merupakan satu dari 9 keserdasan yang harus dimiliki oleh setiap orang, yang diperlukan untuk dapat mendudukan aspek keruangan secara tepat dalam berbagai pengambilan keputusan (Rijanta, 2013).

Kecerdasan keruangan adalah kemampuan memahami gambar dan bentuk 2 dan 3 dimensional, kemampuan melakukan analisis dan abstraksi lebih dari sekedar melihat gambar atau bentuk secara visual, mengenali obyek dan hubungannya dengan obyek yang lain, serta menyampaikan pemikiran secara terstruktur dengan *visual thinking* dan mental map (Rijanta, 2013).

Ruang dalam bahasa Inggris *place* berarti tempat, yaitu seluruh muka bumi yang merupakan tempat hidup manusia,

hewan dan tumbuh-tumbuhan serta makhluk hidup dan tidak hidup lainnya. Ruang yang berarti tempat mengandung pengertian lokasi berarti posisi suatu wilayah di permukaan bumi. Pemahaman ini, lokasi dibedakan menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut merupakan posisi suatu benda atau wilayah yang dikaitkan dengan letak lintang dan bujur, atau disebut dengan lokasi absolut atau lokasi astronomis. Sedangkan lokasi relatif merupakan posisi suatu tempat dengan lingkungan sekitar, yang selalu berubah sesuai dengan perkembangan kebudayaan, sehingga lokasi relatif, berubah-ubah, atau disebut dengan lokasi geografis. Goodall (1987) menjelaskan ruang dikaitkan dengan site dan situasi. Site menjelaskan ruang, lokasi, tempat, yang berkaitan dengan kondisi internal, gambaran wilayah tersebut, sedangkan situasi menjelaskan ruang, tempat, lokasi, wilayah berkenaan dengan kondisi eksternal atau sekelilingnya. Kondisi suatu ruang, tempat, wilayah, sangat bervariasi, sehingga menjadi potensi terjadinya proses mobilitas penduduk.

Ruang dalam arti *place*, dapat mengandung pengertian adalah sebagai berikut (Goodall, 1987).

Place is a small part of geographical space occupied by a person or thing. It is a common formulation in humanities geographic, where places are regarded as centres of felt value (Goodall, 1987).

Ruang menurut (Yunus, 2010), memiliki makna keluasan atau *extemt* yang dapat diartikan secara absolut atau ruang absolut yaitu ruang yang bersifat riil maujud/kasad mata, bisa dilihat dan diamati secara langsung di permukaan bumi. Sedangkan ruang relatif merupakan konsep yang dibuat oleh setiap orang yang perlu mendapatkan penjelasan masing-masing, bersifat perseptual dan tidak kasad mata.

Ruang dan variasi ruang tempat wilayah muka bumi sangat bervariasi, dan variasi fenomena wilayah memiliki sifat penyebaran sangat beranekaragam, tidak sama, merupakan salah satu prinsip geografi, dan karenanya, akan terjadi interelasi wilayah yang merupakan prinsip ke dua dari geografi. Prinsip geografi ada empat, (Sumaadmadja, 1981) yaitu penyebaran, interelasi, deskripsi, dan korologi.

Interaksi dalam bahasa inggris *interaction* artinya hubungan. Interaksi merupakan suatu proses yang mempunyai sifat timbal balik dan berpengaruh terhadap perilaku dari pihak-pihak yang melakukannya, melalui kontak langsung. Interaksi dalam wilayah, merupakan suatu kontak hubungan antar dua wilayah atau lebih yang dapat menimbulkan gejala, fakta baru atau berbeda dengan sebelumnya. Bentuk interaksi antara dua wilayah atau lebih dapat dikaji melalui mobilitas penduduk. Di Setiap wilayah memiliki unsur atau komponen manusia dengan berbagai variasi struktur penduduk yang menjadi komponen-

komponennya, baik komponen alam, fisik, sehingga di dalam suatu wilayah dapat terjadi hubungan yang saling berpengaruh antara dua atau lebih gejala atau disebut dengan interelasi atau *interelation*. Interelasi dapat terjadi antara komponen fisik dengan fisik, alam dengan alam, manusia dengan manusia, fisik dengan alam, fisik dengan manusia, alam dengan manusia dan komponen lainnya di dalam suatu wilayah. Masing-masing gejala, fakta, komponen, individu, yang terdapat di suatu ruang atau wilayah tersebut saling berhubungan dan saling berpengaruh atau *relationship*. Mengkaji interelasi wilayah, selanjutnya dapat diketahui karakteristik gejala atau fakta geografi di suatu tempat atau wilayah tertentu. Dinamika wilayah beserta komponennya yang sangat bervariasi sehingga memungkinkan suatu gerakan atau *movement*.

Geografi suatu ilmu yang mempelajari perbedaan dan persamaan fenomena geosfer, yang meliputi antroposfer, biosfer, litosfer, hidrosfer, atmosfer, dengan sudut pandang keruangan, kelingkungan dan kompleks wilayah. Antroposfer merupakan salah satu sfera yang diharapkan dapat memobilisasi sfera lainnya, sehingga terjadi hubungan yang serasi seimbang dan selaras, berkelanjutan. Analisis geografi selalu menggunakan prinsip geografi, sehingga kajian mobilitas penduduk merupakan salah satu aspek dari geosfer yang menjadi obyek material ilmu geografi.

1.2 Pendekatan Keruangan

Pendekatan Keruangan merupakan salah satu dari tiga pendekatan yang utama dalam Geografi, yaitu pendekatan kelingkungan dan pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan adalah suatu cara mendekati, cara mengkaji dan cara menganalisis. Keruangan, berasal dari kata ruang, mendapatkan awalan ke dan akhiran an, sesuatu yang bersifat ruang. Ruang adalah suatu bentukan buca bumi yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Ruang berdimensi dua dan tiga, ruang berdimensi dua merupakan satuan panjang dan lebar dan mendapatkan luasan, dan ruang berdimensi tiga merupakan suatu volum dan mendapatkan isi. Pendekatan keruangan adalah suatu kajian terhadap fenomena geosfer dengan menekankan pada eksistensi utama pada ruang.

Pendekatan keruangan dibedakan menjadi 9 tema (Yunus, 2010), yaitu pola keruangan, struktur keruangan, proses keruangan, interaksi keruangan, asosiasi keruangan, sinergisme keruangan, organisasi keruangan, komparasi keruangan, kecenderungan keruangan. Pendekatan keruangan menurut Sumaadmadja (1987) didalamnya termasuk pendekatan aktivitas manusia, pendekatan topic, dan pendekatan regional. Sedangkan Goodall (1987) menjelaskan bahwa pendekatan keruangan sangat terkait dengan pencatatan dan deskripsi fenomena geografi yang terdiri dari

fenomena alam dan manusia di permukaan bumi, dan variabel ruang menjadi perhatian khusus.

Geografi dalam setiap kajian yang dilakukan, tidak harus ketiga pendekatan digunakan dalam suatu kajian sekaligus, tetapi dapat dilakukan satu, dua dari tiga pendekatan. Salah satu contoh dalam pendekatan keruangan adalah persebaran keruangan atau *spatial distribution*. Persebaran merupakan salah satu dari empat prinsip geografi yaitu distribusi, interelasi, deskripsi dan korologi. Persebaran atau distribution mengandung arti penyaluran, pembagian, distribusi. Dalam hal ini persebaran mengandung makna tersebarnya fenomena muka bumi. Nursid (1991), memberikan penjelasan bahwa penyebaran menjadi kunci utama dalam kajian geografi dan studi geografi, karena dengan prinsip penyebaran dapat dijelaskan prinsip lainnya. Hal ini mengingat bahwa gejala dan fakta, baik yang bersifat alam, manusia maupun buatan manusia, tersebarnya di permukaan bumi tidak merata di wilayah satu dengan wilayah lainnya.

Spatial distribution (Googdall, 1987), a distribution is set of geographic observation representing the value or behavior of a particular phenomenon or characteristic across many location on the surface of the earth.

Persebaran keruangan merupakan kondisi tersebarnya suatu fenomena muka bumi di setiap ruang muka bumi. Persebaran fenomena di muka bumi sangat bervariasi, tidak seragam, tidak sama, beranekaragam, sangat tergantung dari

kondisi alamnya. Kondisi bervariasinya persebaran keruangan fenomena muka bumi sudah seperti apa adanya, bersifat *given*, sehingga menjadi kajian geografi yang utama (Nursid, 1981; Bintarto, 1983).

Region are not given in nature any more than eras are region given in the course of human events. Region are devised, they are spatial summaries designed to bring order to the infinite diversity of the earth's surface (Getis, 2011).

Geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kenampakan fenomena geosfer di permukaan bumi. Fenomena geosfer yang menjadi obyek material geografi tersebut, dikaji dimulai dari melihat lokasi dimana (*where*), kemudian dilanjutkan dengan tahapan analisis mengapa (*why*) fenomena tersebut terjadi, dan selanjutnya dikaji bagaimana (*how*), keterkaitannya dengan gejala lain. Setiap daerah memiliki karakteristik alam, fisik, manusia, dan sosial budaya yang bervariasi, masing-masing keunikan yang mengacu pada potensi daerah tersebut. sehingga memahami geografi akan dapat mengasah kecerdasan keruangan (*spatial intelligent*) seseorang (Rijanta, 2013).

Sebaran keruangan fenomena sangat bermanfaat untuk mengetahui kondisi lokasi baik secara absolut maupun relatif, dan juga untuk memahami lebih lanjut aksesibilitas suatu obyek di suatu wilayah. Sebaran keruangan dapat

diamati dari posisi lokasi suatu fenomena. Penyebaran keruangan, dapat dianalisis dengan analisis tetangga terdekat, yaitu mengkaji pola-pola penyebaran fenomena pada ruang atau wilayah tertentu (Nursid, 1981; Bintarto, 198 ; Getis, 2011; Hammond, 1979; Ritohardoyo, 2000; Hardati, 2014).

Pola keruangan (*spatial pattern*) dapat diartikan sebagai kekhasan sebaran fenomena keruangan (*special spatial distribution*) atas elemen-elemen pembentuk ruang (titik, garis, dan area) sesuai dengan kaidah kartografis, terklasifikasi kekhasan sebarannya. Pola keruangan dapat menjawab analisis pertanyaan geografi apa, siapa, dimana, mengapa, bagaimana. Klasifikasi sebaran keruangan elemen-elemen pembentuk ruang dapat mencerminkan pola tertentu, yaitu sebaran sistematis-teratur (*systematic-patterned-regular distribution*); sebaran acak (*random distribution*); dan sebaran mengelompok atau *clustered distribution* (Yunus, 2010). Pola keruangan berkaitan dengan susunan, bentuk, struktur, persebaran fenomena dalam ruang permukaan bumi (Hardati, 2014).

Struktur keruangan merupakan analisis keruangan yang menekankan pada makna struktur atau bentuk elemen pembentuk ruang, yang menjadi tekanan adalah khasan komposisi gejala atau fakta dalam ruang wilayah. Kekhasan gejala dalam suatu ruang atau wilayah dapat diamati dengan komponen pembentuk fisik, alam dan manusia. Komponen

fisik alami dikaji dari penggunaan lahan, struktur geologi, morfologi, ketinggian, kemiringan, sedangkan komponen manusia dapat dikaji dari struktur demografi, pendidikan, pendapatan, pekerjaan, ekonomi, budaya, dan lainnya, tergantung dari kekhasan gejala yang ada di suatu ruang.

Proses keruangan merupakan analisis keruangan yang menekankan pada gejala atau fakta proses terjadinya suatu gejala atau proses tersebut dalam ruang. Proses dari semua gejala atau fakta dapat dikaji dari proses terbentuknya suatu fakta atau gejala pada satu titik waktu atau periode sampai dengan periode berikutnya. Sehingga proses terjadinya gejala atau fakta dapat dikaji dengan 5W1H, yaitu *what* atau apa, *where* atau dimana, *when* atau kapan, *why* atau bagaimana, *who* atau siapa, dan *how* mengapa serta dengan menekankan pada prinsip-prinsip geografi.

Interaksi keruangan menekankan pada analisis hubungan antara dua atau lebih fakta atau gejala dalam ruang atau wilayah, interaksi fakta-fakta tersebut dalam hal intensitas hubungan, imbaldaya atau saling memberi maupun tidak saling memberi. Berhubungan saling tergantung, berhubungan saling tidak tergantung, berhubungan yang satu tergantung tetapi yang satunya tidak tergantung. Berdasarkan bentuk hubungan tersebut, yang paling baik adalah bentuk hubungan yang saling tergantung satu dengan lainnya.

Asosiasi keruangan merupakan analisis keruangan yang menekankan pada eksistensi korelasi sebaran suatu gejala atau fenomena dengan sebaran gejala atau fenomena lainnya di suatu wilayah. Korelasi persebaran keruangan antar gejala tersebut umumnya saling melengkapi. Seperti sebaran keruangan daerah tujuan mobilitas penduduk dengan sebaran lapangan pekerjaan, sehingga terjadi asosiasi keruangan sebaran daerah tujuan mobilitas penduduk dengan ketersediaan lapangan pekerjaan.

Sinergisme keruangan merupakan suatu analisis keruangan yang menekankan pada suatu usaha untuk menemukan wilayah yang memiliki sektor-sektor yang memungkinkan untuk melakukan kerjasama regional dengan harapan memperoleh hasil lebih baik, dibandingkan dengan apabila dikerjakan sendiri-sendiri. Sinergisme produk dapat dilakukan dengan cara inter dan intra keruangan serta fungsional.

Organisasi keruangan merupakan analisis keruangan yang menekankan pada karakteristik tatanan sebaran elemen pembentuk ruang, baik yang berupa titik, garis, dan bidang. Pada komparasi keruangan merupakan analisis keruangan yang menekankan pada eksistensi ruang dengan penekanan pada komparasi atau perbandingan ruang wilayah yang satu dengan wilayah lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk mengkaji keunggulan dan kelemahan variabel dalam ruang.

Geografi memiliki obyek material, semua obyek material dikaji menggunakan pendekatan geografi yang salah satunya adalah pendekatan keruangan, sehingga tema-tema analisis keruangan tersebut digunakan dalam mengkaji mobilitas penduduk, walaupun para ahli tidak harus menggunakan semua tema dalam suatu kajian.

1.3 Penduduk dan Persebaran Keruangan

Kegiatan pembangunan, baik di sektor ekonomi, sosial, budaya, politik maupun sektor lainnya, selalu terjadi hubungan atau interaksi antara manusia dengan lingkungan sekitarnya (Colby, 1990). Interaksi manusia dengan lingkungan memiliki pengaruh terhadap sumber daya alam. Meningkatnya aktivitas manusia memanfaatkan sumberdaya alam dalam kerangka kegiatan pembangunan, didorong oleh meningkatnya kebutuhan manusia untuk pangan, sandang, papan, dan ruang terbuka. Terjadi fenomena kontradiktif, di satu sisi kebutuhan dan pemanfaatan sumberdaya alam selalu meningkat karena jumlah penduduk yang semakin meningkat. Pada sisi lain, terjadi kemerosotan sumber daya dan lingkungan sebagai akibat dari penggunaan sumberdaya alam secara berlebihan (Sutikno, 1982).

Pembangunan Nasional bermuara pada manusia sebagai insan yang harus dibangun penghidupannya. Manusia merupakan sumberdaya pembangunan yang harus

terus ditingkatkan kualitas dan kemampuannya sehingga mengangkat harkat dan martabatnya. Pembangunan memerlukan sumber daya, karena sumber daya merupakan salah satu aset yang digunakan untuk melaksanakan dan sekaligus diharapkan hasilnya dalam pembangunan.

Pembangunan harus berkelanjutan, hasil kesepakatan *Rio Declaration on Environment and Development* menyepakati 27 prinsip yang dikenal dengan agenda 21. Walaupun demikian masih belum dapat diwujudkan tujuan pembangunan bersama, sehingga dirumuskan tujuan pembangunan millenium atau *millenium development goals* yang dikenal dengan MDGs, itupun dirasakan masih belum terselesaikan, sehingga yang sekarang digunakan kesepakatan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals (SDGs)*, yang akan berakhir pada tahun 2030.

Permasalahan pembangunan khususnya pada aspek kependudukan, di Indonesia adalah jumlah penduduk yang besar dan laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi belum diikuti oleh kualitas yang baik. Masalah kependudukan ini berdampak kepada bidang sosial, ekonomi, politik dan pertahanan, keamanan dan kualitas sumberdaya manusia itu sendiri. Masalah kependudukan dapat dikaji dari segi kuantitas dan kualitas. Dari segi kuantitas, jumlah penduduk yang besar berarti permasalahan

dalam kemampuan menyediakan sandang, pangan, papan, dan fasilitas lainnya, sedangkan dari segi kualitas melihat dari kemampuan daya saing Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia (Kemenkeu, 2015).

Penduduk yang belum sejahtera masih ada, sehingga berbagai pihak merumuskan berbagai strategi untuk mengurangi dan bahkan menghapuskan, hal ini terjadi karena sangat beragamnya penduduk di semua wilayah, sehingga menyisakan berbagai persoalan yang berhubungan dengan kependudukan dan lingkungan. Variasi wilayah tersebut memungkinkan terjadinya interaksi antara wilayah, yang salah satunya adalah mobilitas penduduk.

Jumlah penduduk dunia semakin banyak, dengan persebaran timpang. Pada tahun 2015, jumlah penduduk dunia sudah mencapai 7,336 triliun (PRB, 2015). Negara maju tetap dengan posisi jumlah penduduk lebih sedikit dibanding dengan jumlah penduduk di Negara berkembang.

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Dunia Tahun 2015

Wilayah	Jumlah Penduduk (pesen)
Negara pembangunan maju	17,09
Negara pembangunan kurang	82,91
unia (triliun)	7,336

Sumber: diolah dari Population Reference Boreau

Negara berkembang, dengan jumlah penduduk yang lebih banyak, mencapai 82,91 persen dan persebaran tidak

seimbang, melingkupi daerah yang luas. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan, sehingga mendorong terjadinya mobilitas antar wilayah dan kawasan.

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang tinggi, yaitu sebesar 255.182.144 jiwa, dan 67,35 persen diantaranya merupakan penduduk usia produktif (15-64 tahun) (BPS, 2016). Kuantitas, kualitas maupun persebaran penduduk merupakan tantangan berat bagi pembangunan bangsa Indonesia, sehingga memerlukan perhatian dan penanganan secara seksama. Jumlah penduduk yang banyak apabila diikuti dengan kualitas yang baik, akan menjadi potensi pembangunan, dan mendukung mobilitas penduduk yang terarah, dan kurang apabila kondisinya sebaliknya.

Tabel 1.2. Penduduk Indonesia berdasarkan Pulau Besar

Pulau	Jumlah Penduduk (persen)
Sumatera	21,63
Jawa-Bali NT	64,31
Kalimantan	6,00
Sulawesi	5,37
Maluku-Papua	2,69
Indonesia (jiwa)	255.182.144

Sumber: BPS, 2016

Jumlah penduduk di Indonesia masih menunjukkan persebaran yang kurang seimbang, yaitu Pulau Jawa jumlah penduduknya tetap yang paling banyak, sementara Pulau Kalimantan, Sulawesi dan Papua, yang memiliki wilayah paling luas, hanya berpenduduk kurang dari seperenam

jumlah penduduk Indonesia. Kondisi ketidaksamaan atau keberagaman jumlah penduduk mendorong terjadinya mobilitas penduduk antar wilayah, antar provinsi, dan antar pulau.

Dinamika perkembangan manusia menunjukkan bahwa semakin modern tingkat kehidupan manusia semakin besar kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang ditimbulkan. Kegiatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan ironisnya disebabkan oleh kegiatan pembangunan yang seyogyanya diharapkan dapat mensejahterakan manusia.

Permasalahan yang dihadapi oleh hampir semua manusia di muka bumi adalah sumber daya untuk memenuhi kebutuhan mendukung kelangsungan penghidupannya. Sumber daya yang diperlukan meliputi sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia. Keberadaan sumber daya alam sangat terbatas, kemampuan manusia untuk menciptakan sumber daya buatan tak terbatas, sehingga menguras sumber daya alam, sementara manusia yang menggunakan sumber daya alam dan sumber daya buatan jumlahnya semakin banyak, sebagai gambaran, pada awal abad 21, jumlah penduduk bumi sudah mencapai 7,356 milyar, dan diperkirakan akan mencapai dua kali lipat atau sekitar 14,712 milyar tidak membutuhkan waktu yang

lama. Waktu untuk mencapai jumlah penduduk mencapai dua kali lipat semakin pendek.

Mobilitas penduduk pada masa pembangunan di abad 21, diprediksi menjadi semakin meningkat, interaksi antar wilayah tidak hanya terjadi pada daerah yang sempit, tetapi hubungan antar Negara menjadi sangat intensif dan jumlahnya semakin banyak dan meluas. Pembangunan harus berkelanjutan, sementara penghidupan juga harus berkelanjutan, mobilitas penduduk secara geografis menjadi pilihan strategi penghidupan berkelanjutan.

BAB II

STRATEGI PENGHIDUPAN BERELANJUTAN

2.1. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan merupakan suatu realitas atau perwujudan dari suatu perencanaan. Pembangunan adalah usaha manusia untuk menuju tujuan yang lebih baik. Pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah atau Negara tidak sama, tergantung dari perkembangan masyarakatnya. Pembangunan atau development, mempunyai pengertian:

signifies change from something thought to be less desirable to something thought to be more desirable.

Pengertian tersebut mengandung arti bahwa pembangunan adalah perubahan dari suatu yang kurang berarti kepada suatu yang lebih berarti.

Pembangunan mengandung unsur-unsur yang dapat digunakan untuk menjadi indikator. Unsur pembangunan adalah usaha atau proses, peningkatan, kemajuan, perubahan kearah kemajuan; dilaksanakan secara sadar, sengaja dan secara terencana serta dilakukan untuk suatu tujuan tertentu.

Hasil proses pembangunan selanjutnya digunakan untuk menentukan kelas-kelas masyarakat. Berdasarkan hasil proses pembangunan, maka masyarakat di suatu Negara dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu masyarakat tradisional, masyarakat peralihan, dan masyarakat maju.

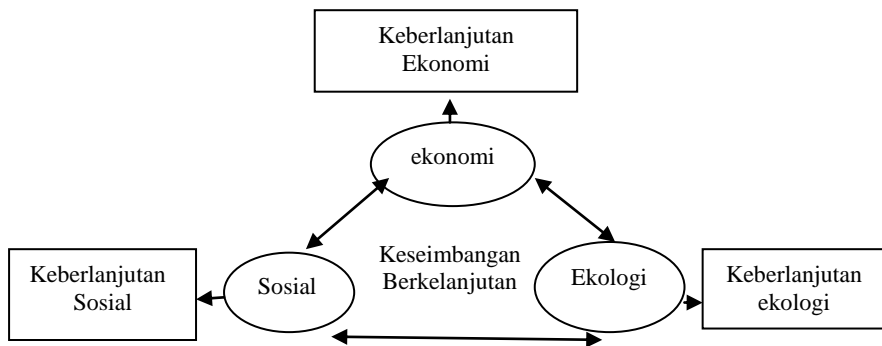
Pembangunan harus berkelanjutan, supaya masyarakat hidup sejahtera terus menerus.

Pembangunan berkelanjutan (Anonim, 1997) adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk didalamnya sumberdaya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Ide pembangunan berkelanjutan meluas ke beberapa negara dan mulai diperdebatkan dan didiskusikan oleh beberapa ahli. Pengertian pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan dalam laporan Our Common Future sebagai berikut (WCED, 1987).

“Sustainable development is the development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs” (WCED, 1987).

Konsep pembangunan berkelanjutan memiliki makna yang sangat luas dan menjadi payung bagi banyak Negara. Ide pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* untuk mengintegrasikan antara ekologi dan ekonomi (WCED, 1987; Boesler, 1994; Baiquni, 2007). Ekologi dan ekonomi memiliki arti yang sama dari akar katanya, yaitu *oikos* (bahasa Yunani) yang kemudian berubah menjadi *eco* dalam bahasa Inggris berarti rumah atau rumah tangga.

Pembangunan berkelanjutan bermakna bahwa keberlanjutan harus memenuhi kaidah ekonomi, sosial, dan ekologi (Baiquni, 2003; Cleveland, 2007). Ketiga unsure tersebut sudah sering sekali dibahas dan ditulis oleh beberapa pakar, sehingga menjadi salah satu keharusan indikator dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Ilustrasi hubungan antara ketiga unsure tersebut dapat dijelaskan dengan gambar berikut.



Sumber: Modifikasi dari Baiquni, 1998 ; Cleveland, 2007.

Gambar 2.1. Ilustrasi Hubungan Aspek Ekonomi, Ekologi, dan Sosial dalam Keseimbangan Berkelanjutan

Makna dari Gambar 2.1, adalah keberlanjutan ekologi dan lingkungan (*environmental sustainability*), adalah kondisi sumberdaya alam kita terjaga dan lestari, dapat mencukupi kebutuhan masa sekarang hingga masa generasi yang akan datang. Keberlanjutan ekonomi

(*economic sustainability*), adalah kondisi dimana pengeluaran dan pendapatan pada tingkat tertentu dapat terjaga keseimbangannya dalam jangka panjang. Keberlanjutan sosial (*social sustainability*), adalah kondisi dimana diskriminasi, keterlantaran, kekerasan dan ketidakadilan dapat diminimalkan, sebaliknya pemerataan, kesetaraan dan keadilan lebih diutamakan dan mendapat dukungan bersama. Tingkat Pendidikan, jumlah penduduk miskin, pemberdayaan masyarakat termasuk indikator yang berpengaruh terhadap keberlanjutan sosial (UNDP, 2006, 2007; Bohari, 2008 dalam Martopo).

Ketiga aspek yaitu ekologi, ekonomi dan sosial masing-masing mengalami keberlanjutan, sehingga akan terjadi keseimbangan berkelanjutan. Selanjutnya, ketiga komponen tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

2.2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan rumusan pembangunan yang dibuat secara bersama yang diprakarsai oleh Badan Perserikatan bangsa-bangsa. Tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, adalah kelanjutan dari tujuan pembangunan millenium yang dikenal dengan *Millenium Development Goals* atau *MDGs*, yang dilakukan pada periode tahun 2000 dan telah berakhir tahun 2015, memiliki pilar 8 pilar.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan sebuah agenda pembangunan dunia dan global, bersifat universal, bertujuan untuk mensejahterakan manusia dan planet bumi. SDGs disusun melalui sebuah program pembangunan yang berkelanjutan, memiliki 17 tujuan dengan 169 sasaran dan lebih dari 365 indikator. Semua indikator terukur dalam kurun waktu tertentu yang sudah ditetapkan. SDGs ditetapkan dan diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2015. SDGs merupakan kelanjutan dari *Millenium Development Goals* atau MDGs. SDGs dilaksanakan mulai tahun 2015 dan akan berakhir pada tahun 2030.

SDGs keberadaannya tidak begitu saja, tetapi dibentuk melalui proses selama tiga tahun. SDGs disusun melalui proses yang bersifat partisipatif, transparan dan inklusif, semua pemangku kepentingan dan masyarakat. SDGs diharapkan dapat mewakili sebuah kesepakatan yang belum pernah ada sebelumnya, terkait dengan prioritas pembangunan berkelanjutan. Pertemuan tersebut dihadiri oleh sebagian besar Negara di dunia yang jumlahnya 193 negara.

Tabel 2.1. Persebaran Jumlah Negara di Dunia

Benua	Kawasan	Jumlah Negara
Afrika	Afrika Utara	7
	Afrika Timur	16
	Afrika Barat	20
	Afrika Tengah	9
	Afrika Selatan	5
Amerika	Amerika Utara	2
	Amerika Tengah	8
	Caribbean	17
	Amerika Selatan	13
Asia	Asia Barat	18
	Asia Tengah	5
	Asia Selatan	9
	Asia Tenggara	11
	Asia Timur	8
Eropa	Eropa Utara	11
	Eropa Barat	12
	Eropa Selatan	15
Oceania	Oceania	17

Sumber: Population Reference Boreau

Tujuan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals* (SDG,s) memiliki 17 tujuan, dengan rincian 1) menghapus kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, 2) mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan, 3) memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia, 4) pendidikan inklusif dan berkualitas setara, 5) kesetaraan gender dan pemberdayaan, 6) ketersediaan dan manajemen air bersih dan sanitasi bagi semua, 7) energy terjangkau berkelanjutan, 8) pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan

lapangan kerja, 9) infrastruktur tangguh dan industrialisasi berkelanjutan, 10) mengurangi ketimpangan, 11) kota dan hunian berkelanjutan, 12) pola konsumsi dan produksi berkelanjutan, 13) perubahan iklim dan dampaknya, 14) konservasi memanfaatkan secara berkelanjutan sumberdaya laut, 15) melindungi dan merestorasi ekosistem daratan, 16) mendukung masyarakat damai-pemerintah akuntabel tanpa korupsi, 17) kerjasama internasional untuk pembangunan berkelanjutan (Infid, 2015).

Tabel 2.2. Tujuan Pembangunan Milleium dan Berkelanjutan (MDGs dan SDGs)

Aspek	MDGs	SDGs
Periode	2000-2015	2015-2030
Cakupan	Negara Berkembang	Semua negara di Dunia
Pilar	8	17
Indikator	18	169
Sasaran	69	>300
Target	50 persen	100 persen
Sifat	Dari atas	Dari bawah
Kegiatan	Solusi parsial	Solusi menyeluruh
Keterlibatan	Orang miskin	Semua pihak di semua lini

Sumber: www.feelgoog.org/jan,2015. Infid, 2015.

Tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah dirumuskan dalam dokumen SDGs, menjadi komitmen bersama negara-negara di dunia, harus dilakukan. Komitmen tersebut harus dirumuskan ke dalam perencanaan pembangunan sampai dengan dukungan anggaran,

pelaksanaan dan pengawasan. Semua tahapan tersebut harus terpenuhi dan mengharuskan keterlibatan semua pihak di semua lini. Intinya, semua individu harus terlibat dalam pelaksanaannya. Karena SDGs, merupakan milik dan tanggungjawab bersama, pemerintah yang ada di pusat dan kabupaten/kota, masyarakat swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Semua memiliki keterlibatan secara substantif dan prosedural, sehingga mengadopsi keadilan.

Tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, melalui Pemerintah Indonesia, dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan versi Indonesia, disusun peraturan yang mendasari melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 2018, Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemanfaatan, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dokumen peraturan tersebut, memuat secara rinci pokok-pokok yang harus dilaksanakan dalam pembangunan (Anonim, 2018).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan global tahun 2016 sampai tahun 2030.

2. Peta Jalan Nasional TPB adalah dokumen rencana yang

memuat kebijakan strategis tahapan dalam pencapaian TPB tahun 2016 hingga tahun 2030 yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. 3. Rencana Aksi Nasional TPB yang selanjutnya disingkat RAN TPB adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. 4. Rencana Aksi Daerah TPB yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.

Pelaksanaan TPB, disusun kelompok kerja menjadi empat pilar (Pasal 8), yaitu meliputi: a. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Sosial; b. kelompok Kerja Pilar Pembangunan Ekonomi; c. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Lingkungan; dan d. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

Tujuan pembangunan berkelanjutan versi Indonesia dirumuskan dalam dokumen, dengan 17 tujuan, sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan global. Berdasarkan 17 tujuan tersebut, terdapat empat bidang yang potensial untuk dikerjasamakan antara agenda internasional dan nasional. Keempat bidang tersebut yaitu kesenjangan,

energi berkelanjutan, anti korupsi dan kerjasama selatan-selatan.

Kesenjangan menjadi prioritas pembangunan nasional, hal ini disebabkan terjadi peningkatan kesenjangan dengan koefisien gini dari 0,31 pada awal millennium, menjadi 0,41, selain itu 20 persen penduduk terkaya mengambil lebih dari 48 persen total persentase pengeluaran rumah tangga. Sementara 40 persen penduduk termiskin, hanya mampu mengambil 17 persen. Diharapkan pada akhir tahun 2019 dapat diturunkan menjadi 0,36 persen, dilaksanakan dengan bersinergi dengan tujuan nawacita 3 dan RPJMN 6.3, dimulai dari pembangunan daerah pinggiran dan pemerataan pembangunan kawasan timur Indonesia.

Energi berkelanjutan ditujukan untuk menciptakan energy terbarukan, dan pembelajaran pemanfaatan energy bersih. Anti korupsi ditekankan pada reformasi birokrasi yang diikuti dengan reformasi tatanan masyarakat yang berkomitmen pada hidup bersih dari korupsi, yang sudah dimulai sejak tahun 1999, sehingga pelaksanaan selalu dilakukan dengan lintas sektor di semua tujuan SDGs. Sedangkan kemitraan global terutama dalam keterlibatannya dalam kerjasama selatan-selatan, kerjasama dengan Negara berkembang lainnya.

Tujuan pembangunan berkelanjutan versi Indonesia, disinkronisasikan dengan tujuan pembangunan Nawacita,

supaya dapat dilaksanakan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Tabel 2.3. Ringkasan Keterkaitan antara Nawacita dengan RPJMN dan SDGs

SDGS	Nawacita	RPJMN
Tujuan 3, 10, 16, 17	Nawa Cita 1	Bab 6.1, 10 sub bab
Tujuan 6	NC2	Bab 6.2, 5 sub bab
Tujuan 1-11	NC3	Bab 6.3, 3 sub bab
Tujuan 14-16	NC4	Bab 6.4, 6 sub bab
Tujuan 1-6	NC5	Bab 6.5, 6 sub bab
Tujuan 1-10	NC6	Bab 6.6, 11 sub bab
Tujuan 1-5, 8,9, 12-15	NC 7	Bab 6.7, 9 sub bab
Tujuan 3-4 dan 11	NC8	Bab 6.8, 1 sub bab
Tujuan 5. 10-16, dan 17	NC9	Bab 6.9, 1 sub bab

Sumber: infid, 2015.

SDGs harus dilaksanakan pemerintah pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, sehingga semua tujuannya (17 tujuan) harus tersurat di dalam dokumen rencana pembangunan, baik di pusat atau nasional, dan daerah atau di provinsi/kabupaten/kota. Hal tersebut supaya mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah. Walaupun demikian, dukungan anggaran tidak hanya terbatas dari pemerintah saja, tetapi semua pihak diperbolehkan memberikan dukungan anggaran. Pihak swasta melalui CSR atau *coporate sustainable respocibility*.

SDGs Indonesia juga sudah sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam dokumen nawacita. Hubungan antara tujuan pembangunan

berkelanjutan global dengan nawa cita yang sudah dirumuskan diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

2.3. Strategi Penghidupan Berkelanjutan

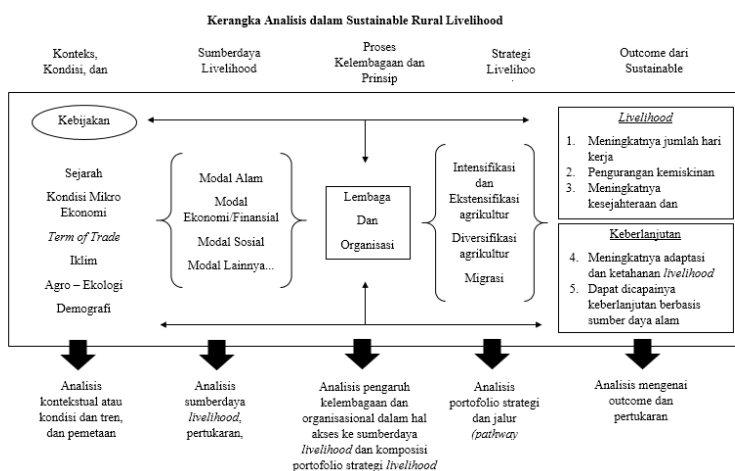
Strategi penghidupan berkelanjutan merupakan suatu cara untuk menempuh penghidupan berkelanjutan. Penghidupan merupakan kemampuan akses ke aset dan kegiatan serta memiliki out come yang berkesinambungan. Penghidupan berkelanjutan, pertama diungkapkan oleh Chamber dan Conway (1992) sebagai berikut.

...a livelihood is sustainable when it can cope with and recover from stress and shocks, maintain or enhance its capabilities and assets, provide sustainable livelihood opportunities for the next generation, and contribute net benefits to other livelihoods at the local and global levels in the long and short run.

Penghidupan berkelanjutan dapat dikaji pada semua level atau tingkatan, mulai dari tingkat mulai dari yang paling sempit sampai dengan yang paling luas, seperti individu, kelompok masyarakat, desa/kelurahan/kecamatan/ kabupaten/ kota/provinsi/Negara/kawasan.

Penghidupan berkelanjutan sudah dikaji oleh beberapa ahli dari berbagai negara mulai tahun 1987 sampai dengan sekarang, abad ke 21. Scoones (2001) membuat kerangka berpikir agar memudahkan memahami makna penghidupan

(*livelihood*). Kerangka tersebut mengaitkan antara kondisi, konteks, dan berbagai kecenderungan seperti (setting kebijakan, politik, sejarah, agroekologi, dan kondisi sosial-ekonomi) yang mempengaruhi sumberdaya penghidupan (aset alam, uang/ekonomi, manusia, sosial, dan lainnya). Kerangka kerja tersebut digambarkan secara detail seperti gambar berikut.



Sumber: Scoones, 1998.

Gambar 2.2. Kerangka Kerja Strategi Penghidupan Berkelanjutan

Kerangka tersebut dapat disimpulkan bahwa penghidupan (*livelihood*) dapat sebagai suatu upaya strategi mencari nafkah untuk penghidupan, yaitu berbagai macam cara seseorang/individu, rumah tangga/keluarga yang

memanfaatkan berbagai sumberdaya yang dimiliki untuk mendapatkan penghasilan sehingga dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Strategi penghidupan berkelanjutan (Scoones, 1998; DFID, 2001; UNDP, 2007; Rijanta, 2010; Baiquni, 2007; Scale Up, 2011; Martopo, 2013, Hardati, 2014) merupakan upaya yang dilakukan individu, rumah tangga, kelompok atau desa dalam mengelola atau mengkombinasikan aset penghidupan yang tersedia dan dimiliki untuk mencapai penghidupan yang memadai dan berkelanjutan. Beberapa peneliti yang mencermati tentang strategi penghidupan melakukan pada tingkatan atau level yang berbeda-beda.

Scoones (1998) menjelaskan bahwa strategi penghidupan dapat dijelaskan seperti berikut.

...a key issue in the analysis of livelihood strategies is the scale at which an assessment takes place. Livelihood strategies, for example, can be described at an individual, household and village level, as well as at regional or even national levels. But there are differences evident between scale levels in terms of the net livelihood effects. For an individual it may be best to pursue a particular set of livelihood strategies in combination, but these may have either positive or negative impacts on other household members or the broader community.....

Strategi penghidupan pada level desa atau wilayah yang lebih luas dapat dilakukan dengan berbagai hal yang sama. Scoones (1998) menjelaskan sebagai berikut.

...rural livelihood strategies are often heavy reliant on the natural resources base. For this reason, the IDS research has examined livelihood strategy choices along gradients running from relatively high to low natural resource endowment (IDS, 1996).

Strategi penghidupan berkaitan dengan upaya masyarakat mengelola aset-aset penghidupan yang tersedia, dimiliki, mensikapi perubahan yang terjadi dan menentukan prioritas untuk mempertahankan atau memperbaiki penghidupan. Baiquni (2007) memberikan batasan strategi penghidupan merupakan pilihan yang dibentuk oleh aset, akses dan aktivitas yang dipengaruhi oleh kapasitas seseorang atau rumahtangga untuk melakukannya.

Aktivitas dalam penghidupan berkelanjutan yang merupakan strategi penghidupan berupa pilihan cara berdasarkan prioritas dari adanya kesempatan dalam menggunakan kemampuan atau aset yang tersedia untuk mempertahankan atau memperbaiki penghidupan. Setiap orang individu rumahtangga atau desa memiliki strategi penghidupan yang berbeda-beda. Scoones, (1998) dan Hardati (2014) mengelompokkan strategi penghidupan berdasarkan kegiatan untuk meningkatkan pendapatan, menjadi 3, yaitu strategi intensifikasi dan ekstensifikasi;

strategi diversifikasi dan migrasi. White (1991), Baiquni (2007) mengelompokkan strategi berdasarkan status sosial ekonomi rumah tangga, yaitu survival, konsolidasi, dan akumulasi. Ellis (2000), Rijanta (2008); Hardati (2014) mengelompokkan strategi berdasarkan basis aktivitas yang dilakukan, yaitu aktivitas berbasis pertanian dan non-pertanian. Bank Dunia (2010) mengelompokkan strategi berdasarkan adaptasi yang dilakukan, yaitu reaktif-responsif dan proaktif-antisipatif.

Strategi penghidupan sangat tergantung dari aset penghidupan yang tersedia dan kerentanan yang dihadapi. Strategi penghidupan yang dilakukan oleh individu, rumah tangga, kelompok, atau desa diharapkan memiliki keluaran yang lebih baik atau meningkat dari pendapatan, kesejahteraan, kerentanan berkurang, ketahanan pangan meningkat, pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Cara-cara yang dilakukan dalam strategi penghidupan berkelanjutan dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk dan jenis. Pengelompokan strategi penghidupan berkelanjutan sangat beragam, dikarenakan sangat tergantung dari disiplin ilmu para pakar. Strategi penghidupan rumah tangga yang dikategorikan sebagai sumber penghasilan ada berbagai cara. Strategi yang diterapkan masing-masing rumah tangga selain

bertujuan memenuhi kebutuhan hidup juga untuk memperkuat sumber-sumber kehidupannya.

Ellis (2000) mengungkapkan 3 pembentuk strategi penghidupan antara lain meliputi: a) *On-Farm* yaitu strategi yang berasal dari sumber hasil pertanian dalam arti yang luas (perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dll); b) *Off-Farm* yaitu upah yang berasal dari tenaga kerja pertanian, sistem bagi hasil (*harvest share system*), kontrak upah kerja non upah dan lain-lain; c) *Non-Farm* yaitu Suatu sumber pendapatan yang berasal dari luar kegiatan pertanian, yang dibagi menjadi 5, antara lain: upah tenaga kerja pedesaan bukan dari pertanian, usaha usaha sendiri diluar kegiatan pertanian, pendapatan dari hak milik (misalnya sewa), kiriman dari buruh migran yang pergi ke luar kota, kiriman dari buruh migran yang pergi ke luar negeri.

Pembagian lain strategi penghidupan oleh (Scoones, 1998; Rijanta, 2008; Hardati, 2014) adalah intensifikasi dan ekstensifikasi, diversifikasi, migrasi. Strategi penghidupan dilakukan untuk membentuk penghidupan berkelanjutan. Strategi penghidupan yang dilakukan di beberapa Negara tidak harus begitu saja diterapkan di Negara lain, karena setiap ruang wilayah Negara memiliki ciri karakteristik khas baik dari aspek alam fisik dan manusianya. Scoones (1998) menjelaskan sebagai berikut.

.....given particular context (of policy setting, politics, history, agroecology and socio-economic conditions), what combination of livelihood resources (different types of capital) result in the ability to follow what combination of livelihood strategies (agricultural intensification/extensification livelihood diversification and migration) with what outcomes? Of particular interest in this framework are the institutional processes (embodied in a matrix of formal and informal institutions and organisation) which mediate the ability to carry out such strategies and achieve (or not) such outcomes.

Unsur-unsur strategi penghidupan menurut Chambers dan Conway (1992) adalah kapabilitas, aset, dan aktivitas. Aset dapat berupa klaim atau akses. Kapabilitas mengarah pada kemampuan individu untuk mewujudkan potensi dirinya sebagai manusia dalam hal ini yaitu menjadikan, menjalankan, melakukan yang bisa dilakukan dengan karakteristik ekonomi, sosial, dan sumberdaya manusia. Aktifitas merujuk pada kegiatan seseorang yang menghasilkan pendapatan.

Strategi penghidupan, dengan tersedianya beragam pilihan bagi penduduk/desa/wlayah merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk mewujudkan penghidupan yang berkelanjutan. Strategi penghidupan sangat erat kaitannya dengan keberkelanjutan, seseorang untuk mampu mempertahankan hidupnya dengan mengembangkan kemampuan yang kemudian dapat memanfaatkan kesempatan yang ada untuk pemenuhan kebutuhan rumah

tangga sekaligus menyeimbangkan antara sumberdaya yang dimiliki dengan tingkat kebutuhan rumahtangga.

White (1991) yang dikembangkan oleh Rijanta (2008) dan Baiquni (2007) menjelaskan bahwa strategi *livelihoods* dengan membagi status sosial menjadi 3, yaitu strategi, konsolidasi dan akumulasi. Strategi survival adalah strategi untuk memenuhi kebutuhan hidup pada tingkat minimum agar dapat bertahan hidup. Keadaan tersebut terjadi di suatu wilayah pada sebagian rumah tangga melakukan peminjaman uang dari kerabat atau tetangga kaya (Rijanta, 2008). Baiquni (2007) mengatakan bahwa ciri rumah tangga tersebut memiliki pola pengeluaran didominasi oleh pemenuhan kebutuhan pokok pangan, mengurangi pengeluaran, merubah pola konsumsi, menjual barang-barang milik rumah tangga.

Strategi konsolidasi merupakan strategi dari kelompok menengah yang mengutamakan keamanan dan stabilitas pendapatan dari pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Keadaan yang ada apabila mengalami kegagalan maka bisa merosot kembali pada strategi survival (White (1991) dan Baiquni (2007)). Strategi konsolidasi terjadi di suatu wilayah yang rumah tangga memiliki sumberdaya, dapat meningkatkan partisipasi tenaga kerja produktif dari anggota, memberikan perhatian khusus kepada pendidikan, kesehatan dan menjaga jaringan sosial yang lebih luas di masyarakat (Rinjata, 2008).

Strategi akumulasi, merupakan cara yang paling bagus, karena dalam rumah tangga memiliki kapasitas, aset, dan pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi dibandingkan kedua kategori strategi survival dan konsolidasi. Bila melakukan investasi didasarkan pada akumulasi modal dan sebagai diversifikasi jangka panjang (Baiquni, 2007). White (1991) bahwa keberhasilan strategi akumulasi yaitu rumah tangga yang sudah mampu secara berlebihan memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga melakukan investasi dan mengembangkan usahanya baik non-farm maupun farm.

Scoones (1998) menggolongkan tiga strategi *livelihood* yang mungkin dilakukan oleh rumah tangga petani, yaitu (a) rekayasa sumber nafkah pertanian, yang dilakukan dengan memanfaatkan sektor pertanian secara efektif dan efisien baik melalui penambahan input eksternal seperti teknologi dan tenaga kerja (intensifikasi), maupun dengan memperluas lahan garapan (ekstensifikasi), (b) pola nafkah ganda (diversifikasi), yang dilakukan dengan menerapkan keaneragaman pola nafkah dengan cara mencari pekerjaan lain selain pertanian untuk menambah pendapatan, atau dengan cara mengerahkan tenaga kerja keluarga (ayah, ibu, dan anak) untuk bekerja selain pertanian dan memperoleh pendapatan, (c) rekayasa spasial (migrasi) merupakan usaha yang dilakukan dengan melakukan

mobilitas ke daerah lain di luar desanya, baik secara permanen maupun sirkuler untuk memperoleh pendapatan.

Strategi intensifikasi dan ekstensifikasi yaitu strategi yang tetap bertahan pada mata pencaharian semula. Intensifikasi berasal dari kata intensif yang berarti sungguh-sungguh (giat secara mendalam) untuk memperoleh efek yang maksimal. Intensifikasi adalah perihal peningkatan kegiatan yang lebih baik, sedangkan ekstensifikasi berasal dari kata ekstensif yang berarti bersifat menjangkau secara luas. Strategi intensifikasi berupa: pemanfaatan lahan pertanian yang ada atau yang dimiliki; pemanfaatan lahan pekarangan, pemanfaatan lahan tegalan-kebun, pemanfaatan lahan kosong yang ada.

Strategi intensifikasi dilakukan dengan tetap bertahan hidup pada mata pencaharian yang lama, dengan memberikan penekanan pada usaha peningkatan hasil produksi per satuan luas melalui penanaman modal dan atau peningkatan input tenaga kerja. Intensifikasi memberikan penekanan pada usaha peningkatan hasil produksi per satuan luas melalui penanaman modal atau peningkatan input tenaga kerja.

Ekstensifikasi adalah perluasan terhadap aset yang dimiliki, seperti lahan, ruang, waktu, jalan dan sebagainya. Strategi yang dilakukan menambah lahan, menambah modal, menambah tenaga kerja, menambah alat produksi. Dilakukan

dengan ekstensifikasi mengupayakan lebih banyak tanah untuk ditanami atau digarap (Scoones, 1998).

Strategi ekstensifikasi dilakukan dengan cara penambahan lahan yang dilakukan dengan cara membeli, menyakap, menyewa, atau lainnya. Strategi ekstensifikasi dilakukan dengan tetap bertahan hidup pada matapecaharian yang lama, dengan memberikan penekanan pada usaha peningkatan hasil produksi per satuan luas melalui penanaman modal dengan cara lebih banyak menambah lahan untuk ditanami.

Strategi diversifikasi, berasal dari kata diversifikasi pada dasarnya memiliki arti beragam, bergantung dari konteks permasalahannya. Diversifikasi merupakan strategi penting untuk mengurangi kerentanan penghidupan atau meningkatkan taraf hidup. Orang-orang tidak hanya melakukan diversifikasi dan atau de-diversifikasi penghidupan untuk mengatasi kesulitan, tetapi juga untuk mempertahankan dan meningkatkan kehidupan (Niehof, 2004).

Hardjono (1990) menjelaskan bahwa proses diversifikasi dapat dilakukan dengan tetap memanfaatkan sektor pertanian dengan sektor usaha lain. Sektor usaha lain yang dapat dikembangkan antara lain adalah arena perdagangan dan jasa. Sektor perdagangan yang banyak disoroti adalah perdagangan komoditi pertanian telah berkembang sejak

tahun 1960-an. World Bank (1998) mendefinisikan diversifikasi dalam kaitannya dengan membangun pedesaan atau transformasi struktur ekonomi pedesaan. Sedangkan Pearce (1983), memberikan pengertian diversifikasi dalam konsep wilayah, yaitu usaha penganeragaman industri untuk mencapai tujuan tertentu seperti meningkatkan pendapatan, pertumbuhan, kesempatan kerja, atau kestabilan ekonomi.

Diversifikasi merupakan keragaman sumber pendapatan rumah tangga, yang pada dasarnya merupakan determinan dari keragaman ekonomi wilayah pedesaan atau diversifikasi pedesaan (Susilowati, 2001; Rijanta, 2008; Hardati, 2014). Diversifikasi pedesaan merupakan suatu proses semakin beragam dan semakin banyaknya rumber penghasilan penduduk pedesaan, dari kegiatan pertanian dan non pertanian yang dilakukan di dalam dan di luar desa (Rijanta, 2008; Hardati, 2014).

Proses tersebut merupakan proses struktural dimana sumber lapangan kerja dan pendapatan penduduk desa dikembangkan dan di perluas (Prabowo, 1995). Rumah tangga sebagai pelaku ekonomi memiliki peran utama dalam menentukan tingkat keragaman ekonomi desa, yaitu melalui keragaman sumber pendapatan dalam mendorong perekonomian desa akan sangat penting. Kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah akan menentukan keragaman ekonomi suatu wilayah, seperti tingkat pendapatan, ketenaga

kerjaan, produksi dan sebagainya. Lahan, tenaga kerja, dan infrastruktur akan dialokasikan ke bentuk usaha yang akan memberikan keuntungan atau pendapatan yang lebih tinggi dan stabil.

Strategi diversifikasi dalam mewujudkan penghidupan berkelanjutan dapat dilakukan dengan beragam kegiatan, seperti diversifikasi pekerjaan yang dilakukan dari pekerjaan sebagai petani beralih atau mengusahakan pekerjaan disektor non-pertanian. Ada juga diversifikasi usaha ataupun diversifikasi ekonomi dan hal ini terkait dengan diversifikasi pendapatan. Menurut Dercon (2002) kegiatan mengenai diversifikasi pendapatan sering dikaitkan dengan upaya penanggulangan resiko, kesempatan atau ketidakpastian pendapatan atas tenaga kerja dan lahan. Pada tingkat rumah tangga, diversifikasi melalui penganeekaragaman usaha dan pemanfaatan aset, selain dimaksudkan untuk mencari nilai tambah kapital juga untuk mengurangi instabilitas pendapatan rumah tangga.

Strategi diversifikasi dapat dilakukan dengan cara mencari tambahan dari luar kegiatan pertanian (peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan), pengolahan hasil pertanian (membuat tape ketela, membuat rengginan dari beras ketan, membuat aneka makanan berbahan ketela pohon, dan lainnya) dan non-pertanian (perdagangan, jasa, industri dan kegiatan lain di luar pertanian). Strategi diversifikasi

dilakukan dengan cara mencari alternatif lain dari kegiatan off-farm atau non-farm sebagai sarana pemenuhan kebutuhan ketika mata pencaharian lama dirasa tidak atau belum memungkinkan.

Strategi migrasi yaitu mencari penghidupan ditempat lain baik sementara atau permanen serta berganti pekerjaan (Scoones, 1998). Migrasi penduduk dari sektor pertanian di pedesaan berlangsung akibat adanya investasi dari sektor manufaktur dan jasa yang selama ini masih terfokus di kota. Ketika kegiatan di perkotaan mampu menawarkan pendapatan tinggi kepada penduduk desa yang bermigrasi, di titik itu pula kecenderungan sektor pertanian akan mengalami kekurangan pekerja (Arief 1995, dalam Andri 2006).

Strategi migrasi, yaitu cara-cara mencari penghidupan di tempat lain baik sementara, permanen dan atau berganti pekerjaan. Strategi migrasi merupakan cara-cara yang dilakukan seseorang di luar desa, baik pada kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi.

Strategi migrasi pada kegiatan intensifikasi yang dilakukan di luar desa, yaitu dengan memanfaatkan lahan pertanian: sawah, tegalan, kebun campuran, kehutanan, pekarangan, lahan kosong, yang berada di luar desa; kegiatan ekstensifikasi dalam dilakukan di luar desa dengan cara: penambahan lahan yang dilakukan dengan cara membeli, menyakap, menyewa, atau lainnya.

Strategi diversifikasi dilakukan di luar desa dapat dilakukan dengan cara mencari tambahan diluar kegiatan *onfarm*, *offfarm* dan *nonfarm*. Kegiatan pertanian (peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan), pengolahan hasil pertanian (membuat tape ketela, membuat rengginan dari beras ketan, membuat aneka makanan berbahan ketela pohon, dan lainnya) dan non-pertanian (perdagangan, jasa, industri dan kegiatan lain di luar pertanian).

Scoones (1998) menjelaskan bahwa migrasi adalah sebagai berikut.

..migration .. between different migration cause (e.g. voluntary and involuntary movement), effects (e.g. reinvestment in sgricultural, enterprise or consumption at the home or migration site) and movement patterns (e.g. to or from different place).

Strategi migrasi ke luar desa baik dengan cara intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dapat dilakukan, hal ini tergantung dari kondisi penghidupannya. Strategi migrasi merupakan salah satu bentuk mobilitas yang bersifat permanen. Mobilitas merupakan cara yang dilakukan untuk mencari penghidupan berkelanjutan dengan cara pergi ke luar desa baik secara permanen dan tidak permanen..

Mobilitas penduduk merupakan salah satu bentuk strategi penghidupan berkelanjutan. Strategi penghidupan dapat dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi, diversifikasi dan migrasi. Strategi migrasi (Scoones, 1998)

mengkaji migrasi untuk strategi penghidupan menggunakan batas wilayah yang tidak terbatas, sedangkan penelitian lain di Indonesia menggunakan batas wilayah desa (Baiquni, 20067; Rijanta, 2008; dan Hardati, 2014). Mantra dalam mengkaji mobilitas penduduk menggunakan batas wilayah dukuh (Mantra, 2003).

Tabel 2.4. Strategi Penghidupan Berkelanjutan

Bentuk Strategi	Kegiatan	Skala
Survival	Penghematan sumberdaya	Individu, rumahtangga, wilayah desa-nasional
Konsolidasi	Optimalisasi sumberdaya	Individu, rumahtangga, wilayah desa-nasional
Akumulasi	Memperluas sumberdaya	Individu, rumahtangga, wilayah desa-nasional
Intensifikasi	Optimalisasi sumberdaya	Individu, rumahtangga, wilayah desa-nasional
Ekstensifikasi	Memperluas sumberdaya	Individu, rumahtangga, wilayah desa-nasional
Diversifikasi	Menganekaragaman sumberdaya	Individu, rumahtangga, wilayah desa-nasional
Migrasi	Penghematan, Optimalisasi, memperluas, menganekaragaman sumberdaya	Individu, rumahtangga, wilayah desa-nasional ke luar daerah

Sumber: modifikasi dari (Chambers dan Conway, 1992; Scoones, 1998; Ellis, 2000; Rijanta, 2008; Baiquni, 2007; Hardati, 2014).

Strategi penghidupan berkelanjutan dapat dilakukan di semua level atau tingkatan atau skala. Pada tingkat individu, setiap individu melakukannya, dan pada tingkat rumah tangga, dilakukan oleh rumah tangga dengan anggota

rumahtangganya. Sedangkan di tingkat wilayah, dari tingkat desa sampai dengan wilayah yang lebih luas, dilakukan oleh setiap individu, rumahtangga di wilayah yang bersangkutan.

BAB III

TEORI MOBILITAS PENDUDUK

3.1. Pengertian Konsep Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk adalah gerakan penduduk dari satu posisi ke posisi lainnya. Gerak posisi memiliki arti horisontal dan vertikal. Apabila gerakan penduduk tersebut merupakan gerak posisi ruang dari ruang atau wilayah satu ke ruang atau wilayah lainnya secara horisontal disebut dengan gerak penduduk geografis. Gerak posisi penduduk tersebut ke arah vertikal, dari status satu ke status lain yang lebih baik disebut dengan gerak atau mobilitas sosial atau perubahan status.

Gerak atau mobilitas penduduk antar ruang atau horisontal atau geografis merupakan suatu gerak penduduk dari ruang satu ke ruang lainnya dalam kurun waktu tertentu. Ruang dalam hal ini sangat tidak terbatas, dan belum ada kesepakatan yang pasti di antara para ahli untuk dikatakan melakukan gerakan penduduk. Demikian juga halnya dengan gerakan vertikal, merupakan gerakan dari posisi status yang seperti apa juga belum ada kepastian, yang pasti adalah bergerak dari satu posisi status ke posisi atau status lainnya di suatu kurun waktu tertentu.

Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lain pada waktu tertentu atau gerak horizontal atau geografi. Berdasarkan waktu dan tujuannya,

dibedakan menjadi dua, yaitu mobilitas permanen dan mobilitas non-permanen.

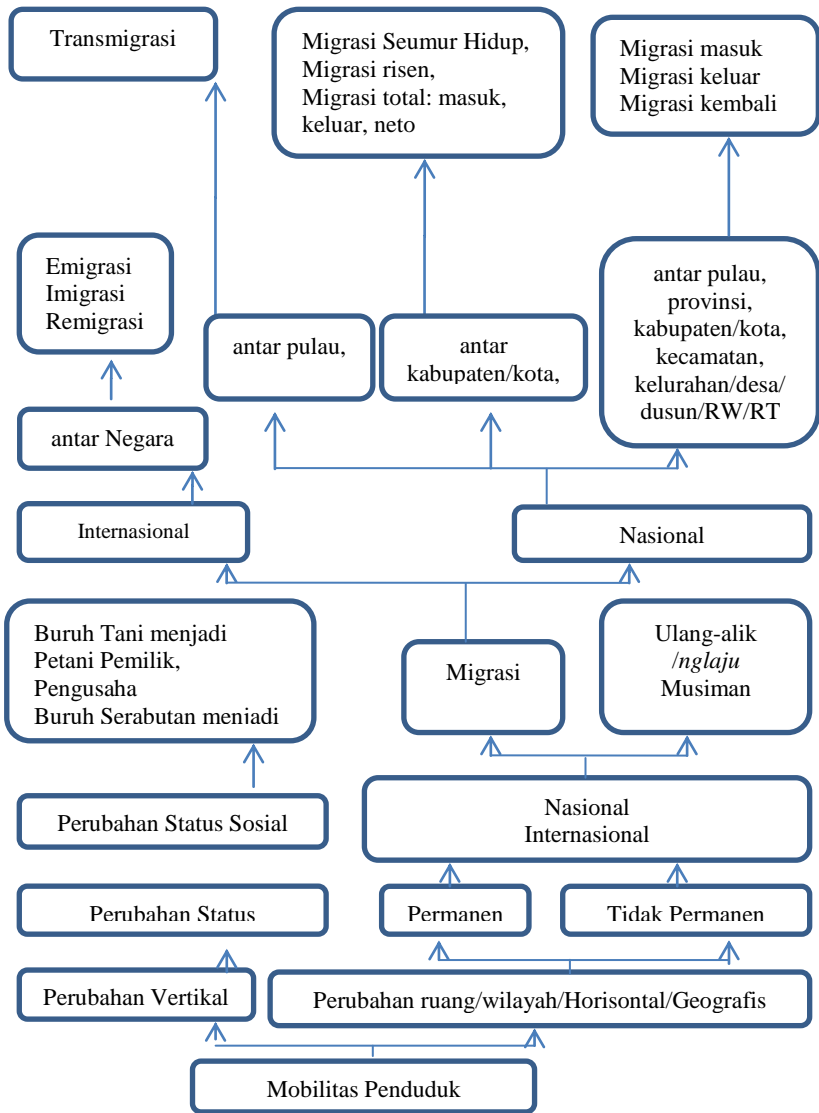
Mobilitas horisontal adalah perubahan gerak lokasi seseorang dari lokasi satu ke lokasi lain, dalam waktu tertentu. Mantra (2003) memberi batasan mobilitas penduduk horisontal sama dengan mobilitas penduduk geografis, adalah gerak penduduk yang melewati batas wilayah menuju wilayah lain pada periode waktu tertentu, dengan batas wilayah dukuh. Mobilitas horisontal bersifat kuantitatif, karena akan mengubah jumlah penduduk, baik jumlah penduduk di daerah asal dan di daerah tujuan. Mobilitas penduduk horisontal akan menambah jumlah penduduk di daerah asal, dan akan mengurangi jumlah penduduk di daerah tujuan, sehingga jumlah mobilitas penduduk horisontal diperhitungkan untuk memprediksi jumlah penduduk, dengan menggunakan beberapa asumsi.

Migrasi merupakan salah satu variabel demografi yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk suatu daerah/negara/wilayah. Perubahan tersebut sifatnya dapat menambah dan atau mengurangi di daerah tujuan maupun daerah asal. Menambah penduduk apabila terjadi migrasi masuk dan mengurangi apabila terjadi migrasi keluar. Migrasi sering diartikan sebagai perpindahan penduduk permanen dari suatu tempat ke tempat yang lain. Orang yang melakukan migrasi disebut migran.

3.2. Bentuk Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk, berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horisontal. Mobilitas vertikal atau mobilitas status yang merupakan perubahan status seseorang dari status yang satu ke status lainnya yang lebih baik. Mobilitas vertikal yang berubah adalah statusnya, sehingga mobilitas vertikal bersifat kualitatif. Mobilitas penduduk vertikal tidak digunakan untuk dasar memprediksikan jumlah penduduk. Walaupun jumlah penduduk yang melakukan mobilitas vertikal secara tidak langsung dapat mempengaruhi jumlah penduduk melalui tiga proses demografi tersebut.

Bentuk mobilitas penduduk, pada umumnya digolongkan menjadi dua, yaitu permanen dan tidak permanen. Bentuk mobilitas penduduk non permanen, dibedakan menjadi ulang alik, dan musiman. Sedangkan bentuk mobilitas penduduk permanen ada tiga, yaitu migrasi masuk, migrasi keluar, dan migrasi neto. Dua bentuk mobilitas penduduk tersebut apabila melintas batas Negara disebut mobilitas internasional (emigrasi, imigrasi, remigrasi) dan apabila di dalam suatu Negara disebut mobilitas nasional (migrasi seumur hidup, risen, total) dan (migrasi masuk, keluar dan kembali). Salah satu bentuk mobilitas penduduk antar pulau di Indoneisa disebut dengan transmigrasi.



Sumber: Mantra, 1975; Hardati, 2003 dan Modifikasi

Gambar 3.1. Bentuk Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk horisontal, berdasarkan tujuan dan waktunya, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu permanen dan tidak permanen. Mobilitas penduduk permanen adalah perubahan tempat tinggal dari daerah satu ke daerah lain dengan tujuan untuk menetap di daerah tujuan. Mobilitas permanen, tidak menentukan batas waktu dan daerahnya., nasional, lokal.

Batas wilayah yang sering digunakan untuk menentukan seseorang melakukan mobilitas adalah batas administratif. Para ahli demografi, geografi, dan kependudukan belum memberikan secara pasti batas wilayah dan waktu yang digunakan untuk menentukan jenis mobilitas seseorang. Badan Pusat Statistik (BPS), menggunakan batas wilayah provinsi pada sensus penduduk tahun 1990, dan batas wilayah kabupaten/kota pada sensus penduduk tahun 2010. Batas waktu yang digunakan sama, yaitu enam bulan atau lebih. Sedangkan Mantra (2003) menggunakan batas wilayah dukuh dengan waktu kurang dari 24 jam. Hardati (1997, 1999, 2005) menggunakan batas wilayah desa/kelurahan. Beberapa penelitian tentang mobilitas penduduk menjadi sulit dikomperasikan, karena konsep batas wilayah dan waktu berbeda.

Tabel 3.1. Batas Ruang Wilayah Mobilitas Penduduk

Bentuk Mobilitas	Batas Waktu	Batas Wilayah	Peneliti
Ulang-alik	6 jam atau > dan < 24 jam dan pulang pada hari yang sama	Dusun	IB Matra di DIY tahun 1975
Ulang alik	< 24 jam dan pulan pada hari yang sama	Desa/kelurahan	Hardati, di Semarang Tahun 1997, 1999, 200
Menginap	>1 hari < 6 bulan	Dusun	IB Matra di DIY tahun 1975
Menginap	>24 jam dan < 6 bulan	Desa/kelurahan	Hardati, di Semarang , tahun 1997, 1999, 2003
Permanen	> 6 bulan dan < 1 dengan tujuan menetap di daerah tujuan	Dusun	IB Matra di DIY tahun 1975
Permanen	>6 bulan dan < 1 hari dengan tujuan menetap di daerah tujuan	Desa/kelurahan	Hardati, 1997, 1999, 2003, di Semarang
Permanen	> 6 bulan dan < 1 dengan tujuan menetap di daerah tujuan	Kabupaten/kota	BPS, tahun 1990
Permanen	> 6 bulan dan < 1 dengan tujuan menetap di daerah tujuan	Kabupaten/kota	BPS, tahun 2010

Sumber: Mantra, 1975; BPS, 1990 dan 2010; Hardati, 1997.

Mobilitas penduduk dipengaruhi oleh berbagai faktor, determinan mobilitas penduduk sangat spesifik dan

kewilayahan. Hal ini merupakan salah satu konsekuensi dari adanya variasi batas wilayah dan waktu yang digunakan, sehingga ada berbagai macam bentuknya.

Mobilitas penduduk menurut model Friedman (*Friedmans development model*) dalam Bradford (1977) memiliki empat bentuk, masing-masing menggambarkan arus migrasi pada masyarakat yang berbeda, karena mengalami perkembangan pembangunan.

Bentuk pertama, bentuk horisontal, yang umumnya relative terjadi pada masyarakat yang stabil, pada masyarakat yang mengalami tipe perkembangan pra-industri, dan sangat tergantung pada satu kota atau wilayah yang menjadi pusat kegiatan, tidak berhirarki, dan atau pada kota kecil pada pusat wilayah kecil dan terbelakang. Arus migrasi tersebut digambarkan sebagai berikut.



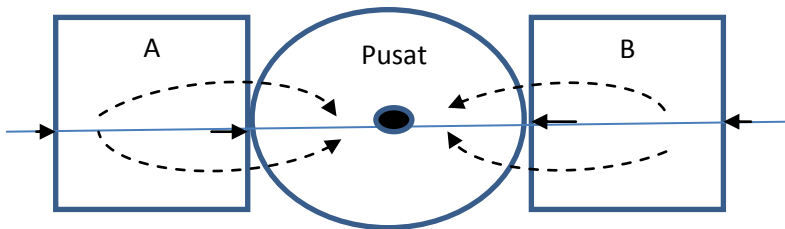
Gambar 3.2. Bentuk Arus Mobilitas Penduduk Permanen (Migrasi) Horisontal

Kedua, bentuk horisontal yang agak parabolik, menuju pada suatu kota yang mengalami perkembangan sangat pesat menjadi pusat kegiatan yang kuat atau *a single strong core*, dan arus mobilitas dari berbagai arah (parabolik). Terjadi pada masyarakat dengan tipe tertentu. Menurut Friedman

dalam Bradford and Kent (1977 menjelaskan tipe tersebut sebagai berikut.

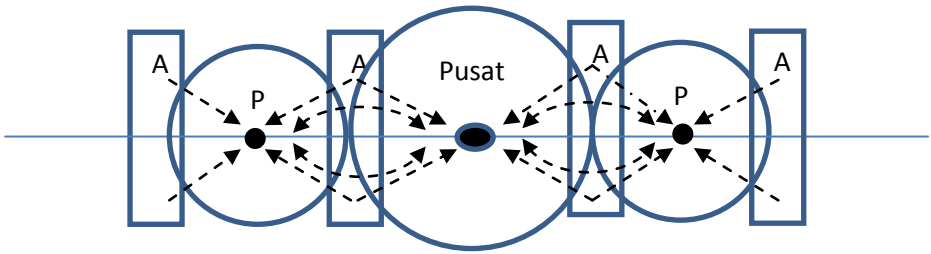
typical of period of incipient industrialization, a periphery emerges, potential entrepreneurs and labour move to the core, national economy is virtually reduced to a single metropolitan region.

Arus migrasi dengan tipe parabolic dapat diilustrasikan dengan menggunakan gambar sebagai berikut.



Gambar 3.3. Arus Mobilitas Penduduk Permanen (migrasi) Parabolik

Ketiga, bentuk diagonal, terjadi dari beberapa arah, terjadi di daerah wilayah perkotaan dengan pusat kota besar dan memiliki daerah pinggiran atau *hinterland* atau *periphery* yang berkembang dan menjadi pusat kegiatan sekunder. Arus migrasi terjadi dari daerah pusat kota besar ke pusat kota kecil atau kota *periphery* dan sebaliknya, dari pinggiran pusat kota besar ke pusat kota besar, dari pinggiran pusat kota besar ke daerah pinggiran, dan dari pinggiran kota kecil atau *periphery* ke pusat kota kecil atau *periphery*. Arus migrasi tersebut digambarkan sebagai berikut.

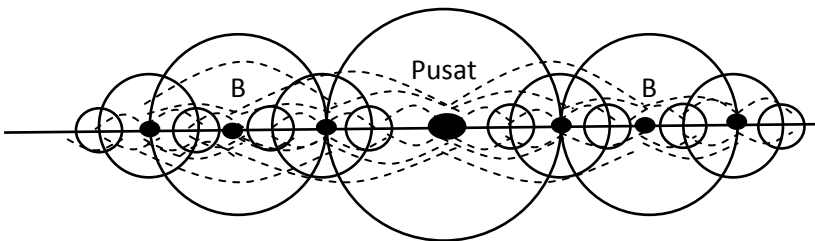


Gambar 3.4 Arus Mobilitas Penduduk Pemanen (migrasi) Diagonal

Keempat, sistem ketergantungan fungsional kota, yang memiliki fungsi berbeda, sehingga terjadi hubungan diantara keduanya.

Organized complexity characterized by national integration, efficiency in location, maximum growth potential.

Arus migrasi dengan sistem ketergantungan fungsional di kota, arus tersebut digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3.5. Arus Mobilitas Penduduk Permanen (migrasi) fungsional, Pusat Pinggiran

Ciri daerah pusat dan pinggiran bervariasi, dan saling melengkapi. Wilayahnya memiliki ciri sebagai berikut.

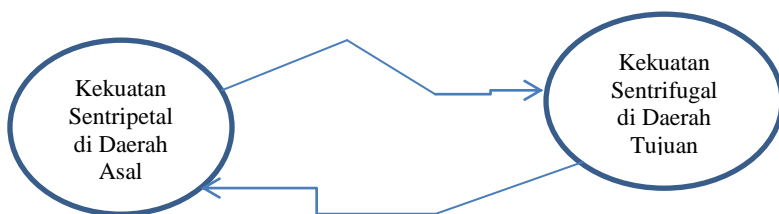
The core region is the focus of the national market, large-scale, nation-serving industries and the seedbed of new industry and innovation. The location of upward traditional areas, relative to core regions and natural endowments, suggests the possibility of greatly intensified use of resources. They are characterized by net immigration and by increasing investment and agricultural productivity. The poverty of downward transitional areas is due to their unfavourable locations relative to the rest of the nation; poor, deteriorating, resource bases; and traditional ways that do not allow for or promote change. They are typified by low productivity per man and unit of land, low life-expectancy, and a high rate of selective out-migration. Resource frontiers are areas where new resources are discovered and exploited. Along with core regions, they perform a critical role in generating impulses of economic development and transmitting them elsewhere (Bradford and Kent, 1977).

3.3. Teori Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk sudah lama dikaji oleh beberapa ahli dari berbagai bidang kajian, sehingga teori mobilitas penduduk dapat dijelaskan dari berbagai disiplin ilmu. Teori-teori mobilitas penduduk tersebut antara lain dicetuskan oleh Michel (1961), Mobogunje (1970), Norris (1972), Lee (1978), Todaro (1979), dan Titus (1982).

Ravenstein (1885) menjelaskan bahwa dalam bermigrasi ada beberapa hukum yang mendasarinya, salah satu dari hukum migrasi tersebut adalah seseorang melakukan migrasi didasari oleh motif ekonomi. Motif ekonomi mendasari seseorang melakukan migrasi.

Michel (1961) menjelaskan bahwa ada kekuatan yang menyebabkan seseorang terikat pada daerah lain dan ada kekuatan yang mendorong seseorang untuk meninggalkan daerah asal. Kekuatan seseorang untuk menetap di daerah asal disebut dengan kekuatan sentripetal, dan kekuatan seseorang untuk meninggalkan daerah asal disebut dengan kekuatan sentrifugal. Kekuatan yang berada di daerah asal dan daerah tujuan terjadi keseimbangan, dan kekuatan keduanya akan menentukan seseorang akan menetap di daerah asal atau meninggalkan daerah asal. Kekuatan yang ada di dua daerah dapat digambarkan dengan diagram berikut.

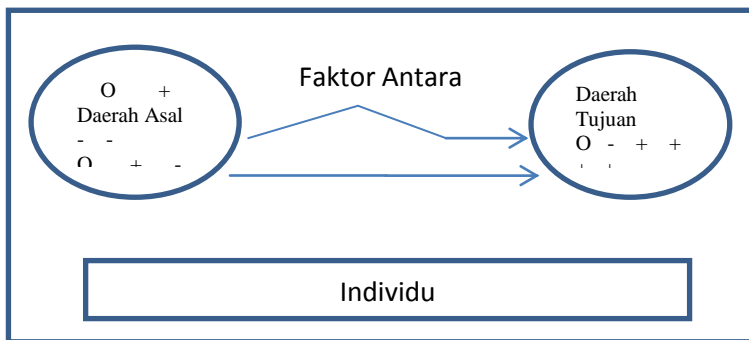


Sumber: Michel (1961)

Gambar 3.6. Teori Mobilitas Penduduk dari Mechel (1961) dengan modifikasi

Lee (1966) dalam menjelaskan teori migrasi menggunakan asumsi di tiga wilayah yang berbeda. Wilayah satu dinamakan wilayah di daerah asal, wilayah ke dua dinamakan wilayah di daerah tujuan, dan ke tiga adalah wilayah antara yang berada di antara dua wilayah asal dan

tujuan. Wilayah di daerah asal merupakan suatu wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dan menjadi faktor pendorong atau *push factor* bagi seseorang untuk melakukan migrasi. Wilayah di daerah tujuan merupakan suatu wilayah yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dan menjadi faktor penarik atau *pull factor* bagi seseorang untuk melakukan migrasi. Wilayah yang berada diantara dua wilayah di daerah asal dan di daerah tujuan, merupakan suatu wilayah yang menjadi menghambat atau *intervening abstacles* bagi proses terjadinya migrasi. Selain faktor tersebut, satu faktor yaitu pribadi seseorang yang dimiliki oleh pelaku migrasi atau disebut migran menjadi salah satu faktor yang menentukan seseorang melakukan migrasi.



Sumber: Lee (1966)

Gambar 3.7. Teori Migrasi Lee (1966)

Keterangan :

- + faktor penghambat di daerah asal dan faktor penarik di daerah tujuan
- faktor pendorong di daerah asal dan faktor penghambat di daerah tujuan
- o faktor netral di daerah asal dan daerah tujuan

Lee (1966) menjelaskan bahwa migrasi terjadi apabila ada faktor pendorong yang ada di daerah asal, faktor menarik di daerah tujuan, dan ada hambatan yang berada di antara keduanya serta ditentukan oleh keputusan seseorang pelaku migrasi. Walaupun faktor-faktor yang ada terpenuhi, baik di daerah asal dan di daerah tujuan, tetapi kalau seseorang sudah bertekad memutuskan untuk melakukan pindah, maka akan terjadi proses migrasi, dan sebaliknya apabila tidak menentukan untuk pindah, tidak akan terjadi migrasi. Menurut Lee (1966) faktor pribadi menjadi salah satu faktor penentu dalam proses migrasi.

Daerah asal dan daerah tujuan memiliki nilai positif negatif dan netral, dalam hal ini memiliki nilai berbeda. Daerah asal memiliki nilai karena merupakan daerah kelahiran, (nilai positif, disimbulkan dengan tanda +). Selain itu, daerah asal tidak tersedia lapangan pekerjaan yang sesuai, sehingga memiliki nilai negatif, disimbulkan dengan tanda -. Daerah tujuan diharapkan memiliki berbagai harapan salah satunya adalah lapangan pekerjaan yang dapat menampung dan menjadi sumber penghidupan baru, memiliki nilai

positip, disimbulkan dengan tanda +. Di daerah tujuan, ada hal yang belum dikenal, budaya berbeda, dan menjadi tantangan yang negatif, disimbulkan dengan tanda -. Di daerah asal dan di daerah tujuan sama-sama memiliki hal yang netral, disimbulkan dengan tanda o.

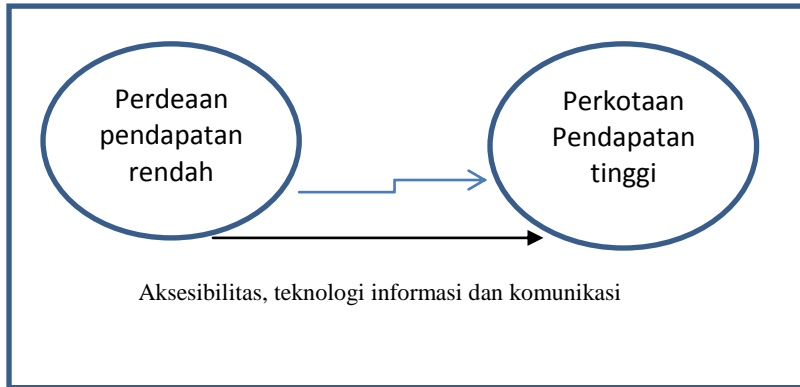
Faktor migrasi menurut (Lee, 1966) ada empat faktor, yaitu faktor yang terdapat di daerah asal, faktor yang terdapat di daerah tujuan, faktor yang berada di antara daerah asal dan daerah tujuan atau disebut dengan daerah rintangan antara, dan faktor pribadi.

Teori migrasi yang dikemukakan oleh Lee (1966) disempurnakan oleh Norris (1972). Norris (1972) menjelaskan bahwa teori migrasi Lee (1966) perlu ditambah dengan tiga komponen, yaitu migrasi kembali atau *return migration*, kesempatan antara dan migrasi paksaan atau *force migration*. Norris (1972) berpendapat bahwa daerah asal merupakan rumah pertama atau *one home* dan daerah tujuan merupakan rumah ke dua atau *second home*, sehingga migran memiliki sifat *bi local population* atau penduduk dengan dua sifat lokal. Migran selalu mengadakan hubungan dengan daerah asal. Daerah asal merupakan daerah tumpah darah dan tempat nenek moyang, tempat bermain waktu kecil, tempat teman-teman sebaya berdomisili, sehingga memiliki nilai positip, dan selalu akan dikenang.

Teori Migrasi menurut Todaro (1999) didasarkan pada pendapatan yang bervariasi di daerah perkotaan dan perdesaan. Teori migrasi ini didasarkan pada anggapan mendasar adalah bahwa para migran memperhatikan berbagai kesempatan kerja yang tersedia dan memilih salah satu yang dianggap dapat memaksimalkan manfaat yang diharapkan dari kegiatan migrasi yang dilakukan.

Terdapat empat dasar pemikiran dalam teori migrasi desa-kota, yaitu migrasi dirangsang oleh berbagai pertimbangan ekonomi yang rasional dan langsung memiliki manfaat dan keuntungan ekonomi. Keputusan bermigrasi sangat tergantung pada perbedaan pendapatan antara daerah perdesaan (asal) dan perkotaan (tujuan). Perhitungan dari kemungkinan memperoleh pekerjaan di perkotaan berhubungan terbalik dengan tingkat pengangguran di perkotaan (daerah tujuan).

Migrasi tetap berlangsung walaupun diikuti dengan tingkat pengangguran yang tinggi di daerah perkotaan (daerah tujuan). Aksesibilitas desa kota semakin tinggi didukung oleh sarana prasarana dan kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Pembangunan perdesaan mampu meningkatkan aksesibilitas wilayah perdesaan. Ilustrasi proses migrasi desa-kota dari Todaro (1999) dapat diikuti dengan diagram berikut.



Sumber: Teori Migrasi Todaro (1999) dan modifikasi

Gambar 3.8. Model Teori Migrasi Todaro dan Modifikasi

Teori migrasi (Ravestein, 1885. lebih menitik beratkan pada perilaku mobilitas penduduk yang dikenal dengan hukum-hukum migrasi. Beberapa hukum migrasi dari Ravestein (1885) adalah bahwa para migran cenderung memilih tempat tinggal terdekat dengan daerah tujuan. Faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap perilaku migran adalah sulitnya memperoleh pendapatan di daerah asal dan pendapatan lebih baik di daerah tujuan. Informasi dominan diperoleh dari saudara teman yang telah melakukan migrasi lebih awal. Seseorang yang memiliki pengaruh lebih tinggi dalam perilaku kekotaan semakin besar tingkat mobilitasnya. Seseorang yang berpendapatan lebih tinggi akan berperilaku semakin tinggi frekuensi mobilitasnya. Daerah tujuan migrasi adalah daerah yang telah ada saudara atau teman yang melakukan migrasi sebelumnya. Pola migrasi sulit

diperkirakan. Penduduk dengan umur lebih muda dan belum menikah memiliki frekuensi mobilitas lebih tinggi dibandingkan dengan yang lebih tua dan menikah. Penduduk yang memiliki pendidikan lebih tinggi memiliki frekuensi mobilitas lebih tinggi.

Perilaku mobilitas (Ravestein, 1885) disebut dengan hukum-hukum migrasi, secara singkat dijelaskan sebagai berikut. Para migran cenderung memilih tempat terdekat sebagai daerah tujuan. Faktor paling dominan yang mempengaruhi seseorang untuk bermigrasi adalah sulitnya memperoleh pekerjaan di daerah asal dan kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik di daerah tujuan. Daerah tujuan harus mempunyai nilai kefaedahan wilayah (*place utility*) lebih tinggi dibandingkan dengan daerah asal. Berita-berita dari sanak saudara atau teman yang telah melakukan migrasi lebih awal, merupakan informasi yang sangat penting bagi orang yang ingin melakukan migrasi. Informasi negatif tentang daerah tujuan akan mengurangi niat migran melakukan migrasi. Tingkat mobilitas seseorang terkait dengan sifat kekotaan seseorang. Migran memilih daerah tujuan yang sama dengan teman dan saudara terdekat. Pola migrasi sulit diperkirakan. Status kawin menyebabkan perbedaan bermigrasi, sedangkan status pendidikan berkorelasi yang signifikan terhadap arus mobilitas.

3.4. Pendekatan Mobilitas Penduduk

Analisis migrasi penduduk dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, hal ini didasarkan pada disiplin ilmu dan bidang kajian para pakar atau pemerhati terhadap migrasi penduduk. Teori-teori migrasi penduduk yang telah ada selama ini dikaji oleh ahli geografi, kependudukan, sosiologi, ekonomi, psikologi, dan lainnya, sehingga analisis atau pendekatan migrasi yang diberikan menitik beratkan pada disiplin bidang ilmu masing-masing.

Kajian migrasi yang sangat beragam secara umum dapat dikelompokkan berdasarkan pendekatannya, yaitu pendekatan secara geografis, pendekatan sistem, pendekatan sosial, pendekatan ekonomi, dan pendekatan psikologi. Masing-masing pendekatan tersebut semua menganalisis mobilitas penduduk secara keruangan atau geografis, tetapi tekanannya berbeda-beda.

Pendekatan sosial, mendasarkan pada interaksi sosial yang dilakukan oleh penduduk migran dan penduduk di daerah tujuan. Kedua, penduduk di dua daerah tersebut, daerah asal dan daerah tujuan, berinteraksi melalui hubungan yang dilakukan setiap hari. Hubungan tersebut dapat dilakukan secara individu atau perorangan, hubungan antar kelompok, hubungan individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial memungkinkan terjadinya berbagai aktivitas sosial (Susanto, 2000).

Proses interaksi sosial dapat bergerak dari satu arah atau dua arah, yaitu proses asosiatif dan disosiatif. Proses asosiatif merupakan suatu proses yang diwarnai dengan adanya persamaan-persamaan dari kedua belah pihak, antara migran atau pendatang dengan penduduk asli. Kesamaan tersebut dalam berbagai hal, seperti motif ekonomi, persamaan kebutuhan, persamaan kegemaran, atau persamaan daerah asal. Sehingga ada kecenderungan bergerak bersama pada suatu perwujudan kerja sama, selanjutnya terjadi integrasi dan asimilasi.

Proses disosiatif adalah interaksi yang diwarnai oleh perbedaan-perbedaan kepentingan, perbedaan aspirasi dan cenderung menimbulkan kompetisi dan ketidakbersamaan. Fenomena disosiatif dapat terjadi karena di suatu ruang, daerah, asal atau tujuan, terdapat persamaan kebutuhan, kegemaran, kepentingan yang terjadi dari berbagai variasi wilayah.

Pendekatan ekonomi, merupakan kajian yang mendasarkan pada aspek ekonomi yang menjadi alasan utama seseorang melakukan migrasi (Ravenstaein, 1885; Bintarto, 1960; Titus, 1982; Todaro, 1979; Mantra, 1992).

Seseorang melakukan migrasi karena faktor ekonomi, Ravenstaein 1885, Bintarto (1960) mengemukakan bahwa rendahnya penghasilan per-kapita, kurangnya kepemilikan tanah, dan pengangguran merupakan alasan seseorang

melakukan migrasi. Mantra (1992) menjelaskan bahwa seseorang melakukan mobilitas dengan harapan akan memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik di daerah tujuan. Motif ekonomi berkembang disebabkan oleh adanya ketimpangan ekonomi antar daerah (Mantra, 2003). Todaro (1979) memperhatikan daerah perkotaan dan pedesaan, diantara kedua daerah terjadi migrasi penduduk karena adanya perbedaan upah riil, kemungkinan akan memperoleh pekerjaan di sektor modern.

Pendekatan psikologis, merupakan kajian yang mendasarkan pada aspek internal individu dalam pengambilan keputusan seseorang melakukan migrasi (Mincer, 1978; De Jong, 1981; Borjas, 1990) Aspek psikologi merupakan aspek terpenting yang digunakan oleh seseorang untuk memutuskan melakukan migrasi atau tidak. Mincer (1978) melihat keterkaitan antara suami dan istri dalam memutuskan bermigrasi, sedangkan Borjas (1990) memperhatikan kesejahteraan anak dalam menjelaskan keputusan untuk bermigrasi.

Keterkaitan antara dua wilayah atau lebih semakin tinggi, tingkat keterhubungannya juga semakin meningkat, baik frekuensi dan volumenya. Mobilitas penduduk antar wilayah baik pada lingkup nasional dan internasional semakin meningkat. Movitasi penduduk untuk menuju daerah lain semakin meningkat, dan semakin luas.

BAB IV

POLA MOBILITAS PENDUDUK

4.1. Model Analisis Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk dianalisis dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif menggunakan statistik deskriptif, dengan berbagai rumus. Jenis rumus yang digunakan tergantung pada jenis mobilitas penduduknya (mobilitas vertikal, mobilitas horisontal).

Hasil analisis mobilitas penduduk di suatu daerah tidak dapat secara langsung dibandingkan dengan analisis mobilitas penduduk di daerah lain. Hal tersebut dikarenakan lingkup kajian, batasan waktu yang digunakan dalam setiap analisis bervariasi dan tidak ada keharusan sama, tergantung dari peneliti.

Ukuran mobilitas penduduk yang sangat umum adalah tingkat mobilitas penduduk, tingkat mobilitas penduduk non permanen, tingkat mobilitas penduduk nglaju, tingkat mobilitas penduduk sirkulasi, tingkat mobilitas penduduk permanen atau tingkat migrasi, tingkat migrasi masuk, tingkat migrasi keluar, tingkat migrasi masuk, tingkat migrasi bruto, tingkat migrasi neto.

Analisis migrasi dapat dilakukan dengan cara yang lain, seperti yang dilakukan oleh beberapa pakar. Migrasi

dapat dinalisis dengan tingkat migrasi neto, sebagai berikut (Weeks, 1944).

...the crude net migration rate is the net number of migration in a year per 1.000 people in a population. We call it net because it is the difference between those who move in and those who move out. If those numbers are the same, than the rate of migration is zero, even though in reality there may have been a lot of migration activity. The crude migration rate (CNMR) thus is calculated as follow:

$$CNMR = \frac{\text{total in-migrans} - \text{total out-migrans}}{\text{total medyear population}} \times 1000$$

Analisis migrasi, selain dengan menggunakan migrasi neto, dapat digunakan dengan beberapa cara, tergantung dari ketersediaan data dan tujuan analisis. Seperti misalnya ada pada sensus penduduk, menggunakan analisis migrasi risen, migrasi seumur hidup, dan migrasi total. Migrasi seumur hidup dibedakan antara masuk, keluar dan neto, sehingga ada tingkat migrasi seumur hidup masuk, keluar dan neto. Tingkat migrasi risen masuk, keluar, dan neto. Tingkat migrasi total masuk, keluar dan neto. Beberapa cara analisis migrasi tersebut menggunakan rumus-rumus seperti berikut.

1. Tingkat migrasi seumur hidup masuk dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$TMSH-M = JMSH-M : JPMSH \times K$$

Keterangan:

TMSH-M = tingkat migrasi seumur hidup masuk

JMSH-M = jumlah migran seumur hidup masuk

JPMSH = jumlah penduduk yang melakukan migrasi seumur hidup

K = konstanta (100)

2. Tingkat migrasi seumur hidup keluar dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$TMSH-K = JMSH-K : JPMSK \times K$$

Keterangan:

TMSH-K = tingkat migrasi seumur hidup keluar

JMSH-K = jumlah migran seumur hidup keluar

JPMSH = jumlah penduduk yang melakukan migrasi seumur hidup

K = konstanta (100)

3. Tingkat migrasi seumur hidup neto dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$TMSH-N = JMSH-N : JPMSH \times K$$

Keterangan:

TMSH-N = tingkat migrasi seumur hidup Neto

JMSH-N = jumlah migran seumur hidup Neto

JPMSH = jumlah penduduk yang melakukan migrasi seumur hidup

K = konstanta (100)

Migran seumur hidup, risen, dan total pada survai penduduk antara sensus (SUPAS, 2015), dianalisis dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

Migran semasa hidup atau *life time migration* (MSH)
= bukan P/K 1

Keterangan:

MSH : Migran Semasa Hidup

P/K 1 : adalah provinsi atau kabupaten/kota
bukan tempat lahirnya pada saat dicacah.

Migran risen atau *ricent migrant* (MR) = P/K 1 bukan

P/K2

Keterangan:

MR = migran risen

P/K 1 = provinsi atau kabupaten/kota tempat tinggal
sekarang

P/K 2= provinsi atau kabupaten/kota tempat tinggal
lima tahun lalu

Migran total atau *total migrant* (MT) = P/K 1 bukan

P/K2

Keterangan:

Migran Total (MT) = P/K 1

MR : Migral risen

P/K1 : provinsi atau kabupaten/kota tempat tinggal
terakhir

P/K 2: provinsi atau kabupaten/kota tempat dicacah

Bukan migran dianalisis dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$BM = P/K 1 = P/K 2 = P/K 3,$$

Keterangan:

BM = Bukan Migran

P/K 1: adalah provinsi atau kabupaten/kota tempat lahir,

P/K 2: adalah provinsi atau kabupaten/kota tempat tinggal sekarang,

P/K 3: adalah provinsi atau kabupaten/kota tempat tinggal sebelumnya.

Analisis migrasi sangat bervariasi, di setiap Negara, tidak atau belum ada aturan atau keharusan batas dan waktu yang digunakan. Setiap wilayah Negara memiliki kekhususan, keunikan karakteristik sendiri sendiri, sehingga sangat bervariasi.

4. Angka mobiltas penduduk, adalah ratio antara banyaknya penduduk yang pindah secara lokal dalam suatu jangka waktu tertentu dengan banyaknya penduduk. Angka mobilitas (MP) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rumus} \rightarrow MP = \frac{M}{P_m} \times k$$

Keterangan :

M = jumlah penduduk yang melaksanakan mobilitas (mover)

P_m = jumlah penduduk pertengahan tahun

6. Angka migrasi masuk, yaitu angka yang menunjukkan banyaknya migrasi yang masuk setiap seribu penduduk daerah tujuan dalam waktu satu tahun. Angka migrasi masuk (M_i) dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rumus} \rightarrow M_i = \frac{I}{P_{mt}} \times k$$

Keterangan:

I = jumlah migrasi masuk

P = Jumlah penduduk daerah tujuan pada pertengahan tahun

7. Angka migrasi keluar, yaitu banyaknya migran yang keluar setiap seribu penduduk daerah asal dalam waktu satu tahun. Angka migrasi keluar (M_o) dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rumus} \rightarrow M_o = \frac{O}{P_{ma}} \times k$$

Keterangan:

M_o = angka migrasi keluar

O = Jumlah migran keluar

P_{ma} = jumlah penduduk pertengahan tahun di daerah asal

8. Angka migrasi neto, yaitu banyaknya migran masuk dan keluar dari suatu daerah setiap seribu penduduk dalam satu tahun. Angka migrasi neto (M_n) dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rumus} \rightarrow M_n = \frac{I - O}{P_m} \times k$$

Keterangan:

I = jumlah migran masuk

O = jumlah migran keluar

P = jumlah penduduk pertengahan tahun

k = konstante, biasanya 1000

9. Angka migrasi bruto, yaitu banyaknya kejadian perpindahan yaitu jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar dengan jumlah penduduk pertengahan tahun daerah asal dan daerah tujuan. Angka migrasi bruto (M_g) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rumus} \rightarrow M_g = \frac{I + O}{P_1 + P_2} \times k$$

Keterangan:

P1 = jumlah penduduk daerah asal

P2 = jumlah penduduk daerah tujuan

k = konstante, biasanya 1000

10. Angka emigrasi adalah angka yang menunjukkan banyaknya emigran yang meninggalkan negara asal pada suatu tahun tertentu per 1.000 penduduk negara asal.

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Banyaknya emigran}}{\text{Banyaknya penduduk daerah asal}} \times 1.000$$

11. Angka migrasi adalah angka yang menunjukkan banyaknya imigran yang tiba di suatu negara tujuan per 1.000 penduduk, pada suatu tahun tertentu.

$$\text{Rumus: } \frac{\text{Banyaknya imigran}}{\text{Banyaknya penduduk di negara tujuan}} \times 1.000$$

12. Urbanisasi

Indeks urbanisasi merupakan angka yang menunjukkan besarnya proses urbanisasi di suatu kota. Urbanisasi dapat dianalisis dengan berbagai cara, salah satu cara untuk menganalisis suatu wilayah terjadi urbanisasi dapat menggunakan jumlah penduduk, dengan rumus sebagai berikut.

$$IU = \frac{K}{P} \times 100$$

Keterangan :

IU = Indek Urbanisasi

K = jumlah penduduk kota

P = jumlah penduduk total

Urbanisasi juga dapat dianalisis dengan menggunakan perbandingan antara jumlah penduduk yang bertempat tinggal di kota dan desa. Dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$IU = \frac{K}{D} \times k$$

IU = indeks urbanisasi

K = jumlah penduduk kota

D = jumlah penduduk desa

k = konstanta,

4.2. Pola Mobilitas Penduduk Global

Mobilitas penduduk global merupakan gerakan penduduk antar negara di benua yang ada di dunia. Negara-negara di dunia, yang tersebar di 5 benua, yaitu Benua Afrika, Amerika, Asia, Eropa dan Oceania. Setiap benua terdiri dari Negara-negara yang jumlah berbeda-beda. Benua Afrika memiliki jumlah Negara paling banyak, yaitu mencapai 26 persen, benua dengan penduduk paling banyak urutan kedua adalah afrika, dan yang paling sedikit jumlah

negaranya adalah benua oceania, hanya 8 persen dari jumlah Negara yang ada di dnuia.

Jumlah penduduknya sangat timpang, di Benua oceania, jumlah Negara paling sedikit dengan jumlah penduduk juga paling sedikit, hanya 0,5 persen dari jumlah penduduk dunia. Benua Asia yang jumlah penduduk paling banyak, yaitu mencapai 41,1 persen, dengan jumlah Negara hanya 25 persennya. Negara-negara di Benua Asia rata-rata memiliki jumlah penduduk lebih banyak dibandingkan dengan Negara-negara di empat benua lainnya. Benua Afrika yang jumlah negaranya hampir sama dengan jumlah Negara di benua Asia, jumlah penduduknya hanya 15,9 persen. Fakta geografis tersebut menjadi salah satu dari berbagai variabel yang mendorong terjadinya mobilitas penduduk. Keberagaman wilayah sangat tergantung dari kondisi alam fisik dan manusianya.

Tabel 4.1. Persebaran Penduduk berdasarkan Benua

Benua	Negara (pesen)	Penduduk (persen)
Afrika	26	15,9
Amerika	19	13,4
Asia	25	41.1
Eropa	22	10,1
Oceania	8	0,5
Jumlah	100	100

Sumber: Pupulation Reference Bureau, 2015.

Mobilitas penduduk, terdiri dari mobiltas penduduk permanen atau migrasi dan mobilitas penduduk non-permanen, yaitu komuter dan musiman, seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Mobilitas penduudk permanen atau Migrasi adalah perpindahan penduduk secara permanen yang melintasi batas wilayah administrasi. Batas admnistrasi tersebut dapat berupa batas Negara disebut migrasi internasional dan batas wilayah administrasi yang lebih kecil di dalam lingkup Negara yang disebut dengan migrasi internal atau nasional.

Migrasi internasional adalah perpindahan penduduk antara wilayah Negara. Migrasi internasional adalah penduduk yang pindah ke suau wilayah Negara dengan tujuan menetap di Negara tujuan. Migrasi internasional, di kajian dengan menggunakan angka migrasi neto, hal ini disebabkan keterbatasan data yang ada. Angka migrasi neto di dunia dapat dibagi menjadi tiga wilayah pembangunan, yaitu negara maju atau *more developed*, migrasi neto lebih tinggi dari negara berkembang atau *less developed*, dan negara belum berkembang atau *least developed*.

Indonesia masuk Negara berkembang, hubungan atau interaksi penduduk antar Negara semakin meningkat, dengan tujuan yang semakin bervariasi, mulai dari tujuan ekonomi, sosial, dan politik. Pariwisata menjadi salah satu sektor pendorong terjadinya interaksi penduduk antar Negara.

Tabel 4.2. Mobilitas Permanen Neto atau Migrasi Neto di Dunia Berdasarkan Benua

Benua	Angka Migrasi Neto (000)
Afrika	-0
Afrika Utara	-1
Afrika Barat	-1
Afrika Timur	-0
Afrika Tengah	-0
Afrika Selatan	3
Amerika	1
Amerika Utara	3
Amerika Tengah	-2
Caribbean	-4
Amerika Selatan	-0
Asia	-0
Asia Timur	3
Asia Tengah	-1
Asia Selatan	-1
Asia Tenggara	-0
Asia Timur	0
Eropa	2
Eropa Utara	4
Eropa Barat	4
Eropa Timur	1
Eropa Selatan	-0
Oceania	6
Less developed	-1
Less Developed	-0
More Developed	2

Sumber: Population Reference Bureau, 2015.

Jumlah penduduk Indonesia yang melakukan migrasi internasional masih relative sedikit, dengan angka migrasi sangat kecil. Data yang pasti belum dapat diketahui, diprediksi, ke depan, angka migrasi internasional volume dan

arahnya akan semakin bervariasi, volumenya meningkat dan arahnya semakin luas, sehingga perlu diantisipasi.

4.3. Pola Mobilitas Penduduk Nasional

Pola mobilitas penduduk internal merupakan pergerakan penduduk dari wilayah satu ke wilayah lain dalam lingkup suatu Negara dengan tujuan untuk menetap di daerah tujuan. Mobilitas penduduk internal disebut dengan mobilitas penduduk nasional.

Mobilitas Penduduk nasional atau mobilita penduduk internal dengan tujuan menetap di daerah tujuan disebut dengan migrasi nasional atau migrasi internal, lingkup wilayah secara nasional.

Di Indonesia, informasi tentang mobilitas penduduk sangat terbatas. Hal ini dikarenakan peristiwa mobilitas penduduk tidak semua dilaporkan oleh para pelaku mobilitas. Oleh karena itu, proses migrasi sulit diamati. Walaupun demikian, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS), mengumpulkan data mobilitas permanen dengan sangat terbatas.

Gambaran mobilitas penduduk di Indonesia dapat diamati dari hasil sensus penduduk. Data sensus penduduk tidak banyak informasi mengenai mobilitas penduduk. Batas waktu yang digunakan pada sensus penduduk adalah berbeda pada setiap pelaksanaan sensus penduduk, tetapi batas waktu selalu sama yaitu 6 bulan.

Sensus 1961, tidak ada informasi migrasi, sedangkan pada sensus penduduk 1971, 1980, 1990, 2000 dan 2010 ada informasi tentang migrasi, batas wilayah berbeda. Pada sensus penduduk 1971, 1980, 1990, batas wilayah provinsi, sehingga seseorang dikatakan bermigrasi apabila melintasi batas wilayah provinsi. Sensus 2000 dan 2010, menggunakan konsep batas wilayah kabupaten, sehingga seseorang dikatakan migran apabila pada waktu sensus melintasi batas wilayah kabupaten.

Pola mobilitas penduduk lokal, dapat diamati melalui pengamatan langsung secara terbatas yang dilakukan dengan penelitian. Keterbatasan dapat bersifat keluasaan wilayah dan kedalaman kajian. Hal tersebut disebabkan oleh jenis penelitian yang sifatnya sangat spesifik dan terbatas. Selain itu juga sangat tergantung dari biaya tenaga dan waktu dilaksanakan penelitian, yang pada umumnya sangat terbatas dari berbagai aspek tersebut. Beberapa pertanyaan mobilitas dapat dikaji dari beberapa hasil sensus penduduk yang pernah dilaksanakan di Indonesia, sebagai berikut.

Mobilitas penduduk di Indonesia, tidak secara langsung dapat dibandingkan antara satu periode waktu ke periode waktu berikutnya, seperti yang terjadi pada hasil sensus penduduk 1961 dan 1971, 1980, 1990, 2000 dan 2010, hal ini disebabkan karena konsep batas wilayah yang ditentukan tidak sama, sehingga harus berhati-hati dalam menganalisis.

Tabel 4.3. Pertanyaan Migrasi Penduduk pada Sensus Penduduk di Indonesia 1971, 1980, 1990, 2000 dan 2010

Sensus Penduduk			
1971	1980 dan 1990	2000	2010
1. Provinsi tempat lahir 2. pernah tinggal di provinsi lain 3. provinsi tempat tinggal terakhir sebelum provinsi ini 4. lama tinggal di provinsi tempat tinggal sekarang	1. provinsi tempat lahir 2. lamanya tinggal di provinsi ini 3. tempat tinggal terakhir sebelum tinggal di provinsi ini 4. tempat tinggal 5 tahun lalu	1. kabupaten/kotamadya tempat lahir 2. kabupaten/kotamadya tempat tinggal 5 tahun lalu	1. kabupaten/kota tempat lahir 2. kabupaten/kota tempat tinggal 5 tahun lalu

Sumber: BPS, 1971, 1980, 1990, 2000 dan 2010.

Berdasarkan pertanyaan mobilitas penduduk, dapat dibedakan menjadi migran dan bukan migran. Berdasarkan sensus pada tahun 1971, 1980 dan 1990, batas wilayah adalah provinsi, sehingga seseorang dikatakan migran apabila melintas batas wilayah provinsi. Sedangkan pada sensus tahun 2000 dan 2000 batas wilayah kabupaten/kota, sehingga seseorang dikatakan migran apabila melintas batas wilayah kabupaten/kota. Selain itu, tidak hanya batas wilayah saja,

tetapi juga memperhatikan lama tinggal, tempat tinggal terakhir sebelumnya, tempat tinggal lima tahun yang lalu.

Berdasarkan hal tersebut, maka seseorang dikatakan migran (sensus tahun 1971, 1980, 1990), apabila seseorang yang dicacah di suatu provinsi yang bukan provinsi tempat kelahirannya (disebut dengan migran semasa hidup). Disebut migran total apabila seseorang yang provinsi tempat tinggal terakhir berbeda dengan provinsi tempat tinggal ia dicacah. Migran risen atau recent migrant apabila seseorang provinsi tempat tinggal sekarang berbeda dengan provinsi tempat tinggal lima tahun yang lalu.

Seseorang dikatakan migran (sensus tahun 2000 dan 2010), apabila seseorang yang dicacah di suatu kabupaten/kota yang bukan kabupaten/kota tempat kelahirannya (disebut dengan migran semasa hidup). Migran total apabila seseorang yang kabupaten/kota tempat tinggal terakhir berbeda dengan kabupaten/kota tempat tinggal ia dicacah. Migran risen atau *recent migrant* adalah seseorang pada waktu dilaksanakan sensus kabupaten/kota tempat tinggal sekarang berbeda dengan kabupaten/kota tempat tinggal lima tahun yang lalu.

Bukan migran apabila seseorang dimana provinsi (sensus 1971, 1980, 1990) kabupaten/kota (sensus 2000, 2010) tempat lahir sama dengan provinsi (sensus 1971, 1980, 1990) kabupaten/kota (sensus 2000, 2010) tempat tinggal sekarang,

dan sama dengan provinsi (sensus 1971, 1980, 1990) kabupaten/kota (sensus 2000, 2010) tempat tinggal sebelumnya.

Migrasi seumur hidup adalah seseorang yang pada saat disensus apabila kabupaten/kota tempat lahir berbeda dengan kabupaten/kota tempat tinggal sekarang (waktu sensus). Migran total adalah kabupaten/kota tempat tinggal terakhir sebelum sekarang berbeda dari kabupaten/kota tempat tinggal sekarang (waktu sensus). Migran risen seseorang apabila pada saat sensus tempat tinggal lima tahun yang lalu berbeda dengan kabupaten/kota tempat tinggal sekarang (waktu disensus) (BPS, 2016).

Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015, digunakan empat pertanyaan, yaitu provinsi dan kabupaten/kota tempat tinggal sekarang; provinsi dan kabupaten/kota tempat lahir; provinsi dan kabupaten/kota tempat tinggal terakhir sebelum tempat tinggal sekarang; dan provinsi dan kabupaten/kota tempat tinggal lima tahun yang lalu (BPS, 2016).

Beberapa konsep penting pada saat dilaksanakan sensus adalah tempat lahir, tempat tinggal terakhir sebelum tempat tinggal sekarang, dan tempat tinggal lima tahun yang lalu. Tempat lahir adalah provinsi, kabupaten/kota atau Negara tempat tinggal ibu pada saat melahirkan bayinya. Tempat tinggal terakhir sebelum tempat tinggal sekarang adalah

provinsi, kabupaten/kota atau Negara sebelum tempat tinggal sekarang. Tempat tinggal lima tahun yang lalu adalah provinsi, kabupaten/kota atau Negara tempat tinggal lima tahun yang lalu.

Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan bersama dari satu dapur. Kepala rumah tangga adalah salah seorang dari anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala rumah tangga, minimal berumur 10 tahun, atau yang dituakan. Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang sedang berada di rumah pada saat pemutakhiran maupun yang sementara tidak berada di rumah (BPS, 2016).

Beberapa yang termasuk dalam anggota rumah tangga adalah bayi yang baru lahir, tamu yang sudah tinggal 6 bulan, meskipun belum berminat untuk bertempat tinggal, orang yang tinggal kurang dari 6 bulan, tetapi berminat untuk menetap, pembantu rumah tangga, tukang kebun atau sopir yang tinggal dan makan bergabung dengan rumah tangga majikan, orang yang mondok dengan makan jumlahnya kurang dari 10 orang, kepala rumah tangga yang bekerja di

tempat lain tidak pulang setiap hari, tetapi pulang secara periodik (kurang dari 6 bulan).

Berdasarkan rumus tentang migrasi, maka dapat dikaji angka migrasi di tingkat nasional atau Indonesia dan migrasi pada tingkat lokal atau provinsi. Gambaran migrasi pada tingkat nasional dapat dikaji dari hasil sensus dan supas.

Migrasi internal atau Nasional, Propinsi Kepulauan Riau memiliki angka migran paling tinggi, baik migrant seumur hidup neto, migrant risen neto, dan migrant total neto. Artinya, penduduk yang tidak dilahirkan di wilayah tersebut paling banyak. Selain itu, penduduk migrant yang bertempat tinggal lebih dari lima tahun paling banyak, dan penduduk yang dari luar propinsi paling banyak. Setiap 1000 penduduk di Provinsi Kepulauan Riau terdapat 397 migran seumur hidup, 70 migran risen, dan 331 migran total, sedangkan di semua provinsi lain di Indonesia, angkanya dibawahnya.

Provinsi Kepulauan Riau, merupakan salah satu wilayah yang lokasinya berbatasan langsung paling dekat dengan wilayah Negara lain, yaitu Singapore. Aksesibilitas ke Singapore lebih tinggi dan lebih murah. Selain itu, wilayahnya memiliki berbagai industri yang memerlukan tenaga kerja yang tidak dapat dicukupi dari wilayahnya, sehingga harus ada tenaga kerja yang datang atau bekerja dari luar wilayah. Provinsi Riau memiliki berbagai industri jasa yang tenaga kerjanya harus didatangkan dari luar wilayah.

Tabel 4.4. Angka Migrasi Seumur Hidup, Risen, dan Total di Indonesia Tahun 2015

Provinsi	Angka Migrasi Risen								
	Seumur Hidup			Risen			Total		
	Masuk	Keluar	Neto	Masuk	Keluar	Neto	Masuk	Keluar	Total
Aceh	42	52	-10	8	8	0	47	52	-5
Sumatera Utara	37	159	-121	10	19	-9	46	136	-89
Sumatera Barat	68	221	-152	27	27	0	113	188	-74
Riau	297	50	247	34	21	13	277	80	197
Jambi	209	58	151	19	20	-1	203	82	121
Sumatera Selatan	120	92	28	9	14	-3	121	93	28
Bengkulu	180	59	121	20	15	5	183	72	112
Lampung	168	91	77	10	15	-5	156	95	61
Kep. Bangka Belitung	141	77	63	23	15	8	141	74	67
Kep. Riau	448	51	397	96	34	62	443	113	331
DKI Jakarta	359	266	93	49	69	-20	341	455	-113
Jawa Barat	106	50	56	16	11	5	109	57	52
Jawa Tengah	30	194	-164	15	19	-4	63	162	-98
DI Yogyakarta	156	248	-93	56	23	33	189	231	-42
Jawa Timur	24	98	-75	8	11	0-3	35	88	-52
Banten	209	49	160	27	17	10	202	73	129
Bali	103	64	39	33	12	11	106	76	30
Nusa Tenggara Barat	25	43	-18	21	10	11	64	42	22
Nusa Tenggara Timur	35	50	-15	12	13	-1	56	46	10
Kalimantan Barat	61	39	23	8	7	1	64	42	22
Kalimantan Tengah	212	42	169	31	21	10	208	78	131
Kalimantan Selatan	128	76	52	22	14	8	128	89	39
Kalimantan Timur	327	42	285	35	29	6	308	90	218
Kalimantan Utara	296	68	229	54	29	25	292	145	178
Sulawesi Utara	78	81	-3	14	15	1	85	87	-1
Sulawesi Tengah	162	42	120	22	13	9	251	51	200
Sulawesi Selatan	41	166	-126	16	20	-4	178	158	21
Sulawesi Tenggara	178	77	101	23	18	5	307	81	227
Gorontalo	57	92	-35	13	15	-8	141	95	47
Sulawesi Barat	137	85	52	27	21	6	236	92	144
Maluku	80	128	-48	15	22	7	87	127	-40
Maluku Utara	92	53	39	17	13	4	104	59	45
Papua Barat	313	60	254	68	23	45	304	96	208
Papua	156	28	128	19	15	4	148	52	96

Sumber: BPS, SUPAS 2015.

4.4. Pola Mobilitas Penduduk Lokal

Mobilitas lokal yang dimaksud adalah pergerakan atau perpindahan penduduk dari dan ke kabupaten/kota lain di wilayah provinsi di Indonesia. Berarti gerakan penduduk antar wilayah kabupaten.

Provinsi Jawa Tengah memiliki wilayah 35 kabupaten/kota, terdiri dari 6 kota, yaitu Kota Semarang, Surakarta, Magelang, Salatiga, Pekalongan, dan Tegal, dan 29 kabupaten. Di Jawa Tengah, memiliki jumlah penduduk 33,73 juta jiwa, tersebar tidak merata. Jumlah penduduk tersebut, tidak semua lahir di propinsi Jawa Tengah dan tidak semua sudah menetap lima tahun sebelum dilaksanakan SUPAS. Jumlah migran dan bukan migran dapat dikaji melalui tiga jenis, yaitu berdasarkan migran seumur hidup, migran risen, dan migran total. Berdasarkan tempat kelahirannya, Jumlah migran seumur hidup ada 9,43 persen, sedangkan migran risen ada 2,77 persen, dan jumlah migran total 13,40 persen.

Pola mobilitas penduduk permanen atau migrasi yang terjadi di Jawa Tengah, arus migrasi seumur hidup paling tinggi di Kabupaten Brebes, yaitu 5,21 persen, demikian juga arus migrasi risen dan migrasi total, yaitu 4,7 persen, dan 5,03 persen. Hal ini disebabkan karena wilayah tersebut memiliki jumlah penduduk paling banyak di antara kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 4.5. Pola Mobilitas Penduduk di Tingkat Lokal
Jawa Tengah

Kabupaten /Kota	Angka Migrasi								
	Seumur Hidup			Risen			Total		
	Masuk	Keluar	Neto	Masuk	Keluar	Neto	Masuk	Keluar	Neto
Cilacap	76	306	-221	22	27	-15	121	259	-138
Banyumas	90	257	-166	36	25	10	146	222	-76
Purbalingga	72	218	-145	39	25	14	173	188	-14
Banjarnegara	47	194	-146	26	27	-2	78	172	-93
Kebumen	73	491	-418	48	50	-1	187	403	-215
Purworejo	126	565	-438	41	45	-3	237	449	-212
Wonosobo	61	211	-150	37	28	9	140	190	-49
Magelang	83	217	-134	25	27	-2	121	202	-81
Boyolali	104	340	-235	35	38	-4	150	303	-152
Klaten	113	380	-267	30	38	-8	168	326	-158
Sukoharjo	241	241	0	59	37	32	284	234	50
Wonogiri	49	483	-433	13	27	-13	77	384	-306
Karanganyar	146	173	-27	38	24	14	179	167	11
Sragen	109	373	-264	39	41	-1	167	327	-159
Grobogan	60	181	-121	14	17	-11	69	168	-99
Blora	70	224	-153	26	16	8	134	198	-63
Rembang	59	127	-68	19	16	3	75	126	-51
Pati	41	194	-153	8	20	-12	53	176	-123
Kudus	102	127	-25	19	17	3	135	111	24
Jepara	56	94	-38	14	13	2	77	93	-16
Demak	60	168	-108	11	32	-21	75	164	-89
Semarang	148	337	-189	47	46	2	207	340	-133
Temanggung	78	162	-84	26	23	4	121	156	-34
Kendal	66	158	-92	21	22	-0,8	91	148	-57
Batang	63	84	-21	15	15	-0,2	82	76	5
Pekalongan	45	226	-181	15	35	-20	75	204	-128
Pemalang	32	208	-176	10	26	-15	44	177	-132
Tegal	58	242	-184	20	39	-19	86	214	-128
Brebes	40	209	-169	18	33	-14	66	182	-115
Magelang	69	229	-160	15	25	9	86	200	-112
Surakarta	686	2719	-1851	153	354	-201	942	2686	-1744
Salatiga	38	60	-21	11	10	1	43	62	-19
Semarang	1625	1021	603	287	194	93	1725	1136	589
Pekalongan	128	252	-123	14	41	-27	141	240	98
Tegal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jawa Tengah				28	32	-4	126	236	-100

Sumber: BPS SUPAS 2016.

Dua kabupaten/kota yang menduduki ranking tertinggi kedua dan ketiga dalam hal jumlah penduduk adalah Kabupaten Cilacap dan Kota Semarang. Kedua wilayah tersebut juga memiliki arus migrasi dengan pola yang sama, paling tinggi setelah Kabupaten Brebes. Arus migrasi seumur hidup, risen dan total di kedua wilayah tersebut adalah 4,54

persen dan Kota Semarang mencapai 4,49 persen. Sedangkan dari luar Jawa Tengah untuk migrasi seumur hidup hanya 3,01 persen, dan migrasi risen ada 9,63 persen, dan migrasi total ada 6,34 persen. Rendahnya arus migrasi ke Jawa Tengah dapat disebabkan karena kondisi wilayahnya belum memiliki daya tarik bagi penduduk luar daerah.

Di Provinsi Jawa Tengah, hanya terdapat lima daerah yang memiliki daya tarik bagi penduduk luar. Daerah yang memiliki daya tarik paling tinggi ada di Kota Semarang, Kabupaten Sukoharjo, kemudian Kudus, Karanganyar, dan Batang. Kota Semarang merupakan salah satu daerah yang paling dinamis, karena arus migrasi total masuk, keluar dan neto, yang paling tinggi. Kondisi tersebut disebabkan oleh fungsi daerah atau fungsional region, Kota Semarang merupakan pusat pemerintahan di Jawa Tengah, selain itu juga menjadi pusat perekonomian dan industri. Sebaliknya, daerah yang paling tidak dinamis, artinya penduduk migran total masuk dan keluar paling sedikit, yaitu di Kota Pekalongan.

Daerah lainnya, 25 kabupaten dan 5 kotadaya tariknya bagi penduduk luar masih rendah. Fenomena tersebut ditunjukkan oleh selisih arus migrasi total masuk dan keluar dari dan ke daerah tersebut minus.

Tabel 4.6. Arus Migrasi Seumur Hidup Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten-Kota	Frekuensi (juta)
Cilacap	1,693
Banyumas	1,634
Purbalingga	0,897
Banjarnegara	0,910
Kebumen	1,184
Purworejo	0,710
Wonosobo	0,776
Magelang	1,244
Boyolali	0,963
Klaten	1,158
Sukoharjo	0,863
Wonogiri	0,948
Karanganyar	0,855
Sragen	0,878
Grobogan	1,350
Blora	0,815
Rembang	0,618
Pati	1,232
Kudus	0,830
Jejara	1,186
Demak	1,116,
Semarang	0,999
Temanggung	0,745
Kendal	0,941
Batang	0,742
Pekalongan	0,873
Pemalang	1,288
Tegal	1,424
Brebes	1,780
Magelang	0,121
Surakarta	0,512
Salatiga	0,183
Semarang	1,698
Pekalongan	0,296
Tegal	0,245
Jawa Tengah	33,75

Sumber: PBS, 2015

Kota Surakarta merupakan salah satu dari 35 daerah kabupaten/kota yang memiliki arus migrasi total neto minus paling tinggi. Kota Surakarta merupakan kota kerajaan, kota administrasi, kota dagang, kota budaya yang memiliki daya tarik, dengan aksesibilitas sangat tinggi. Wilayahnya berbatasan dengan beberapa, dikelilingi oleh beberapa daerah kabupaten yang subur, sehingga membentuk pusat dan peri-peri. Daerah pinggiran menjadi hinterlandnya, sehingga penduduk dengan mudah pergi ke pusat kota.

Kabupaten Semarang, merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah yang memiliki arus migrasi dari dan ke 35 kabupaten/kota. Penduduk migran dan bukan migran dapat dikaji dari arus migrasi seumur hidup, risen dan total. Jumlah migran seumur hidup 14,48 persen, migran risen 4,65 persen, dan migran total 20,17 persen. Jumlah migran total masuk 20,17, keluar 33,18 dan neto minus 13,01. Berarti, Kabupaten Semarang memiliki daya tarik bagi penduduk dari luar Kabupaten Semarang, walaupun arus migrasi total keluar lebih banyak dibandingkan dengan arus migrasi masuk.

Penduduk migran di Kabupaten Semarang berasal dari 25 kabupaten/kota di Jawa Tengah dan luar Jawa Tengah. Berdasarkan arus migrasi total, penduduk migran di Kabupaten Semarang berasal dari 26 kabupaten/kota di Jawa Tengah dan luar Jawa Tengah.

Tabel 4.7. Daerah Tujuan di Kabupaten Semarang

Kabupaten/kota Tujuan	Migrasi		
	Seumur hidup	Risen	Total
Cilacap	0,99	0,32	1,31
Banyumas	1	0	1
Purbalingga	2	0,79	2,79
Banjarnegara	2	0	2
Kebumen	3,8	2,48	6
Purworejo	0,98	0,03	1,01
Wonosobo	1,16	0,16	1,32
Magelang	5,71	1,46	7,17
Boyolali	19,28	7,26	26,54
Klaten	5,58	0,46	6,04
Sukoharjo	1,86	0,08	1,96
Wonogiri	2,25	0,07	2,32
Karanganyar	1,62	0	1,62
Sragen	1,71	0,68	2,39
Grobogan	7,11	2,48	9,59
Blora	1,29	0,03	1,31
Rembang	0,61	0,18	0,79
Pati	2,38	1,13	2,51
Kudus	2,89	0,08	2,97
Jepara	0,88	0	0,88
Demak	4,66	1,58	6,24
Semarang	856	949	1805
Temanggung	3,58	0,80	4,38
Kendal	1,38	0,37	1,75
Batang	0,65	0,03	0,65
Pekalongan	0,56	0,26	0,82
Pemalang	1,05	0,02	1,07
Tegal	2,4	0	2,4
Brebes	0,51	0	0,51
Magelang	1,73	0,33	2,06
Surakarta	0,86	0,29	1,15
Salatiga	10,93	0,48	11,41
Semarang	16,13	5,17	21,30
Pekalongan	0	0	0
Tegal	0,03	0	0,03
Lainnya	36,69	17,37	54,16

Sumber: diolah dari BPS , SUPAS 2015

Arus migrasi di Kabupaten Semarang dari luar Provinsi Jawa Tengah masih sangat kecil, yaitu hanya 7,73 persen.

Daerah yang tidak mengirim migran ada di 9 kabupaten/kota. Fenomena tersebut dapat dijelaskan bahwa wilayah Kabupaten Semarang dibandingkan dengan wilayah lain di provinsi Jawa Tengah, belum menjadi daerah tujuan para migran, belum menarik atau daya tariknya masih lemah. Di kabupaten Semarang, yang menjadi pusat kegiatan non-pertanian, seperti industri pengolahan dan jasa, masih relatif sedikit, yaitu terpusat di kawasan koridor bagian selatan menuju kota Surakarta dan Yogyakarta (Hardati, 2014).

Beberapa kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang belum mengirim migrant ke Kabupaten Semarang, dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain di daerah tersebut sudah menjadi pusat kegiatan industri atau berdekatan dengan kabupaten/kota yang menjadi pusat kegiatan ekonomi.

Daerah yang tidak mengirim migrant adalah Kabupaten Jepara, Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, Karanganyar, Jepara, Batang, Pemalang, dan Brebes, Kota Pekalongan dan Kota Tegal. Migran total paling banyak dari Kota Salatiga 0,38 persen, dan paling sedikit dari Kabupaten Wonogiri, 0,03. Kota Salatiga lokasinya di tengah-tengah wilayah Kabupaten Semarang, memiliki aksesibilitasnya tinggi, karena mudah dijangkau dari semua arah dan dengan semua jenis alat transportasi jalan raya dengan harga terjangkau.

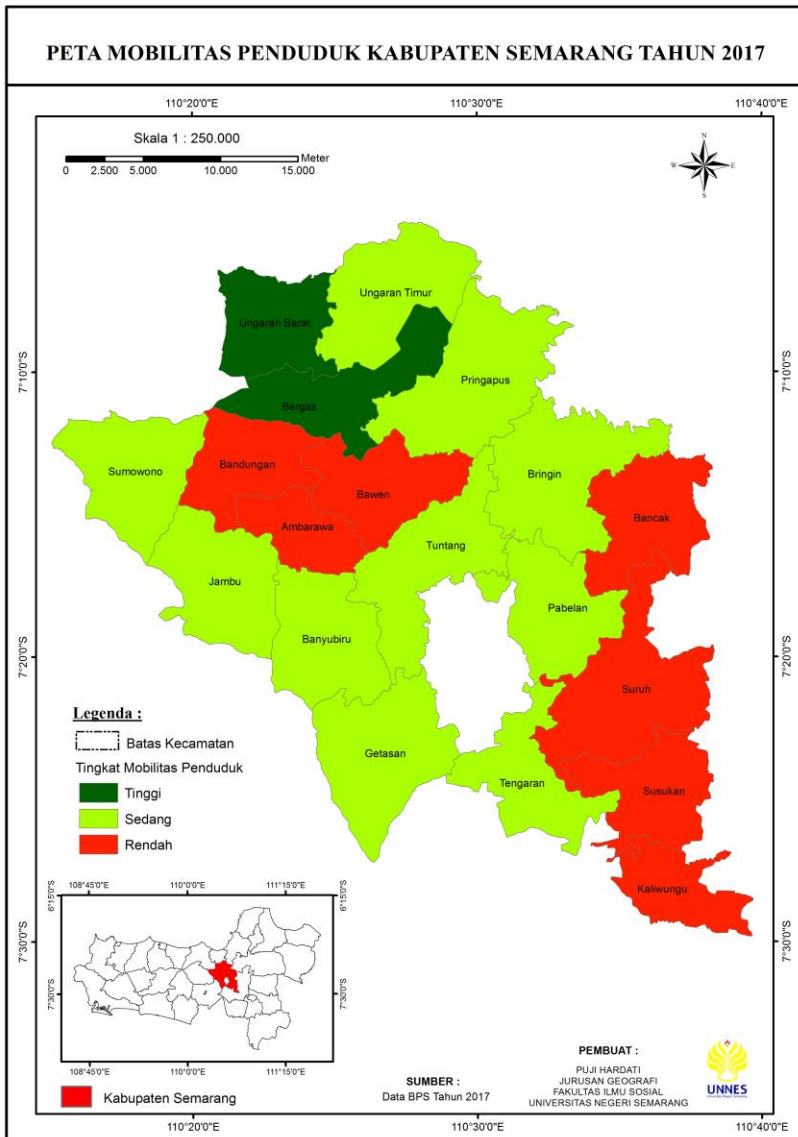
Migrasi masuk dan migrasi keluar antar wilayah kecamatan di Kabupaten Semarang, sangat bervariasi.

Kecamatan Ungaran Barat merupakan salah satu wilayah yang menjadi vavorit tujuan migran, sedangkan Kecamatan Getasan belum menjadi pilihan para migrant. Kecamatan Ungaran Barat juga merupakan salah satu wilayah yang sangat dinamis, selain menjadi vavorit para migran, juga merupakan wilayah kecamatan yang mengirim migrant ke luar wilayahnya.

Tabel 4.8. Migrasi Masuk dan Migrasi Keluar di Kabupaten Semarang

Kecamatan	Masuk (jiwa)	Keluar (jiwa)
Getasan	168	125
Tengaran	616	534
Susukan	352	354
Kaliwungu	201	188
Suruh	396	542
Pabelan	325	282
Tuntang	932	708
Banyubiru	274	239
Jambu	500	458
Sumwono	375	319
Ambarawa	990	611
Bandungan	570	604
Bawen	1.178	728
Bringin	331	309
Bancak	293	241
Pringapus	564	599
Bergas	754	619
Ungaran Barat	1.507	1.340
Ungaran Timur	233	222
Kabupaten Semarang	10.541	9.220

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2016.



Sumber: analisis data BPS, 2017

Gambar 4.1. Peta Mobilitas Penduduk di Kabupaten Semarang

Komuter adalah gerakan atau mobilitas penduduk geografis atau horizontal antar wilayah dengan tujuan tidak menetap di daerah tujuan, dengan waktu kurang dari 24 jam berangkat dan pulang pada hari yang sama. Komuter merupakan bentuk interaksi antara wilayah satu dengan lainnya, yang memiliki perbedaan karakter.

Pergerakan penduduk komuter atau disebut dengan *nglaju* (Mantra, 2003). Jumlah penduduk Indonesia yang melakukan komuter sebanyak 3,17 persen, dengan persebaran yang tidak merata, sangat beragam di berbagai provinsi. Provinsi dengan penduduk > 5 tahun terbanyak melakukan mobilitas non permanen komuter adalah DKI Jakarta, mencapai 12,09 persen, dan paling sedikit adalah di provinsi Kalimantan Utara, hanya sekitar 0,04 persen.

Pergerakan komuter tertinggi terjadi pada wilayah yang menjadi pusat kegiatan penduduk, seperti pusat kegiatan pemerintahan, pusat kegiatan ekonomi, pusat kegiatan industri dan jasa. Daerah Khusus Ibukota Jakarta, merupakan ibukota Negara Indonesia. DIY merupakan kota pendidikan dan kota budaya, semikian juga Bali merupakan salah satu destinasi pariwisata dunia.

Ulang-alik merupakan bentuk mobilitas non-permanen dengan waktu kurang dari 24 jam atau sehari. Pagi berangkat dan sore/malam hari pulang. Mobilitas ulang-alik menjadi pilihan, karena setiap hari bisa ketemu dengan keluarga.

Tabel 4.9. Mobilitas Non Permanen di Indonesia

Provinsi	Mobilitas Penduduk (persen)		
	Komuter	Musiman	Penduduk > 5 tahun (000000)
Aceh	1,643	14,37	4,47
Sumatera Utara	2,94	17,37	12,48
Sumatera Barat	1,70	19,21	4,66
Riau	1,04	42,68	5,67
Jambi	1,69	30,37	3,08
Sumatera Selatan	0,82	22,65	7,29
Bengkulu	0,94	30,02	1,70
Lampung	1,72	24,32	7,35
Kep.Bangka Belitung	1,74	20,22	1,24
Kep. Riau	0,29	60,56	1,75
DKI Jakarta	12,09	65,98	9,26
Jawa Barat	4,44	20,07	42,62
Jawa Tengah	2,96	9,97	31,02
DI Yogyakarta	9,97	22,07	3,42
Jawa Timur	2,09	13,22	35,97
Banten	7,01	27,31	10,79
Bali	6,16	30,68	3,81
Nusa Tenggara Barat	1,59	11,67	4,32
Nusa Tenggara Timur	0,37	14,18	4,54
Kalimantan Barat	0,95	13,77	4,32
Kalimantan Tengah	0,21	28,15	2,26
Kalimantan Selatan	2,70	23,03	3,59
Kalimantan Timur	0,49	40,19	3,11
Kalimantan Utara	0,04	34,29	0,57
Sulawesi Utara	2,17	23,63	2,21
Sulawesi Tengah	0,76	23,78	2,60
Sulawesi Selatan	1,37	20,60	7,73
Sulawesi Tenggara	0,58	34,23	2,22
Gorontalo	2,84	10,98	1,03
Sulawesi Barat	0,33	23,12	1,14
Maluku	0,97	30,96	1,50
Maluku Utara	0,19	17,21	1,03
Papua Barat	0,56	53,84	0,77
Papua	0,19	25,29	2,84
Indonesia	3,17	21,52	232,40

Sumber: BPS, SUPAS 2015.

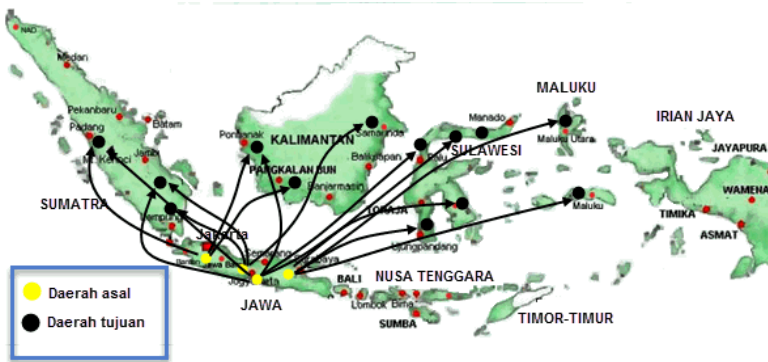
Mobilitas musiman merupakan salah satu bentuk mobilitas non permanen yang melintasi batas wilayah

kabupaten/kota tempat tinggal asal. Angka mobilitas musiman diperoleh dari hasil survai penduduk antar sensus tahun 2015, karena pada pelaksanaan supas dan sensus sebelumnya belum pernah mencakup analisis mobilitas musiman. Mobilitas non permanen musiman dihasilkan dari pertanyaan pulang kampung atau dalam bahasa yang sering dikenal di Indonesia adalah mudik (BPS, 2016). Mudik pada umumnya dilakukan oleh seseorang atau migrant yang memiliki daerah asal, dan dilakukan pada saat hari besar atau hari libur atau hari-hari tertentu yang dianggap penting untuk pulang kampung atau mudik.

Berdasarkan daerahnya, DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki jumlah pelaku mobilitas musiman paling banyak yaitu mencapai 66 persen, sedangkan paling sedikit di provinsi Jawa Tengah, yaitu kurang dari 10 persen, atau 9,97 persen. Provinsi yang masuk dalam sebelas besar jumlah mobilitas musiman adalah DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Papua Barat, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Bali, Jambi, Bengkulu, dengan angka lebih dari 30 persen sampai dengan 65,98 persen, sedangkan 23 provinsi lainnya besarnya hanya berkisar antara 9,97 persen sama dengan 28,13 persen.

Manfaat migrasi untuk daerah asal, pada umumnya berupa remitan. Remitan adalah merupakan pengiriman uang, barang, dan ide-ide pembangunan dari luar desa atau daerah

tujuan atau perkotaan ke daerah desa atau daerah asal atau daerah perdesaan.



Sumber: <https://www.google.com/=gambar+tujuan+migrasi+2016#>
:

Gambar 4.2. Daerah tujuan Migrasi dari Beberapa Kota di Jawa Tengah

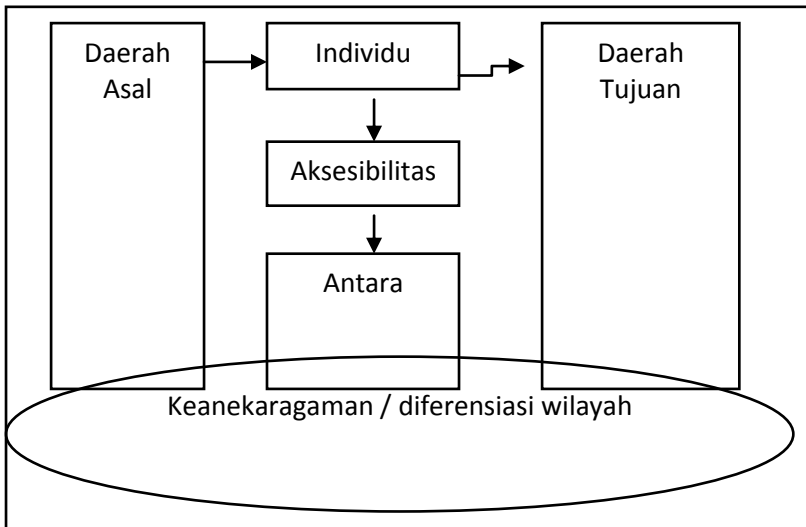
BAB V

FAKTOR-FAKTOR MOBILITAS PENDUDUK

Mobilitas penduduk keruangan atau mobilitas geografis terjadi karena adanya keragaman wilayah, ketidaksamaan fungsi dan mafaat suatu wilayah bagi setiap individu. Setiap wilayah memiliki fungsi dan peran yang berbeda-beda, tergantung dari karakteristik wilayah tersebut.

Suatu wilayah berbeda-beda, dapat dikategorikan berdasarkan dari berbagai ciri wilayah, seperti ciri tunggal, ciri majemuk, dan keseluruhan ciri atau total region, keseragamannya atau uniform region dan homogenitas atau nodal region. Sehingga setiap wilayah memiliki fungsi wilayah atau fungsional region, yang berbeda-beda. Fungsi yang beranekaragam dari suatu wilayah menjadi salah satu faktor mobilitas penduduk.

Berdasarkan karakter wilayahnya, maka faktor yang mempengaruhi terjadinya proses mobilitas penduduk dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu faktor yang ada di daerah asal, faktor yang ada di daerah tujuan, faktor yang ada diantara dua daerah asal dan tujuan atau disebut dengan faktor antara, yang meliputi jarak dan aksesibilitas, faktor pribadi dari seseorang yang akan melakukan mobilitas, dan kombinasi diantara faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut digambarkan dengan model gambar berikut.



Sumber: Lee (1966), Mantra (2003), dan Modifikasi

Gambar 5.1. Faktor Aksesibilitas pada Proses Mobilitas Penduduk

5.1. Faktor-faktor di Daerah Asal dan Daerah Tujuan

Daerah asal adalah tempat atau lokasi di suatu wilayah yang menjadi asal muasal seseorang, dimana seseorang dilahirkan. Daerah asal merupakan salah satu faktor yang menjadi salah satu variabel yang menentukan seseorang untuk memutuskan melakukan mobilitas penduduk. Daerah asal memiliki nilai sejarah, budaya, sosial, dan ekonomi bagi seseorang.

Daerah asal merupakan daerah tempat kelahiran seseorang, yang menjadi salah satu peristiwa sejarah seseorang, sehingga sering menjadi salah satu pertimbangan

yang paling menentukan bagi seseorang, walaupun juga tidak dilakukan oleh orang lain. Sehingga daerah asal bukan satu-satunya faktor yang paling menentukan terjadinya mobilitas penduduk.

Nilai budaya, daerah asal memiliki nilai budaya, karena daerah asal tempat seseorang dibesarkan yang penuh dengan nilai-nilai budaya, mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang tinggi. Bagi seseorang, sangat sulit dilupakan tetapi tidak demikian bagi orang lain. Daerah asal tempat seseorang menggali ilmu, pertama kali berinteraksi dengan orang lain, dengan sesama teman sebaya, dan kerabat komunitas lokal, sehingga memiliki nilai sosial yang tinggi, tidak terlupakan. Daerah asal memiliki nilai ekonomi, dalam arti bernilai positif dan negatif. Bernilai positif apabila seseorang tercukupi secara ekonomi, misalnya memperoleh pekerjaan dan mendapatkan upah gaji yang cukup, sehingga memberikan nilai positif bagi daerah asal. Apabila seseorang tidak bisa bekerja dan tidak memperoleh penghasilan layak, maka daerah asal dianggap memiliki nilai ekonomi yang negatif.

Seseorang meninggalkan daerah asal sebagian besar karena alasan ekonomi, yaitu mencari pekerjaan di daerah tujuan, walaupun ada sebagian kecil yang terkait dengan faktor lainnya. Daerah yang memiliki jumlah penduduk dan kepadatan penduduk yang besar, dengan lapangan pekerjaan

yang terbatas, menjadi salah satu faktor seseorang meninggalkan daerah asal.

Setiap orang yang akan melakukan mobilitas, mempunyai anggapan bahwa daerah tujuan memiliki nilai positif, nilai lebih baik. Sebagian besar menganggap bahwa daerah tujuan akan memberikan pemenuhan kebutuhannya.

Faktor yang mempengaruhi migrasi sangat variatif , tergantung dari cara mengkajinya. Walaupun demikian, hampir semua kajian terhadap migrasi selalu memperhatikan dua daerah, yaitu daerah asal dan daerah tujuan (Mantra, Todaro, Lee). Mantra (1992, dan 2003) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang terjadi di daerah asal dan daerah tujuan merupakan variasi dari tinggi rendahnya tingkat migrasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan bermigrasi, adalah faktor pendorong dari daerah asal antara lain, yaitu makin berkurangnya sumber-sumber alam, menyempitnya lahan pekerjaan ditempat asal, adanya tekanan-tekanan dan diskriminasi politik, agama, atau suku, tidak cocok lagi dengan budaya pada daerah asal, alasan pekerjaan atau perkawinan yang menyebabkan tidak berkembangnya karir pribadi, bencana alam.

Faktor penarik dari daerah asal menurut Mantra (1985:176) disebut faktor positif yang terdapat dari daerah asal yaitu menyebabkan penduduk untuk memilih tidak meninggalkan daerah asalnya, antara lain, yaitu jalinan

persaudaraan dan kekeluargaan diantara warga desa sangat erat, sistem gotong royong pada masyarakat pedesaan jawa sangat erat pula, penduduk sangat terikat pada tanah pertanian, penduduk sangat terikat pula kepada daerah (desa) dimana mereka dilahirkan.

5.2 Faktor Antara dan Aksesibilitas

Faktor antara merupakan salah satu komponen yang ada diantara daerah asal dan daerah tujuan. Faktor antara menjadi salah satu pendukung mobilitas penduduk. Pada saat jaman dahulu, jaman dimana belum terjadi pembangunan yang baik, faktor antara menjadi salah satu kendala mobilitas penduduk. Pada jaman sebelum pembangunan, atau sebelum tahun 1960an, hampir semua wilayah tidak terhubung, baik secara langsung dan tidak langsung. Terhubung secara langsung, artinya suatu wilayah dapat dikunjungi, didatangi, menjadi daerah tujuan mobilitas, sehingga faktor antara menjadi salah satu penghalang seseorang melakukan mobilitas penduduk.

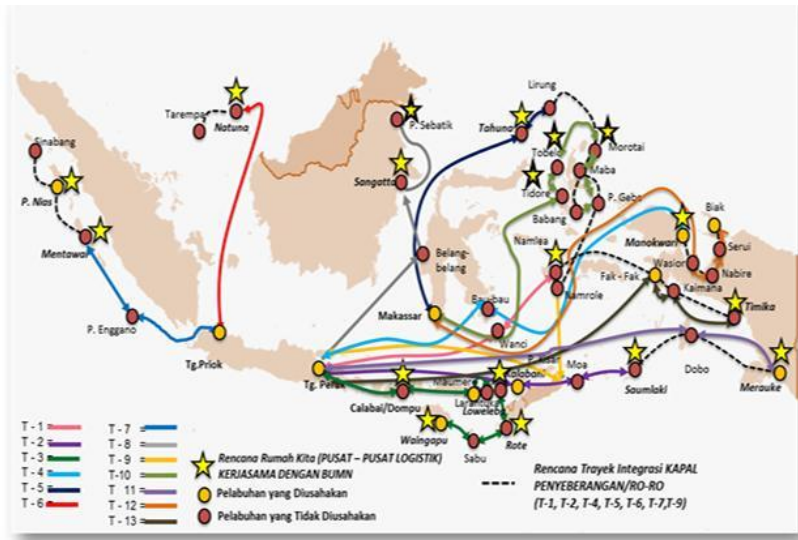
Faktor penghalang antara (Munir, Mantra, 2003) menyatakan bahwa beberapa unsur yang termasuk merintangai seseorang untuk pindah adalah jarak, undang-undang imigrasi, dan biaya perpindahan. Berat atau tidaknya rintangan ini tergantung kepada penilaian individu yang akan melakukan perpindahan.

Teknologi informasi komunikasi sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Pada waktu manusia masih berada pada tahap irasional atau disebut dengan tradisional dan afektif, manusia mampu menghasilkan teknologi, tetapi teknologi yang dihasilkan masih sangat sederhana, sehingga belum mampu mempengaruhi kehidupan manusia. Seiring perjalanan waktu, dan perkembangan kebudayaan manusia, sekaligus mampu menemukan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga dapat dimanfaatkan tidak sekedar untuk alat tetapi alat untuk mencapai tujuan hidup.

Pembangunan infrastruktur, merupakan salah satu sarana pendukung strategi penghidupan, seperti yang telah disebutkan oleh Scoone (2000) bahwa salah satu bentuk strategi penghidupan adalah migrasi. Pada abad 21, mobilitas penduduk non permanen menjadi salah satu bentuk strategi penghidupan yang dipilih oleh sebagian besar penduduk usia produktif. Sarana infrastruktur transportasi menjadi salah satu variabel yang menentukan bentuk-bentuk mobilitas penduduk tersebut.

Indonesia, mencanangkan tahun infrastruktur, dengan harapan, mobilitas menjadi semakin lancar dengan kualitas lebih baik. Konektifitas antar wilayah semakin tinggi dan semakin berkualitas. Hubungan antar pulau, antar kota menjadi semakin, ketimpangan wilayah diminimalisir. Jalur

antar pulau dan antar wilayah di Indonesia dapat dikaji dari gambar berikut.



Sumber: <https://www.google.com/search?safe=strict&source:>
Gambar 5.2. Rute Transportasi Laut di Indonesia

Pembangunan jalan bebas hambatan, menjadi salah satu penghubung antar wilayah, sehingga jarak antar wilayah semakin dekat. Konektivitas antar wilayah semakin tinggi, setiap wilayah dapat dikunjungi dengan mudah dan murah.

Transportasi laut merupakan salah satu moda transportasi yang paling murah, karena tidak secara khusus membangun sarana jalur lalu lintas, atau jaringan lalulintas laut sudah ada secara alami, tinggal manusia mencari alternative yang paling aman dan paling mudah untuk digunakan jalur transportasi.

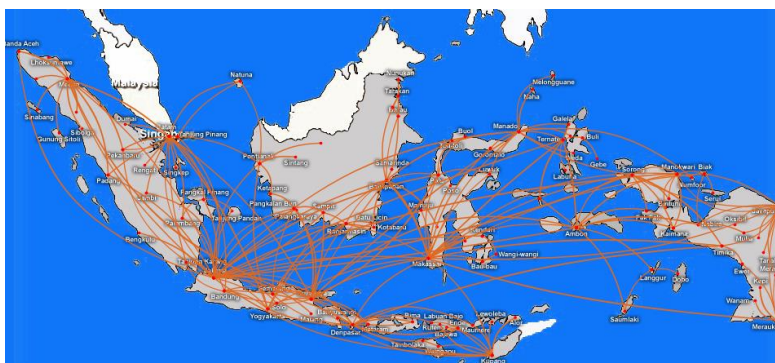


Sumber:

<https://www.google.com/search?q=peta+jalan+tol+di+indonesia&safe:>

Gambar 5.3. Persebaran Lokasi Jalan TOL di Indonesia

Pembangunan infrastruktur di semua moda transportasi, baik di darat, udara, dan laut. Sebagian besar wilayah dapat terkoneksi melalui jalur udara. Jalur penerbangan di Indonesia, mulai dari kota-kota yang ada di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, sampai dengan yang berada di Pulau Irian, terhubung dengan baik menggunakan jalur penerbangan, sehingga setiap orang secara individu maupun kelompok yang menginginkan untuk melakukan mobilitas dapat dilakukan tanpa kendala.



Sumber: <https://www.google.com/search?q=jalur+penerbangan+an+>

Gambar 5.4. Jalur Penerbangan Nasional

Teknologi informasi dan komunikasi yang diciptakan mampu membawa perubahan pola pikir manusia. Kehidupan manusia yang semula berbasis pertanian bergeser ke industri manufaktur dan kedepan abad 21 berubah menjadi kehidupan berbasis jasa, seiring dengan terjadinya revolusi industri 4.0.

Pengertian industri 4.0 (Merkel, 2014) merupakan salah satu tahapan transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digitasi dan internet dengan industri konvensional. Sedangkan Schlechtendahl, dkk (2015) menekankan pada unsur kecepatan ketersediaan informasi, sebuah lingkungan industri yang seluruh identitasnya selalu terhubung dan mampu berbagi informasi satu dengan lainnya.

Pengertian industri 4.0 masih menjadi perdebatan oleh berbagai ahli dan berbagai latar belakang serta sudut

pandang, tetapi itu merupakan suatu keniscayaan, sehingga semua harus mengantisipasinya, dengan cara beradaptasi.

Semua kegiatan, baik itu perusahaan, industri rumahan sampai dengan yang berskala besar, perdagangan eceran grosir dan besar, jasa, semua menghadapi kebutuhan beradaptasi terhadap perubahan.

Perubahan teknologi informasi dan komunikasi juga berimbas pada mobilitas penduduk. Faktor antara yang semula merupakan salah satu penghalang antara daerah asal dan daerah tujuan, menjadi salah satu unsur yang dapat diminimalisir dengan adanya teknologi, teknologi informasi dan komunikasi.

Perubahan teknologi transportasi, informasi komunikasi, pada abad 21 juga membawa perubahan pada pola mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk permanen tidak harus dilakukan, walaupun dilakukan dalam jumlah yang tidak banyak. Hal ini dikaitkan dengan karena terdapat kemudahan akses dari daerah asal ke daerah tujuan. Kedepan, pola mobilitas musiman dan non-permanen akan menjadi tren baru dalam mobilitas penduduk.

Perubahan tren pola mobilitas penduduk terjadi pada wilayah-wilayah yang melakukan pembangunan sarana prasarana transportasi, baik pada transportasi darat, laut dan udara, sehingga semua jenis moda transportasi tersebut

dapat mendukung seseorang melakukan mobilitas yang bervariasi bentuknya.

Faktor-faktor yang menentukan mobilitas penduduk sangat variatif dinamis dan kompleks. Daerah asal secara umum memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang tinggi, sehingga menjadi salah satu pertimbangan seseorang melakukan mobilitas penduduk.

Aksesibilitas antar wilayah menjadi semakin tinggi, jarak antar wilayah semakin pendek. Aksesibilitas merupakan kemudahan menjangkau suatu benda, dalam hal ini adalah daerah asal dan daerah tujuan. Faktor antara menjadi tidak menjadi salah satu komponen penghalang untuk melakukan mobilitas.

Aksesibilitas terkait dengan jarak, dalam hal ini jarak mengandung multi arti, yaitu jarak berarti geometrik, ekonomi, waktu, psikologis. Jarak geometric merupakan jarak sesungguhnya yang diukur dengan ukuran jarak yaitu meter, hectometer, dan kilometer. Jarak geometric dapat ditempuh melalui berbagai moda transportasi, sehingga setiap moda transportasi memiliki jarak geometric yang berbeda, karena karakteristiknya berbeda.

Jarak ekonomi merupakan jarak tempuh yang diukur dengan nilai uang, yaitu biaya yang digunakan untuk menempuh diantara dua wilayah yaitu daerah asal dan daerah tujuan mobilitas penduduk. Apabila menggunakan

moda transportasi udara, jarak ekonomi lebih mahal dibandingkan dengan jarak ekonomi menggunakan moda transportasi darat, jalan raya atau kereta api maupun moda transportasi lain.

Jarak waktu, merupakan akumulasi jumlah waktu yang digunakan untuk menempuh perjalanan dari daerah asal ke daerah tujuan atau sebaliknya. Jarak waktu sangat berhubungan dengan jenis moda transportasi, secara umum jenis moda transportasi udara lebih cepat dibandingkan dengan moda transportasi darat dan laut. Sehingga, dengan semakin banyaknya jenis dan rute penerbangan yang menghubungkan antar pulau dan kota, semakin meningkat mobilitas penduduk dan akan mengubah pola mobilitas penduduk masa depan.

Faktor jarak, dalam aksesibilitas juga memiliki makna, keterjangkauan informasi dan komunikasi, sehingga dapat mengeliminir jarak lainnya, yaitu geometric, ekonomi, dan sosial. Suatu wilayah yang secara jarak geometric ekonomi sosial tidak dapat dijangkau, tetapi dapat dijangkau dengan informasi dan komunikasi, maka wilayah tersebut memiliki aksesibilitas yang tinggi. Sehingga, aksesibilitas wilayah menjadi salah satu faktor pendukung mobilitas penduduk, aksesibilitas tinggi mendukung wilayah mudah dijangkau dan terjadi apabila kondisinya sebaliknya.

5.3 Keberagaman Wilayah

Prinsip geografi ada empat, salah satunya adalah prinsip penyebaran atau distribusi, yaitu merupakan fakta bahwa fenomena geosfer di suatu wilayah distribusinya tidak sama, sangat bervariasi dan beraneka ragam. Keanekaragaman tersebut dapat di suatu wilayah yang sempit dan besar, mulai dari lokasi suatu wilayah, distrik, provinsi, negara, dan sampai pada yang paling besar realm, benua.

Prinsip penyebaran fenomena memberikan konsekuensi bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik tersendiri. Berdasarkan karakteristiknya, wilayah dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu wilayah formal dan wilayah fungsional. Wilayah formal merupakan karakteristik suatu wilayah yang sudah ditentukan, dan digunakan untuk kepentingan administrasi, yang dibuat dengan batas wilayah resmi yang ditentukan. Wilayah formal dapat diidentifikasi dengan kedudukannya, seperti desa, kota, kabupaten, provinsi, dan negara.

Wilayah memiliki karakteristik atau ciri yang berbeda-beda, sehingga suatu wilayah dapat dikelompokkan berdasarkan ciri tersebut. Terdapat 6 ciri untuk menentukan suatu wilayah, yaitu kriteria, kategori, karakteristik, inti dan perbatasan, kekompakan, dan kesadaran wilayah. Berdasarkan kriterianya, maka wilayah dapat diidentifikasi menjadi wilayah-wilayah dengan kemiringan tinggi, curam,

tidak dipilih untuk menjadi pusat permukiman penduduk, umumnya angka mobilitas masuk rendah. Wilayah berdasarkan ciri kategori, dapat dibedakan berdasarkan *total region* (alami dan non-alami), *uniform region* atau keseragaman fenomena, dan *nodal region* yang dibedakan menjadi *single future nodal region* dan *multiple future nodal region*. Berdasarkan enam ciri wilayah tersebut, maka wilayah menjadi sangat heterogen, beranekaragam. Wilayah yang homogen hanya suatu kemiripan, sehingga memungkinkan penduduk untuk melakukan mobilitas antar wilayah.

Keanekaragaman ciri atau karakter suatu wilayah membuat suatu wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia yang semakin lama semakin kompleks, atau kebutuhan hidup manusia yang semakin kompleks tidak mungkin dapat dipenuhi di suatu wilayah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia harus melakukan mobilitas. Keanekaragaman wilayah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan mobilitas secara geografis. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa prinsip penyebaran fenomena juga merupakan salah satu faktor kunci yang menyebabkan terjadinya proses mobilitas penduduk.

5.4. Mobilitas Penduduk dan Urbanisasi

Pengertian urbanisasi dan yang berkaitan dengan urbanisasi ada beberapa istilah yang menyertainya, seperti urban adalah orang yang berurbanisasi, atau juga berarti sesuatu yang berhubungan dengan gaya hidup kota. Urbanisasi adalah proses perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisme adalah proses peniruan gaya hidup orang kota oleh orang desa yang dibawa oleh orang-orang yang pernah bertempat tinggal di kota atau perkotaan. Urbanitas adalah sifat atau gaya hidup kekotaan, atau kesopanan kota.

Urbanisasi (Bintarto, 1983) merupakan suatu proses meningkatnya jumlah dan kepadatan penduduk di suatu wilayah yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti perpindahan penduduk dari desa ke kota, meningkatnya akumulasi dan aglomerasi penduduk, disertai dengan kelengkapan fasilitas.

Urbanisasi merupakan prosen, sehingga terjadinya memerlukan waktu yang lama, dan di setiap wilayah tidak sama terjadinya proses tersebut. Wilayah dikatakan terjadi aglomerasi apabila memiliki jumlah penduduk minimal yang telah disepakati bersama atau ditentukan berdasarkan kriteria tertentu. Urbanisasi selalu diikuti dengan dampak, yang bersifat positif dan negative, baik terjadi di wilayah secara fisik dan perilaku manusianya.

Tabel 5.1. Aglomerasi Penduduk dan Kriteria Kota

Jumlah Penduduk *	Kategori *	Jumlah Penduduk**	Istilah **
40	dweling group	16-<150	dusun
250	small neighborhood	150-<1000	Desa
1.500	Neighborhood	1.000-<2.500	Kota sangat kecil
9.000	Small town	2.500-<25.000	Kota kecil
50.000	Town	25.000-<100.000	Kota Menengah
300.000	large city	100.000-<800.000	Kota Besar
2.000.000	Metropolis	800.000-8.000000	Metropolitaa n
14.000.000	Conurbation		
100.000.000	Megalopolis	8.000.000-25.000.000	Megapolis
700.000.000	Urban Region		
5.000.000.000	Urban Continent		
30.000.000.000	Ecumenopolis	> 25.000.000	Mega urban

Sumber: *Bintarto, 1983; dan ** Muta'ali, 2013

Urbanisasi menyebabkan jumlah penduduk suatu wilayah menjadi semakin bertambah banyak. Walaupun demikian, belum ada kesepakatan antar para pihak untuk menetapkan suatu wilayah dikatakan terjadi urbanisasi. Urbanisasi merupakan suatu proses suatu tahapan atau suatu jenjang, dan ada yang mengatakan sebagai suatu prasyarat kemajuan suatu wilayah. Urbanisasi digunakan untuk menunjukkan adanya peristiwa pemusatan keadaan sosial ekonomi karena adanya interaksi manusia dengan lingkungannya.

Syarat suatu wilayah dapat dikatakan terjadi aglomerasi ada bermacam-macam, karena kota itu sendiri memiliki berbagai atribut. Seperti yang telah dibuat oleh C.Doxiadis dalam Bintarto (1983). Jumlah penduduk menjadi salah satu faktor penentu suatu wilayah dapat disebut dengan kota. Selain itu, klasifikasi kota yang dilakukan oleh Yunus, 2005 dalam Muta'ali 2013 berbeda, walaupun dasar yang digunakan sama yaitu jumlah penduduk.

Pada abad 21, jumlah penduduk kota semakin bertambah banyak. Di dunia, jumlah penduduk yang bertempat tinggal di kota mencapai 53 persen, dengan persebaran yang timpang antara negara maju dan negara berkembang. Di negara maju, jumlah penduduk yang bertempat tinggal di kota mencapai 77 persen, sedangkan di negara terbelakang atau *least development* hanya 29 persen. Apabila dikaji persebaran setiap benua, maka di benua Amerika paling banyak penduduk yang bertempat tinggal di perkotaan, yaitu mencapai 80 persen, dan yang paling sedikit di Benua Asia, hanya 47 persen. Berikut adalah persebaran penduduk yang bertempat tinggal di kota berdasarkan benua. Artinya, urbanisasi terjadi di semua wilayah secara global, di semua benua, semua wilayah Negara, walaupun disetiap lokasi terjadinya tidak sama dan sangat bervariasi. Urbanisasi sangat ditentukan oleh karakteristik wilayah dan aksesibilitas kota, serta fungsi kota.

Tabel 5.2. Persentase Penduduk Dunia yang bertempat tinggal di Kota Tahun 2015

Benua	Jumlah Penduduk Kota (Persen)
Afrika	47
Amerika	80
Asia	47
Eropa	73
Oceania	70
Dunia	53

Sumber: Population Reference Boreau, 2015

Di Asia Tenggara, juga mengalami pertumbuhan jumlah penduduk yang bertempat tinggal di Kota, mengalami urbanisasi, walaupun masih sangat rendah. Negara-negara di Asia Tenggara mengalami urbanisasi tinggi adalah di Singapore, Brunei, dan Malaysia. Dari tiga negara tersebut, paling tinggi proses urbanisasinya adalah di Singapore, yaitu mencapai 100 persen penduduk bertempat tinggal di kota. Indonesia, Thailand, dan Philipine, termasuk sedang, dengan jumlah penduduk yang bertempat tinggal di kota berkisar antara 44-59 persen, sedangkan lima negara yang lainnya, seperti Kamboja, Laos, Myanmar, Timor Leste, termasuk dalam kategori rendah proses urbanisasinya, karena jumlah penduduk yang bertempat tinggal di kota berkisar 21-33 persen.

Indonesia, merupakan salah satu Negara di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk yang bertempat tinggal di kota mencapai 54 persen.

Tabel 5.3. Persentase Penduduk Asia Tenggara Bertempat Tinggal di Kota Tahun 2015

Negara	Jumlah Penduduk Kota (persen)
Brunei	77
Camboja	21
Indonesia	54
Laos	38
Malaysia	74
Myanmar	34
Philipines	44
Singapore	100
Thailand	32
Timor Leste	33
Asia tenggara	47

Sumber: Population Reference Boreau, 2015

Di Indonesia, proses urbanisasi hampir sama dengan beberapa negara di dunia, sangat cepat. Beberapa kota yang mengalami urbanisasi paling cepat adalah Kota Jakarta, dan diprediksi, pada tahun 2035 nanti, Indonesia sebagian besar wilayahnya menjadi perkotaan dengan pulau Jawa menjadi pulau kota. Jumlah penduduk yang bertempat tinggal di kota lebih dari 60 persen.

Di Pulau Jawa, rovinsi yang memiliki jumlah penduduk yang bertempat tiggal di kota lebih dari 65 persen yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Daerah istimewa Yogyakarta, Banten, Kepulauan Riau, Bali, dan Kalimantan Timur. Sedangkan provinsi yang jumlah penduduk perkotaan kurang dari 25 persen hanya di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Gorontalo.

Di Indonesia, proses urbanisasi berlangsung cepat, dengan pertambahan yang sangat signifikan. Pada tahun 2015, jumlah penduduk yang bertempat tinggal di daerah pedesaan ada separo lebih sedikit, dan diperkirakan pada tahun 2035 mencapai dua pertiga penduduk bertempat tinggal di daerah perkotaan. Artinya, jumlah penduduk yang tinggal di daerah pedesaan semakin sedikit, padahal, hampir semua produksi hasil pertanian diperoleh dari daerah pedesaan. Apakah akan terjadi pengurangan produksi pertanian? Belum tentu, hal ini tergantung dari cara pertanian yang dilakukan, dan persebaran secara keruangannya. Produksi pertanian dapat ditingkatkan dengan strategi intensifikasi, di semua jenis pertanian, baik pertanian sawah dan pertanian lahan kering.

Pembangunan di semua daerah kabupaten/kota di semua wilayah provinsi di Indonesia diharapkan dapat menjadi gula, sehingga semut tidak harus bergerak mendekati gula yang ada di wilayah provinsi lain, dan apabila hal ini dapat diwujudkan, maka tidak semua penduduk pergi ke kota, tetapi cukup bertempat tinggal di daerahnya masing-masing yang sudah maju dan tercukupi, sehingga mobilitas penduduk antar provinsi dan kabupaten/kota bergeser tidak ahrus selalu dari desa ke kota, tetapi menjadi dari desa ke desa atau dari kota ke desa. Desa menjadi pusat aktivitas penduduk dengan perekonomian yang tangguh.

Tabel 5.4.Persentase Penduduk Indonesia di Perkotaan
2010-2035

Provinsi	Jumlah Penduduk Kota (Persen)		
	2015	2025	2035
Aceh	31	36	43
Sumatera Utara	53	60	68
Sumatera Barat	44	55	64
Riau	39	41	42
Jambi	32	35	38
Sumatera Selatan	37	38	40
Bengkulu	32	34	36
Lampung	28	35	42
Kep.Bangka Belitung	53	60	67
Kep. Riau	83	84	85
DKI Jakarta	100	100	100
Jawa Barat	73	83	89
Jawa Tengah	48	54	61
DI Yogyakarta	71	78	84
Jawa Timur	51	59	67
Banten	68	74	85
Bali	66	74	81
Nusa Tenggara Barat	45	54	63
Nusa Tenggara Timur	22	27	35
Kalimantan Barat	33	40	48
Kalimantan Tengah	37	44	53
Kalimantan Selatan	45	52	60
Kalimantan Timur	66	72	78
Kalimantan Utara	50	59	69
Sulawesi Utara	27	34	43
Sulawesi Tengah	41	50	60
Sulawesi Selatan	31	39	48
Sulawesi Tenggara	39	49	58
Gorontalo	23	23	23
Sulawesi Barat	38	40	42
Maluku	28	29	31
Maluku Utara	32	38	44
Papua Barat	28	34	42
Papua	53	60	67

Sumber: Bappenas, 2013

Berdasarkan wilayah provinsi, dari 34 provinsi, yang tidak memiliki penduduk perdesaan hanya Daerah Khusus Ibukota Jakarta, provinsi lainnya, semua memiliki wilayah perdesaan. Proses urbanisasi yang termasuk tinggi berada di 5 wilayah provinsi, yaitu paling tinggi diprovinsi Kepulauan Riau, kemudian Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten dan Bali. Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 2025, diprediksikan bahwa urbanisasi terjadi lebih meluas, ke 6 wilayah provinsi, yaitu tambah di Luar Jawa, satu-satunya propinsi dengan urbanisasi tinggi, yaitu Provinsi Kalimantan Timur.

Proses urbanisasi akan meluas lagi ke wilayah provinsi lainnya dan meningkat angkanya pada tahun 2035, menjadi 8 provinsi. Pulau Sumatera, yang selama beberapa puluh tahun proses urbanisasi tinggi hanya disatu provinsi yaitu provinsi Kepulauan Riau, tetapi dua puluh tahun kemudian, menjadi 3 provinsi, yaitu tambah provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Sumatera Utara, sedangkan di 26 provinsi lainnya proses ubanisasi termasuk rendah sampai sedang, dengan variasi jumlah penduduk perkotaan berkisar 23-64 persen. Artinya, masih ada penduduk yang bertempat tinggal di daerah perdesaan, dengan kata lain masih ada produksi pertanian untuk cadangan bahan pangan nasional dan lokal.

BAB VI

KARAKETRISTIK MIGRAN

6.1. Alasan Migran

Migran memiliki berbagai variasi alasan melakukan migrasi. Alasan migrant bermigrasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu alasan ekonomi dan non-ekonomi. Alasan seseorang melakukan migrasi menurut (Todaro, 1976; Mantra, 2003) sebagian besar mengatakan karena alasan ekonomi, selain juga sosial dan budaya.

Di Indonesia, alasan seseorang melakukan migrasi dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu pekerjaan, alasan pekerjaan, pendidikan, dan perubahan status perkawinan (BPS, 2016). Berdasarkan alasan tersebut, sebagian besar migrant risen melakukan migrasi karena alasan keluarga, yaitu mengikuti suami/istri/anak/orang tua. Dan sebagian besar lainnya melakukan migrasi karena alasan ekonomi, yaitu pekerjaan, mencari pekerjaan. Sedangkan sebagian lagi memberikan alasan pendidikan dan perubahan status perkawinan.

Alasan utama Migran risen Kabupaten Semarang didominasi oleh alasan keluarga, yang terdiri dari mengikuti suami/istri/anak, mencapai 47,62 persen dan ikut saudara kandung. Selain itu, sebagian besar alasan pekerjaan mencapai 33 persen. Alasan lain yang diutarakan oleh para

migran risen Kabupaten Semarang adalah mencari pekerjaan, melakukan pendidikan, terjadi perubahan status, perumahan, relokasi dan lainnya. Para migran tidak ada yang mengatakan pindah dengan alasan keamanan, artinya di wilayah Indonesia dan khususnya di wilayah Jawa tengah kondisinya aman.

Migran risen Kabupaten Semarang, hanya 63,39 persen yang bekerja, sisanya sekolah dan mengurus rumah tangga. Dari jumlah migran risen yang bekerja tersebut, didominasi oleh migran risen yang bekerja dengan lapangan pekerjaan utama adalah di sektor jasa, tetapi dengan status pekerjaan menjadi buruh atau karyawan, sedangkan yang di sektor pertanian tidak ada seperenamnya, karena hanya 14 persen. Walaupun demikian, para migran risen Kabupaten Semarang sebagian besar sudah bertempat tinggal di rumah milik sendiri, mencapai 81 persen, dan hanya 15 persen yang mengontrak dan menyewa.

6.2. Karakteristik Migran Nasional

Karakteristik adalah suatu variabel yang melekat di suatu fenomena. Fenomena dapat berupa fenomena alam dan non-alam. Fenomena alam dapat bedakan menjadi dua, yaitu fenomena alam non-hayati yang terdiri dari tanah dan lahan, udara dan air; dan alam hayati yang terdiri dari hewan dan tumbuhan-tumbuhan. Fenomena non-alam, merupakan fenomena manusia dengan berbagai aktivitas perilaku dan

kebuyaannya, fenomena non alam disebut juga dengan fenomena artifisial (Yunus, 2010).

Karakteristik migrant dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai aspek, yang paling penting adalah lokasi, yaitu daerah asal dan daerah tujuan, karena merupakan variabel kunci dari mobilitas. Selain itu juga dapat dikaji dari karakteristik penduduknya atau pelaku mobilitas atau mover, dan pelaku mobilitas permanen disebut migrant. Karakteristik migran, yang sering digunakan adalah jenis kelamin, umur, status perkawinan, pendidikan, kegiatan utama atau lapangan pekerjaan, dan status pekerjaan (BPS, 2016).

Karakteristik migrant dibedakan menjadi dua, yaitu karakteristik migran pada tingkat nasional dan lokal atau daerah. Pada tingkat nasional, Indonesia, migran umumnya sebagian besar berjenis kelamin laki-laki, tetapi abad 20 dan pada akhir-akhir ini, memasuki abad 21, ada pergeseran, sebagian perempuan mulai melakukan mobilitas dan migrasi, dan jumlahnya semakin banyak. Hal ini seiring dengan keberhasilan pembangunan terutama di bidang sumberdaya manusia dan kesetaraan gender.

Di Indonesia, migran risen, berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibanding dengan perempuan, dengan ratio jenis kelamin 106, artinya setiap 100 migran perempuan ada 105 migran laki-laki. Kondisi tersebut masih sesuai dengan hukum migrasi yang menyatakan bahwa jenis kelamin

berpengaruh terhadap volume migrant. Apabila dikaitkan dengan alasan melakukan migrasi, maka sebagian besar migrant risen mengatakan bahwa alasan utama yang dominan adalah mencari nakhah atau bekerja. Norma yang berlaku umum bahwa laki-laki yang menjadi kepala keluarga memiliki kewajiban mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Tabel 6.1. Karakteristik Migran Risen di Indonesia

Ciri	Frekuensi (Persen)
Ratio Jenis Kelamin	105
Umur	
5-14	12,20
15-39	73,97
>40	14,83
Status Perkawinan	
Belum Kawin	35,60
Kawin	59,85
Cerai	4,55
Pendidikan	
Tidak belum sekolah dan belum tamat SD	15,46
Tamat pendidikan dasar	71,88
Tamat Perguruan Tinggi	12,66
Sektor Pekerjaan	
Pertanian	15,75
Manufaktur	25,33
Jasa dan Lainnya	58,92

Sumber: BPS, 2016

Berdasarkan kelompok umur, terjadi hubungan yang berbentuk huruf U terbalik, semakin tua atau semakin meningkat umurnya jumlah migrant risen semakin banyak,

dan sampai pada usia 39 tahun terjadi puncak, dan berbalik turun menuju pada usia lebih dari 40 tahun. Migran risen didominasi oleh kelompok umur 15-39 tahun, dibandingkan dengan yang berumur lebih tua dan lebih muda. Pada usia anak-anak, dan usia lebih tua, jumlahnya hanya sedikit.

Para migrant risen, sebagian besar berstatus kawin, dengan pendidikan hanya tamat pendidikan dasar (Sekolah Dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas). Migran yang berpendidikan sampai tamat perguruan tinggi hanya 12,66 persen. Selain itu, sebagian besar migrant bekerja di sektor jasa dan lainnya, karena yang bekerja di sektor pertanian hanya 15,57 persen, dan paling sedikit yang bekerja di sektor pertanian, hanya 15,75 persen.

6.3. Karakteristik Migran Lokal

Karakteristik mobilitas penduduk lokal, yang dimaksud adalah karakteristik mobilitas penduduk permanen atau migrasi pada tingkat kabupaten. Karakteristik migran pada tingkat lokal, daerah kabupaten, secara umum hampir sama dengan karakteristik migran pada tingkat nasional, bedanya pada karakteristik pendidikan dan pekerjaan.

Pada tingkat lokal kabupaten, karakteristik migrant dikelompokkan menjadi dua, yaitu karakteristik demografi dan non-demografi keduanya sangat bervariasi. Karakteristik demografi sifatnya alamiah, tidak dicari.

Tabel 6.2. Karakteristik Migran di Kabupaten Semarang
Provinsi Jawa Tengah

Karakteristik	Frekuensi (persen)
Jenis Kelamin	
Laki-laki	47,02
Perempuan	52,98
Alasan Pindah	
Pekerjaan	33,23
Mencari Pekerjaan	0,62
Pendidikan	2,81
Perubahan Status	2,74
Ikut Suami/istri/anak	47,62
Ikut saudara kandung	1,45
Perumahan	6,36
Keamanan	0
Relokasi	0,77
Lainnya	4,39
Status Perkawinan	
Belum Kawin	23,41
Kawin	64,31
Cerai	5,62
Tidak ada alasan	6,64
Tingkat pendidikan	
Tidak/belum sekolah	2,63
Tidak belum TSD	15,29
SD	13,79
SMP	17,75
SMA-SMK	34,46
PT	16,07
Kegiatan Utama	
Bekerja	59,14
Sekolah	6,63
Mengurus Rumah Tangga	20,08
Lainnya	14,15
Lapangan pekerjaan utama	
Pertanian	14,28
Manufaktur	38,97
Jasa	46,75
Status Pekerjaan	
Berusaha sendiri	14,48
Berusaha dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar	6,48
Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar	1,90
Buruh atau karyawan	64,23
Pekerja bebas di pertanian	2,83
Pekerja bebas di non pertanian	5,59
Pekerja Keluarga atau tidak dibayar	4,49
Status kepemilikan/penguasaan bangunan tempat tinggal	
Milik Sendiri	81,15
Sewa	8,83
Kontrak	5,33
Lainnya	4,69

Sumber: Analisis data BPS, 2016.

Karakteristik demografi terdiri dari variabel umur dan jenis kelamin, sedangkan karakteristik non-demografi terdiri dari pendidikan, pekerjaan.

Karakteristik migran risen di Kabupaten Semarang berdasarkan aspek demografi, dapat diungkap adalah berdasarkan jenis kelamin, dan umur. Sedangkan alasan non demografi terdiri dari alasan pindah, status perkawinan, tingkat pendidikan, kegiatan utama, lapangan pekerjaan, status pekerjaan, dan status kepemilikan tempat tinggal.

Karakteristik migran risen di Kabupaten Semarang yang paling menarik adalah jumlah perempuan mendominasi, dengan ratio jenis kelamin 88,76. Migran perempuan, setiap seratus migran risen perempuan hanya terdapat 88 laki-laki, atau setiap 10000 migran risen perempuan terdapat 8876 laki-laki. Keadaan ini dapat dijelaskan dengan kondisi wilayah Kabupaten Semarang yang merupakan salah satu daerah pusat perkembangan industri di Jawa Tengah, dengan jumlah industri besar mencapai lebih dari 150 buah, dan sebagian besar tenaga kerjanya adalah berjenis kelamin perempuan (Hardati, 2014; BPS, 2016).

Karakteristik lain yang unik dari migran risen Kabupaten Semarang adalah status perkawinan, sebagian besar adalah berstatus kawin, mencapai 64,31 persen, sedangkan yang bertatus belum kawin hampir separo dari yang berstatus kawin. Artinya, hampir separo dari migran risen Kabupaten

Semarang belum menikah. Dan uniknya, jumlah migran risen perempuan yang berstatus belum meinkah jumlahnya lebih dari dua kali lipat dari migran risen laki-laki belum menikah, atau dengan kata lain, migran risen Kabupaten Semarang didominasi oleh perempuan belum menikah, jumlahnya sekitar 15,85 persen dari jumlah migran risen.

6.4. Struktur Penduduk

Struktur penduduk merupakan bentuk atau susunan atau komposisi penduduk berdasarkan ciri atau karakteristik tertentu. Struktur penduduk dikelompokkan menjadi dua, yaitu struktur demografi dan non demografi. Struktur demografi dirinci menjadi kelompok jenis kelamin, umur, jumlah, persebaran, pertumbuhan, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal.

Di Indonesia, jumlah penduduk yang bertempat tinggal di daerah perdesaan masih sekitar 52 persen. Persentase jumlah penduduk perdesaan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1960an, jumlah penduduk yang tinggal di perdesaan sekitar 95 persen, turun menjadi sekitar 65 persen pada tahun 2000, dan pada tahun 2007 menjadi 52 persen. Walaupun demikian, tidak berarti jumlahnya semakin sedikit. Secara absolute, jumlah penduduk yang bertempat tinggal di daerah perdesaan tetap banyak. Seperti pada tahun 1960an jumlah penduduk yang berdiam di

perdesaan sekitar 85,5 juta, dan pada tahun 2000 sekitar 110 juta dan pada tahun 2010 menjadi sekitar 115 juta (BPS, 1961, BPS, 2000, BPS, 2010).

Pembangunan memiliki makna untuk meningkatkan kualitas, semua pihak menyadari pentingnya pembangunan di semua tingkat mulai dari tingkat desa sampai nasional. Berbagai program dan bentuk pembangunan di kawasan perdesaan telah dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan berbagai pihak dan swasta. Pembangunan nasional mulai berfokus di daerah perdesaan, hal ini dibuktikan dengan dibentuk dan disahkan undang-undang tentang desa pada tahun 2014. Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (Mendagri, 2014).

Pengembangan desa yang berhasil akan meningkatkan aktivitas penduduk, penyerapan tenaga kerja dalam lapangan kerja. Keadaan tersebut dapat tercermin dari struktur mata pencaharian penduduk, dan di desa terjadi diversifikasi perdesaan. Semakin beranekaragam mata pencaharian penduduk menunjukkan proses terjadi diversifikasi perdesaan. Selanjutnya, diversifikasi perdesaan terjadi di desa-desa yang terletak di daerah pinggiran kota atau urban

fringe maupun di desa-desa yang jauh dari pusat kota atau *core city*. Bagaimana struktur mata pencaharian penduduk berdasarkan tingkat pengembangan desa

Tingkat pengembangan desa akan menentukan perkembangan desa, dan pada yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui aktivitas bekerja, dan penyerapan lapangan kerja, yang tercermin dari struktur mata pencahariannya.

Potensi sumber daya manusia yang dimiliki Kecamatan Ungaran Barat menjadi modal pembangunan. Potensi sumber daya manusia tersebut dikaji dari jumlah, pertumbuhan dan kepadatan penduduk; struktur umur penduduk, struktur pendidikan dan mata pencaharian.

Jumlah penduduk di Kecamatan Ungaran Barat ada 77.350 jiwa. Jumlah tersebut lebih banyak dari jumlah penduduk pada tahun 2010, yaitu 74.481 jiwa. Jumlah penduduk di Kecamatan Ungaran Barat sama dengan 8,09 persen dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Semarang. Kecamatan Ungaran Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki jumlah penduduk paling banyak diantara wilayah kecamatan lainnya di Kabupaten Semarang. Hal ini disebabkan wilayahnya menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Semarang.

Selama lima tahun (2010-2015) terjadi pertumbuhan penduduk sebesar 0,76 persen. Artinya, setiap tahun selama

tahun 2010-2015, rata-rata pertambahan penduduk sebesar 0,76 persen. Pertumbuhan penduduk di Kecamatan Ungaran Barat termasuk rendah (<1 persen).

Tabel 6.3. Jumlah Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Ungaran Barat

Desa Kelurahan	Jumlah Penduduk		Pertumbuhan (%)	Kepadatan Jiwa/Km ²
	2010	2015		
Gogik	3.338	3.521	1,07	2.400
Langensari	9.196	9.668	1,01	5.820
Candirejo	5.186	5.766	2,14	2.746
Nyatnyono	7.078	7.724	1,76	1.836
Genuk	8.415	8414	0,98	5.373
Ungaran	11.29	11.623	1,05	7.034
Bandarjo	8.941	9.064	0,27	4.079
Lerep	9.982	10.198	0,43	1.491
Keji	2.286	2.314	0,24	1.263
Kalisidi	5.476	5.812	1,12	733
Branjang	2.954	3.174	1,45	734
Kecamatan Ungaran Barat	74.481	77.350	0,76	2.162

Sumber: BPS Kabupaten Semarang tahun 2011 dan 2016

Kepadatan penduduk pada tahun 2015 besarnya 2.162 jiwa setiap km². Kelurahan Ungaran Memiliki kepadatan penduduk paling tinggi dan Desa Kalisidi kepadatan penduduknya paling rendah. Kepadatan penduduk tersebut terkait dengan proses demografi yang terjadi di wilayah Kecamatan Ungaran Barat.

Di Kecamatan Ungaran Barat terjadi proses demografi, yaitu kelahiran, kematian, migrasi masuk dan migrasi keluar. Tingkat kelahiran sebesar 14,07, tingkat kematian 5,71, tingkat migrasi masuk 19,3 dan tingkat migrasi keluar 17,3. Pada tahun 2015, tingkat kelahiran lebih tinggi dari tingkat kematian, berarti terjadi penambahan penduduk alami positif. Demikian juga tingkat migrasi, sehingga jumlah orang yang masuk lebih banyak dari pada jumlah penduduk yang keluar atau pergi.

Tabel 6.4. Struktur Demografi di Kecamatan Ungaran Barat

Desa/Kelurahan	Struktur Umur (persen)			DR	Bunus Demografi
	0-14	15-64	65-75+		
Gogik	24,25	68,88	6,87	45	BD
Langensari	25,51	70,73	3,76	41	BD
Candirejo	28,69	67,79	3,52	48	BD
Nyatnyono	25,50	68,47	6,03	46	BD
Genuk	23,33	71,85	4,82	39	BD
Ungaran	27,74	65,56	6,70	48	BD
Bandarjo	21,46	73,81	4,73	39,9	BD
Lerep	23,20	71,58	5,52	39,8	BD
Keji	25,12	67,43	7,45	49	BD
Kalisidi	25,08	68,10	6,82	47	BD
Branjang	24,98	67,61	7,41	47	BD
Kecamatan Ungaran Barat	24,32	70,23	5,45	45	BD

Sumber: BPS Kabupaten Semarang dan Analisis

Di Kecamatan Ungaran Barat struktur umur penduduk termasuk produktif, jumlah penduduk yang berumur produktif (15-64 tahun) lebih dari 65 persen. Jumlah

penduduk belum produktif 24,32 persen, dan jumlah penduduk sudah tidak produktif 5,45 persen. Angka Dependency Ratio (DR) termasuk sedang, 45. Artinya, setiap penduduk berusia produktif selain menanggung dirinya sendiri masih harus menanggung 45 beban penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) dan yang tidak produktif (>65 tahun).

Struktur penduduk menunjukkan proses bonus demografi, apabila jumlah penduduk berumur produktif lebih banyak dari jumlah penduduk yang belum dan tidak produktif, atau angka dependensi ratio atau angka ketergantungan leboh dari 50. Berdasarkan pengertian tersebut, di Kecamatan Ungaran Barat sudah terjadi proses bonus demografi. Bonus demografi merupakan suatu variabel kuantitatif, sehingga akan lebih bermanfaat apabila diikuti dengan kondisi kualitatif. Bonus demografi di suatu wilayah akan memiliki nilai positif terhadap pembangunan apabila diikuti dengan kualitas yang baik.

Kualitas sumber daya manusia dikaji dari tingkat pendidikan penduduk. Penduduk yang memiliki pendidikan lebih tinggi diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap pembangunan melalui keterserapan di dalam lapangan kerja. Lapangan pekerjaan merupakan *outcome* dari kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah.

Tabel 6.5. Struktur Pendidikan di Kecamatan Ungaran Barat

Desa/Kelurahan	Tingkat Pendidikan (Persen)				
	T/B Sekolah	T SD	TSMP	TSMA	TPT
Gogik	5,21	27,06	22,29	26,96	1,30
Langensari	12,22	22,67	23,79	30,77	7,84
Candirejo	6,78	43,35	30,09	62,39	3,63
Nyatnyono	15,79	28,28	23,36	59,74	4,31
Genuk	8,50	17,50	16,75	34,85	17,61
Ungaran	12,11	15,74	18,87	30,19	29,07
Bandarjo	10,10	18,07	18,71	30,62	19,26
Lerep	12,81	27,45	20,51	24,04	14,77
Keji	5,72	23,29	16,91	6,29	0,96
Kalisidi	9,98	40,11	23,08	12,9	1,11
Branjang	5,60	36,81	19,08	18,45	1,04
Kecamatan Ungaran Barat	17,43	24,21	20,40	27,95	10,01

Sumber: BPS Kabupaten Semarang dan Analisis

Penduduk berumur 5 tahun lebih, yang memiliki pendidikan Tamat Sekolah Menengah Atas (TSMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (TSMK) paling banyak (17,95 persen) dan paling sedikit adalah Tamat Perguruan Tinggi (TPT) hanya 10,01. Mereka yang tamat perguruan tinggi termasuk didalamnya ada yang tamat Dlpoma 1, 2, dan 3 serta pasca sarjana.

Penduduk dengan pendidikan tamat SMA-SMK paling banyak di Desa Candirejo, sedangkan paling sedikit di Desa Keji. Sedangkan penduduk dengan pendidikan Tamat Sekolah Dasar paling banyak juga di Desa Candirejo, sedangkan paling sedikit di Kelurahan Ungaran. Kelurahan

Candirejo memiliki jumlah penduduk tamat SD dan tamat SMA_SMK paling banyak.

Jumlah rumahtangga dan Tahapan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Semarang didominasi oleh jumlah keluarga dengan tahapan Keluarga Sejahtera-3 (41,83 persen), walaupun demikian masih terdapat seperempat dari jumlah rumah tangga yang mencapai tahapan keluarga pra-sejahtera dan sejahtera-1.

Tabel 6.6. Tahapan Keluarga di Kecamatan Ungaran Barat

Desa/Kelurahan	Tahapan Keluarga Sejahtera				ART
	Pra KS	KS1	KS2	KS3	
Gogik	12,1	6,91	4,5	2,9	3,5
Langensari	17,3	12,1	10,3	2,6	4,1
Candirejo	4,9	4,6	7,8	4,7	4,3
Nyatnyono	6,5	9,7	11,8	8,9	3,7
Genuk	11,1	13,1	8,9	9,7	4,0
Ungaran	16,7	11,9	13,5	15,2	3,9
Bandarjo	8,1	12,3	11,1	12,3	3,4
Lerep	9,5	11,4	14,5	18,2	3,3
Keji	3,8	5,5	6,7	1,4	3,1
Kalisidi	5,9	4,85	5,8	21,4	3,0
Branjang	5,6	7,78	4,9	2,6	3,4
Ungaran Barat	9,2	18,45	30,6	41,8	3,7

Sumber: BPS Kabupaten Semarang dan Analisis

Tahapan keluarga pra-sejahtera terdapat di semua desa/kelurahan. Keluarga pra-sejahtera paling banyak di Kelurahan Langensari (17,27 persen), kemudian di Ungaran (16,74 persen), kemudian diikuti oleh Desa Gogik, 12,12

persen, dan Kelurahan Genuk 11,05 persen. Ironisnya, posisi jumlah keluarga pra-sejahtera ada di Kelurahan, yang seharusnya sebaliknya. Jumlah keluarga pra-sejahtera di semua desa (6 desa) semua di bawah 10 persen, bahkan di Desa Keji jumlahnya paling sedikit, hanya 3,82 persen jumlah keluarga pra-sejahtera yang ada di Kecamatan Ungaran Barat.

Struktur mata pencaharian penduduk merupakan bentuk atau susunan pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk di suatu wilayah. Struktur mata pencaharian penduduk di suatu wilayah akan memberikan corak secara umum dan tingkat sosial ekonomi suatu wilayah (Hardati, 2014). Struktur mata pencaharian yang dicerminkan dari lapangan pekerjaan penduduk di suatu wilayah memberikan tahapan perkembangan pembangunan ekonomi wilayah yang bersangkutan (Rostow dalam Mountjoy, 1968; Hardati, 2011).

Mata pencaharian adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Mata pencaharian merupakan *outcome* dari pembangunan suatu wilayah. Besarnya penduduk yang dapat terserap dalam lapangan pekerjaan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Ellis (2000) memberikan penjelasan bahwa mata pencaharian adalah sebagai berikut.

The term livelihood attempts to not just what people do to order to make a living, but the resources that provide them with the capability to build a satisfactory living, the risk factors that they must consider in managing their resources, and the institutional and policy context that either helps or hinders them in their pursuit of a viable or improving living.

Aktivitas yang dilakukan merupakan mata pencaharian. BPS (2010) memberikan pengertian mata pencaharian adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan upah/gaji untuk memenuhi kebutuhan hidup selama minimal seminggu sebelum waktu pencatatan data. Lapangan pekerjaan disebut juga dengan lapangan usaha, dibedakan menjadi 10, yaitu pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan; pertambangan, dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas, dan air minum; konstruksi; perdagangan, rumah makan, dan akomodasi; angkutan, pergudangan dan komunikasi; lembaga keuangan, real estate, persewaan, jasa perusahaan; jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan; dan lainnya. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa lapangan pekerjaan dikelompokkan menjadi lima, yaitu pertanian, industri, perdagangan, jasa, dan lainnya.

Sukirno (2006) menjelaskan bahwa lapangan pekerjaan atau mata pencaharian digunakan dasar menentukan struktur perekonomian suatu wilayah, dengan 3 kelompok, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Sektor primer yaitu yaitu

pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan; pertambangan, dan penggalian. Sektor sekunder yaitu terdiri dari industri pengolahan; listrik, gas, dan air minum, konstruksi atau bangunan. Sektor tersier terdiri dari perdagangan, rumah makan, dan akomodasi; angkutan, pergudangan dan komunikasi; lembaga keuangan, real estate, persewaan, jasa perusahaan; jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan; dan lainnya. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa lapangan pekerjaan dikelompokkan menjadi lima, yaitu pertanian, industri, perdagangan, jasa, dan lainnya termasuk pemerintahan.

Yunus (2006) membagi wilayah pinggiran menjadi 6 zone, yang menunjukkan daerah yang mengalami peralihan. Peralihan daerah dengan kenampakan kekotaan sepenuhnya dan daerah dengan kenampakan kedesaan sepenuhnya. Keenam zone tersebut adalah zone kota, zone bingkai kota, zone bingkai kota desa, zone bingkai desa kota, zone bingkai desa, dan zone desa. Pembangunan zone wilayah tersebut didasarkan pada mata pencaharian penduduk.

United Nation for Industrial Development Organization menjelaskan bahwa perkembangan suatu wilayah dapat dikaji dari mata pencaharian dan sumbangannya terhadap pembangunan. Struktur mata pencaharian sector pertanian > 75 persen merupakan pembangunan berbasis sector pertanian, dan < 35 persen merupakan pembangunan

berbasis sector industri. Sumbangan terhadap produk domestic regional bruto dari sector pertanian < 10 persen merupakan daerah non industri atau non industrial.

Potensi, klasifikasi, dan sturktur mata pencaharian desa menjadi hal yang sangat penting didiskusikan lebih lanjut dan masih sangat relevan. Ketiga faktor tersebut dapat digunakan untuk membuat tipologi desa. Tipologi desa sangat diperlukan untuk dasar pengembangan desa.

Struktur atau bentuk/susunan/komposisi mata pencaharian penduduk. di Kecamatan Ungaran Barat.

Tabel 6.7. Struktur Mata Pencaharian Penduduk di Kecamatan Ungaran Barat

Desa/Kelurahan	Mata Pencaharian	
	Pertanian	Non-Pertanian
Gogik	10,73	89,23
Langensari	2,84	97,16
Candirejo	6,42	93,58
Nyatnyono	15,98	84,02
Genuk	3,34	96,64
Ungaran	0,98	99,02
Bandarjo	1,41	88,59
Lerep	21,05	78,95
Keji	5,09	94,91
Kalisidi	22,48	77,52
Branjang	10,56	89,44
Ungaran Barat	11,31	88,69

Sumber: BPS dan diolah.

Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Ungaran Barat didominasi oleh lapangan usaha jasa, yaitu mencapai 44,93 persen, dan penduduk yang bekerja di sektor industri pengolahan mencapai 26,12 persen. Walaupun demikian, masih ada penduduk yang bekerja di sektor pertanian.

Jumlah penduduk yang memiliki mata pencaharian di sektor pertanian, paling banyak di Desa kalisidi (22,48 persen) dan paling sedikit di Kelurahan Ungaran (0,98 persen). Di desa yang berstatus kelurahan, rata-rata jumlah penduduk yang bermata pencaharian di sektor pertanian kurang dari 3 persen. Sementara, di desa-desa lainnya berstatus desa, jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian tidak lebih dari 22 persen.

Di Kecamatan Ungaran Barat, struktur mata pencaharian penduduknya berbasis non-pertanian. Hal tersebut juga sudah terjadi di semua desa/kelurahan. Desa/kelurahan yang memiliki lahan pertanian lebih dari 65 persen dari luas lahan, juga memiliki struktur mata pencaharian penduduk di sektor non-pertanian.

Secara umum telah terjadi pergeseran struktur mata pencaharian dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian. Akibatnya, sektor pertanian kurang diminati untuk menjadi pilihan bekerja. Sehingga jumlah pekerja di sektor pertanian menurun, tidak sebanding dengan lahan pertanian yang ada di setiap desa/kelurahan.

Keadaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, pertama hasil pertanian tidak memiliki harga jual tinggi, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga setiap hari. Disisi lain, harga kebutuhan hidup rumahtangga semakin meningkat dan semakin kompleks. Sehingga sebagian penduduk yang muda dan memiliki pendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, lebih suka dan tertarik bekerja di sektor non-pertanian. Sektor pertanian yang banyak memiliki pekerja adalah sektor jasa.

BAB VII PENUTUP

7.1. Peraturan Perundangan Kependudukan

Mobilitas penduduk di Indonesia diharapkan menjadi salah satu kunci penggerak meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan keluarganya, keberhasilan pembangunan wilayah, sehingga terjadi keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Harapan tersebut dapat diwujudkan dengan adanya peraturan perundangan yang menjadi dasar pelaksanaannya, serta kedisiplinan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku.

Peraturan perundangan yang khusus mengatur mobilitas penduduk belum/tidak ada, yang ada adalah peraturan tentang kependudukan menjadi satu rangkaian. Peraturan perundangan tentang kependudukan terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah yang terdiri dari peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota.

Undang-undang kependudukan yang digunakan sekarang adalah undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Undang-undang tersebut sudah mengalami perubahan. Peraturan tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

Tabel 7.1. Peraturan Perundang-undangan Kependudukan

Nomor Peraturan Perundangan	Perihal-isi
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009	Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011	Keimigrasian
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013	Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009	Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014	Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
Peraturan Pemerintah Republik Indonesai Nomor Tahun 87 Tahun 2014	Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2017	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2012	Penyelenggaraan Pemandokan
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 20110	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2010-2015

Sumber: Berbagai sumber dan www.hukumonline.com

Peraturan perundang-undangan tentang kependudukan, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan peraturan kabupaten/kota, yang didalamnya mencakup proses

demografi dan gerak penduduk, sifatnya dinamis, sewaktu-waktu dapat berubah atau diganti, disesuaikan dengan perubahan perkembangan tingkat budaya masyarakat dan keperluan yang mengikat.

7.2. Sistem Informasi Kependudukan

Sistem informasi administrasi kependuduk juga meng-cover pencatatan pindah datang di wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan agar validitas data mobilitas penduduk lebih tinggi. Seperti misalnya, penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada instansi pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan surat keterangan pindah. Surat keterangan pindah selanjutnya digunakan untuk melapor ke daerah tujuan, dan digunakan dasar untuk penerbitan surat keterangan datang. Selanjutnya, surat keterangan pindah datang digunakan untuk dasar perubahan atau penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk yang bersangkutan.

Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan kepindahannya. Dan seterusnya sama dengan warga negara Indonesia. Surat keterangan pindah selanjutnya digunakan untuk melapor dan syarat untuk dibuatkan surat

pindah datang. Surat keterangan pindah datang digunakan untuk menerbitkan KK atau KTP atau surat keterangan tinggal bagi orang asing yang bersangkutan. Hal yang sama juga diberlakukan bagi penduduk warga negara Indonesia yang pindah ke luar negeri. Surat keterangan pindah ke luar negeri selanjutnya digunakan untuk melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 hari sejak kedatangannya.

7.3. Manfaat dan Kendala

Manfaat mobilitas penduduk bagi pelaku mobilitas adalah terpenuhinya kebutuhan yang diinginkan, dan meningkatnya taraf hidup. Manfaat mobilitas dapat dikelompokkan menjadi, manfaat ekonomi, budaya dan psikologis. Manfaat yang diperoleh pelaku mobilitas yang dibawa pulang ke daerah asal disebut dengan remitent. Remiten tersebut dapat berupa uang, barang dan ide atau gagasan. Manfaat ekonomi yaitu diperolehnya kebutuhan ekonomi, seperti pekerjaan, pendapatan dan kekayaan.

Manfaat mobilitas penduduk di daerah tujuan adalah manfaat ekonomi, psikologis, dan politik. Manfaat ekonomi dapat berupa tenaga kerja, karena sebagian besar yang melakukan mobilitas penduduk adalah tenaga kerja yang bekerja di daerah tujuan. Manfaat psikologi, terutama bagi para pelaku mobilitas yang mengikuti suami/istri/anak dan

family atau keluarga besarnya, dengan harapan mendapatkan rasa aman, ketenteraman, dan kebahagiaan. Manfaat politik, seperti sebagian besar pelaku politik atau politikus memiliki sifat yang sangat mobil, dinamis. Daerah asal dan daerah tujuan menjadi daerah politiknya. Semua wilayah dari yang paling kecil, yaitu desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan Negara merupakan wilayah administrasi yang perlu dipertahankan.

7.4. Dampak Mobilitas Penduduk

Semua kegiatan manusia menuai dampak negatif, walaupun sangat kecil. Hal ini berdasarkan pada hukum termodinamika yang menyatakan bahwa semua energi yang digunakan tidak akan sempurna dapat dimanfaatkan secara utuh seratus persen, tetapi selalu ada sisanya. Sisa ini yang pada umumnya menjadi dampak negatif dari penggunaan energi, demikian pula pada mobilitas penduduk.

Dampak negatif terhadap pelaku mobilitas, terjadinya proses perubahan perilaku yang kurang sesuai dengan etika kehidupan secara normal yang berlaku di setiap wilayah atau daerahnya, baik di daerah asal dan daerah tujuan. Terjadi perubahan perilaku, yang sebelumnya mendasarkan pada prinsip etika nilai-nilai paguyuban bergeser ke patembayan. Selain itu, juga terjadi pergeseran anggapan terhadap lingkungannya, yang semula beranggapan bahwa manusia bagian dari alam lingkungannya atau imanen bergeser ke

anggapan bahwa manusia bukan bagian dari alam lingkungannya atau transeden. Pergeseran anggapan yang terjadi juga akan memberikan dampak terhadap pelaku mobilitas penduduk, baik di daerah asal, daerah tujuan, dan di daerah antara.

Perubahan dari pandangan imanen yang selalu menganggap bahwa suatu lokasi, tempat, daerah, wilayah merupakan suatu ekosistem yang terdiri dari komponen alam, fisik, manusia, buatan dan budaya manusia, dan manusia merupakan bagian dari ekosistem tersebut, sehingga apabila bagian dari ekosistem tersebut terganggu, terdegradasi, maka bagian lain juga akan merasakannya termasuk manusia. Perubahan pandangan ke transeden, yaitu suatu anggapan yang memandang bahwa lokasi, daerah, wilayah bukan merupakan ekosistem, sehingga dapat dipisah-pisah secara ekonomi, sosial, politik, budaya, sehingga manusia menjadi bukan bagian dari padanya, terpisahkan darinya, apabila terjadi suatu perubahan yang ada di satu lokasi akan tidak menjadi bagiannya, bahkan peduli untuk dirinya, semakin berkurang. Perubahan anggapan tersebut pada umumnya diperoleh di daerah tujuan yang merupakan daerah mencari kebutuhan ekonomi dan semua diukur secara ekonomi.

Di Indonesia, di setiap daerah diharapkan senantiasa menggali dan menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal yang ada yang sudah dilakukan oleh para leluhur, untuk

berinstropeksi memperbaiki memperkenalkan kepada generasi sekarang dan generasi anak cucu yang akan datang, sehingga pada saat terjadinya proses revolusi industri 4.0, setiap insan manusia pelaku mobilitas mendapatkan manfaat positif, dan dampak negatif diminimalisir dan ditiadakan.

Pembangunan harus tetap dilakukan di semua aspek kegiatan manusia, dengan prinsip-prinsip etika pembangunan berkelanjutan, yang sudah dirumuskan ke dalam agenda tujuan pembangunan berkelanjutan, yang termuat dalam 17 tujuan, 169 sasaran dan sekitar 365 indikator.

Pembangunan berkelanjutan dapat dilaksanakan dengan cara pendekatan strategi penghidupan berkelanjutan, yang selalu mementingkan manusia menjadi sasaran pembangunan. Prinsip penghidupan berkelanjutan yang dikembangkan oleh UNDP yaitu: manusia sebagai fokus utama pembangunan (*people-centered*), memahami penghidupan secara menyeluruh (*holistic*), merespon dinamika penghidupan masyarakat (*dynamic*), mengoptimalkan potensi masyarakat (*building on strengths*), menyelaraskan kebijakan makro dan mikro (*macro-micro links*), mewujudkan keberlanjutan penghidupan (*sustainability*). Prinsip *sustainability* menegaskan pentingnya keberlanjutan dan ketahanan penghidupan masyarakat dalam menghadapi perubahan (*shocks & trends*),

terus menerus memperbaharui penghidupan mereka dalam jangka panjang.

Pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan dengan strategi penghidupan berkelanjutan, yaitu intensifikasi, diversifikasi dan migrasi. Migrasi merupakan bagian dari bentuk mobilitas penduduk yang dilakukan secara horizontal antar wilayah secara keruangan. Mobilitas penduduk dapat mengurangi terjadinya arus urbanisasi, mengurangi kesenjangan antar wilayah, kesenjangan ekonomi, sosial dan budaya, dan mendukung proses interaksi antar budaya dan nilai kearifan lokal untuk menumbuhkan karakter bangsa.

Strategi penghidupan yang berbentuk mobilitas penduduk yaitu migrasi, komuter dan musiman menjadi pilihan yang dilakukan oleh sebagian individu dan rumah tangga untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan mendukung revolusi industri 4.0. Teknologi informasi dan komunikasi dapat mendukung aksesibilitas wilayah semakin tinggi dan tanpa batas. Bentuk-bentuk mobilitas barang juga lebih menarik untuk

DAFTAR PUSTAKA

- Adioetomo, S.M.S. 2005. *Bonus Demografi*. Menjelaskan Hubungan antara Pertumbuhan Penduduk dengan Pertumbuhan Ekonomi. Pidato pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ekonomi Kependudukan pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 30 april 2005. Jakarta. Tidak dipublikasikan.
- Anonim. 2007. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Jakarta. Lembaran Negara RI.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana. 2011. Pembangunan Berwawasan Kependudukan. Jakarta. BKKBN.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana. 2011. Dampak Migrasi terhadap Politik. Jakarta. BKKBN.
- Badan Pusat Statistik, 2010. *Penduduk Jawa Tengah*, Hasil Sensus Penduduk. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Penduduk Indonesia*, Hasil Sensus Penduduk. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2016. Profil Penduduk Indonesia Hasil Survei Penduduk Antar Sensus. Jakarta. Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Statistik Indonesia 2016*. Jakarta. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Jawa Tengah Dalam Angka 2016*. Semarang. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kabupaten Semarang Dalam Angka 2017*. Semarang. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kecamatan Ungaran Barat Dalam Angka 2017*. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. 2016. Profil Penduduk Indonesia Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2015. Jakarta. BPS.
- Baiquni, M. 1998. *Pembangunan yang tidak Berkelanjutan. Refleksi Kritis Pembangunan Indonesia*. Edisi Kedua. Yogyakarta. IdeAs.

- Baiquni, M. 2007. *Strategi Penghidupan di Masa Krisis*. Yogyakarta: Idial Media
- Barclay, W. 1958. *Techniques of Population Analysis*. New York: Jhn Wiley & Son, Ltd.
- Baumann, Pari. Non year. Poverty and Access to Natural Resources: Insights from a sustainable livelihood perspective. *LSP Breifing Notes*. FAO Fiat Panis. Number 1.
- Bogues, J. 1969. *Principles of Demography*. New York: John Wiley & Son, Ltd.
- Bintarto, R. Dan Surastopo Hadi Sumarno. 1978. *Metode Analisa Geografi*. Jakarta. LP3ES.
- Bintarto, R. 1983. *Interaksi Desa –Kota dan Permasalahannya*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Bogues, J. 1969. *Principles of Demography*. New York: John Wiley & Son, Ltd.
- Bradford, M.G., and W.A. Kent. 1977. *Human Geography. Theories and Their Applications*. Oxford. Great Britain. University Press.
- Colbay, D. 1999. *Environmental Management in Development: The Evolusi of Paradigms*. The World Bank Discussion Papers. The World Bank, Washington D.C.
- Carney, D. 1999. *Sustainable Livelihoods Approach: Progress and Possibilities for Change*. Toronto. DFID.
- Chambers, R. 1987. *Sustainable Livelihood, Environment and Development: putting Poor Rural People First*. IDS Discussion Paper 240. Brighton: IDS.
- Chambers dan Conway. 1992. Sustainable Rural Liveihoods: Practical Concepts for The 21st Century. *IDS Discussion Paper 296*. Brighton: IDS (pp 7-8). 33
- Christopher McDowell and Arjan de Haan. 1997. Migration and Sustainable Livelihood: A Think Piece. SLP 4. IDS Working Paper 64.
- Cleveland. C.J. & Kubiszewski, I. 2007. *United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)*. Rio de Janeiro. Brazil. 2007. Encyclopedia of

- Erath Retrieved from [http://www.eoerath.org/article/United_Nations_Conference_on_Environment_and_development_\(UNCED\).Rio_de_janeiro._Brazil#gen0](http://www.eoerath.org/article/United_Nations_Conference_on_Environment_and_development_(UNCED).Rio_de_janeiro._Brazil#gen0).
- Daldjoeni, N. 1987. *Geografi Desa dan Kota*. Bandung. Penerbit Alumni.
- Department for International Development (DFID). 1999. *Sustainable Livelihoods Building on Strengths*. London SWIE 5JL UK.
- Departement Kesehatan Republik Indonesia. *Profil Kesehatan 2015*. Jakarta. Depkes RI.
- De Jong, G., and Robert Gardner (eds), 1981. *Migration Decision Making*. New York. Perhamon Press.
- Ellis, F. 2000. *Rural livelihoods and diversity in Developing Countries*. Oxford: Oxford University Press.
- Freedman, R. 1983. *Teori-teori Penurunan Fertilitas: Suatu Tinjauan*. PPSK UGM.
- Getis, Arthur., Judith Getis., Mark D. Bjelland., Jerome D. Fellmann. 2011. *Introduction to Geography*. Thirteenth Edition. International Edition. Amerika. McGraw-Hill Companies.
- Goodall, Brian. 1987. *Human Geography*. Dictionary. London. Penguin Group.
- Hammond, C.W. 1979. *Element of Human Geography*. London. George Allen & Unwin LTD.
- Hardati, P. 1997. Mobilitas Angkatan Kerja Wanita dan Sumbangannya terhadap Pendapatan Keluarga di Perdesaan Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah. *Laporan Penelitian*. Tidak dipublikasikan.
- Hardati, P. 1999. Mobilitas Tenaga Kerja Wanita Sektor Non Formal di Kota Semarang. *Laporan Penelitian*. Tidak dipublikasikan.
- Hardati, P. 2001. Panduan Praktikum Demografi Teknik. *Panduan Praktikum*. Jurusan Geografi FIS UNNES. Tidak dipublikasikan.
- Hardati, P. Mobilitas Penduduk Non Permanen di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. *Laporan Penelitian*. Tidak dipublikasikan.

- Hardati, P.2013. Levels of Sustainable Livelihood and Distribution Spatial in Tenggara Sub District Semarang Regency Centra Java. *Prosiding International Seminar. Revitalization of Sustainable Development in New Era Perspectives of Social Sciences.*
- Hardati, P. 2014. Pola Keruangan Keterkaitan Sektor Pertanian dengan non pertanian dan konserkuensinya pada strategi penghidupan rumah tangga di Kabupaten Smearang. *Disertasi.* Yogyakarta. Fakultas Geografi Universitas gadjah Mada. Tidak dipublikasikan
- Hardati, P. 2016. Geografi Penduduk. Buku Ajar. Jurusan Geografi FIS UNNES. Tidak dipublikasikan.
- Hull, terence H and Henry Mosley. 2009. *Revitalization of Family Planning in Indonesia.* Jakarta. The Government of Indonesia and United Nation Population Fund.
- Kingdleberger, Charles P. 1958. *Economic Development.* The Nc. Graw Hill Book Company Inc. New York. Hal 308.
- Landis, Paul H, Hatt Paul K. 1954. *Population Problems.* American Book Company. New York. Halaman 36-59.
- Lee, E.S.1966. *A Theory of Migration.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Linger, W. J. 1974. *A Handbook for Population Analysis Part A: Basic Methods and Measures.* Chapel Hiil USA. Laboratories for Population Statistics An Accasional Publication.
- Lucas, David,. Petr Mc Donald, Elspeth Young, and Christabel Young. 1982. *Pengantar Kependudukan.* Yogyakarta. Gadjah Mada University Press dan Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan UGM.
- LD FE UI. 1981. *Dasar-dasar Demografi.*Jakarta : Lembaga Demografi Fakutas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Mabogunye, A.L. 1970. System Approach to a Theory of Rurl-urban Migration. *Geographycal Analysis, (2).*
- Malthus, et al.2007. *Kependudukan. Dilema dan Solusi.* Edisi Terjemahan. Three Essay on Population (A Mentor Books, The New American Library of World Literature, Inc, New York. 1960). Penerjemah: Dindin Solahudin. Bandung. Penerbit Nuansa.

- Mantra, I.B. 2003. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mantra, IB. 2003. *Demografi Umum*. Edisi Kedua. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Menteri Negara Kependudukan. 1999. *Program Aksi Nasional Pembangunan Kependudukan Sampai Tahun 2020*. Jakarta. Menteri Negara Kependudukan.
- Menteri Negara Kependudukan. 1999. *Program Strategis Kependudukan dan Pembangunan Menuju Tahun 2015*. ICPD+5. Hasil Telaah dan kajian Lima Tahun Pelaksanaan Program Aksi dari Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan Sedunia (ICPD) New York, 30 Juni – 2 Juli 1999. Jakarta. Menteri Negara Kependudukan.
- Munir, Rozy dan Budiarto. 1983. *Teori-teori Kependudukan*. Edisi pertama. Seri Terjemahan dari: Population Theory (Chapter III), The Determinant and Consequences of Population Trends. New Summary of findings on interaction of demographic, economic and social factor. Volume 1. Jakarta. PT. Bina Aksara.
- Munasinghe, Mohan. Non Year. *Sustainable Livelihood and Their Linkages with Macro-Policies*. DFID. Improving Policy-Livelihood Relationships in South Asia Issue Paper 1.
- Muta'ali, Lutfi. 2013. *Pengembangan Wilayah Perdesaan (Perspektif Keruangan)*. Yogyakarta. Badan Peenrbit Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
- Norris, R. E. 1972. Migration as Spatial Interaction. *Journal of Geography*, 71 (5).
- Nursid, S. 1981. *Studi Geografi Suatu Pendekatan dan Analisis Keruangan*. Bandung. Penerbit Alumni.
- Palmore, JA. 1971. *Measuring Mortality: a self teaching guide to elementary measures*, paper of the East-West Population Institute no 15. Honolulu.
- Population Reference Bureau. 2015. *World Population Data Sheet*. Washington, USA. PRB.
- Rijanta, R. 2008. Livelihood Strategies, Responses to The Crisis, and the Role of Non agricultural Active in Five

- Villages in the Spatial Region of the Yogyakarta. *Rural Livelihoods, Resources and Coping with Crisis in Indonesia*. A Comparative Study. Edited. Vol. 3. ICAS Publication Series. Amsterdam University Press.
- Rijanta, R. 2010. Evolusi dan Kecenderungan Baru Dalam Pemikiran Pengembangan Perdesaan. *Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Fakultas Geografi Universtas Gadjah Mada*. Yogyakarta. Tidak dipublikasikan.
- Ruhimad, M. 2016. *Geografi Penduduk*. Yogyakarta. Penerbit Ombak.
- Rusli, Said. 1982. Pengantar Ilmu Kependudukan. Jakarta. Lembaga Penelitian Pendidikan dan Pengetahuan Ekonomi dan Sosial.
- Saragih, Sebastian; Jonatan Lassa dan Afan Ramil. 2007. *Kerangka Penghidupan Berkelanjutan*. Sustainable Livelihood Framework.
- Scoones, Ian. 1998. Sustainable Rural Livelihood: A Framework for Analysis. SLP 7. IDS Working Paper 72.
- Todaro, M.P., 1976. *International Migration in Development Countries: A Review of Theory, Evidence, Methodology and Research Priority*. Geneva: BIT.
- United States Agency for International Development (USAID). 2006. *Kajian Penghidupan Berkelanjutan Desa Jantho Baru Kabupaten Aceh Besar Nangrove Aceh Darusalam*. ESP. USAID Indonesia.
- Weeks, John R. 1992. *Population. An Introduction to Conceptd and Issues*. Fifth Edition. Belmont. Wadsworth Publishing Company, Belmont, California. A Division Of Wadsworth, Inc.
- Yunus, Hadi Sabari. 2010. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Sumber web

<http://bambangplusar.blogspot.co.id/2015/12/upacara-adat-banyumas.html?m=1>. Diunduh desember 2016.

<http://lms.jogjabelajar.jogjaprov.go.id/jbbudaya/kategori.php?p=upacara-adat-puputan-dan-salapanan>. Diunduh desember 2016

<http://www.mbatang.com/2013/02/tradisi-bacaan-mentik-udak.html>

GLOSARIUM

Angka emigrasi adalah angka ini menunjukkan banyaknya emigran yang meninggalkan negara asal per 1000 penduduk pada negara asal per 1000 penduduk pada negara asal pada suatu tahun tertentu.

Angka imigrasi (*immigration rate*) ialah angka ini menunjukkan banyaknya imigran yang tiba disuatu negara tujuan per 1000 penduduk pada negara tujuan tersebut pada suatu tahun tertentu.

Angka Migrasi Masuk (*In-Migration Rate*) adalah angka yang menunjukkan banyaknya migran yang masuk per 1000 penduduk daerah tujuan dalam waktu satu tahun.

Angka Migrasi Keluar (*Out-Migration Rate*) adalah angka yang menunjukkan banyaknya migran yang keluar per 1000 penduduk daerah asal dalam waktu satu tahun.

Angka migrasi netto (*net migration rate*) yaitu selisih antara migran masuk ke suatu daerah dan banyaknya migran keluar dari daerah tersebut per 1000 penduduk daerah tersebut.

Arus migrasi merupakan jumlah/banyaknya perpindahan yang terjadi dari daerah asal ke daerah tujuan selama jangka waktu migrasi tertentu (*migration interval*).

Agro-ecology studi proses ekologi yang mengendalikan sistem produksi pertanian. Pada ekologi pertanian, prinsip ekologi dibawa ke ekosistem pertanian

Kebijakan (*Policy*) adalah Serangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

Kesejahteraan dan Kemampuan (*Well-Being and Capabilities Unproved*) Kata-kata 'Kesejahteraan' (bnd. Chambers 1995; 1997) dan 'Kemampuan' (Sen 1984; 1987) memberikan ruang lingkup definisi yang lebih luas untuk konsep mata pencaharian. Sen melihat capabilitis sebagai 'apa yang dapat dilakukan atau dilakukan orang dengan hak mereka', sebuah konsep yang mencakup jauh lebih banyak daripada masalah materi tentang asupan makanan atau pendapatan. Ide-ide semacam itu mewakili lebih dari sumber daya manusia yang memungkinkan orang melakukan berbagai hal, tetapi juga unsur-unsur yang secara intrinsik dihargai dari 'kemampuan' atau 'kesejahteraan'. Chambers (1997) berpendapat bahwa pendekatan kesejahteraan terhadap kemiskinan dan analisis mata pencaharian memungkinkan orang-orang itu sendiri untuk menentukan kriteria, termasuk beragam faktor seperti harga diri, Keamanan,

kebahagiaan, stres, kerentanan, kekuasaan, ekskultasi, serta kekhawatiran materi yang diukur secara lebih konvensional (Chambers, 1989)

Mengakses (*Access*) Orang yang berbeda jelas memiliki akses yang berbeda terhadap sumber mata pencaharian yang berbeda. Hal ini tergantung pada pandangan yang berbeda untuk menganalisis mata pencaharian karena itu sangat penting, yang memisahkan unit analisis yang dipilih - apakah masyarakat, desa atau rumah tangga - dan melihat pada individu atau kelompok aktor sosial dan hubungan mereka, dalam kaitannya dengan berbagai dimensi yang relevan perbedaan (kekayaan, jenis kelamin, usia, dan sebagainya) dan distribusi kontrol atas sumber daya.

Menjualkan (*Trade-offs*) Dalam mengejar portofolio strategi mata pencaharian tertentu, apa untung-rugi yang dihadapi oleh orang-orang yang berbeda dengan akses yang berbeda terhadap berbagai jenis sumber mata pencaharian? Tergantung pada siapa Anda, akses diferensial ke berbagai jenis modal dapat memiliki implikasi positif atau negatif dalam hal keberhasilan atau sebaliknya dalam mengejar mata pencaharian yang berkelanjutan.

Migrasi adalah suatu perpindahan penduduk yang melewati batas administrasi tingkat II yang bertujuan untuk

mendapatkan sumber penghidupan (Aulisa Rahmi dan Iwan Rudiarto, 2013:4).

Migran adalah orang bergerak melintasi batas propinsi menuju ke propinsi lain, dan lamanya tinggal di propinsi tujuan adalah enam bulan atau lebih. Atau seseorang disebut migran walaupun waktu di propinsi tujuan kurang dari enam bulan, tetapi orang tersebut berniat untuk tinggal menetap.

Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain, baik melewati batas politis negara maupun batas administrasi /batas bagian dalam suatu negara dengan tujuan untuk menetap.

Migrasi intern merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah (propinsi atau kabupaten) ke daerah lain dalam satu negara. Perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah tempat asal (area of origin) disebut migrasi keluar (out migration) sedangkan masuknya penduduk ke suatu daerah tempat tujuan (area of destination) disebut migrasi masuk (in- migration).

Migrasi Internasional adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Migrasi yang merupakan masuknya penduduk ke suatu negara disebut imigrasi, sedang kebalikannya yaitu jika migrasi itu merupakan keluarnya penduduk dari suatu negara disebut emigrasi.

Karena sedikitnya jumlah penduduk yang masuk ke Indonesia maupun penduduk Indonesia yang pindah ke negara lain, maka jika dilihat dari jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan, dapatlah dianggap bahwa migrasi internasional sama dengan nol atau tidak ada.

Migrasi netto (*Net-migration rate*) adalah selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar. Apabila migrasi masuk lebih besar daripada migrasi keluar maka disebut migrasi netto positif. Sedangkan jika migrasi keluar lebih besar daripada migrasi masuk disebut migrasi netto negative.

Mobilitas penduduk horizontal sering disebut dengan istilah mobilitas penduduk geografis, adalah gerak (*movement*) yang melewati batas wilayah menuju wilayah yang lain pada periode waktu tertentu (Mantra, 1978). Penggunaan konsep batas wilayah dan waktu untuk indikator mobilitas penduduk horizontal ini mengikuti paradikma geografi yang mendasarkan konsepnya atas wilayah dan waktu (*space and time* konsep).

Mobilitas penduduk permanen adalah perpindahan penduduk dengan tujuan menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik atau negara atau batas administratif atau batas bagian dalam suatu negara.

Dimensi penting yang perlu ditinjau dalam penelaahan migrasi yaitu dimensi waktu dan dimensi daerah (Munir dalam Jurnal Pendidikan Geografi, Vol. 2, No 1 Rabul Alamin dkk, (2015:4))

Mobilitas penduduk non permanen (sirkuler) ialah gerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tidak ada niatan untuk menetap di daerah tujuan. Mantra (1985: 157) dalam Wahyu Eridiana.

Mobilitas penduduk non permanen (*circulation*) ini juga dibagi menjadi dua yaitu ulang-alik (jawa = nglaju; Inggris = *commuting*) dan menginap atau mondok di daerah tujuan.

Mobilitas ulang alik adalah gerak penduduk dari daerah asal menuju ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dengan kembali ke daerah asal pada hari itu juga.

Mobilitas mondok atau menginap merupakan gerak penduduk yang meninggalkan daerah asal menuju ke daerah tujuan dengan batas waktu lebih dari satu hari, namun kurang dari enam bulan .

Migrasi dilihat dari dimensi spasial menerangkan perpindahan penduduk atau mobilitas penduduk yang melintasi batas teritorial (administratif) atau geografis (Tirtosudarmo, 1993 dalam Aulisa Rahmi dkk, 2013 : 335).

Migrasi dilihat dari dimensi temporal melahirkan konsep migrasi komutasi (pulang pergi/ulang alik), sirkulasi (meninggalkan rumah lebih dari 2 hari dan kurang dari 6 bulan), dan permanen (menetap dan tercatat dalam kependudukan pada daerah tujuan).

Migrasi dilihat dari dimensi sektoral melahirkan konsep mobilitas penduduk berdasarkan jenis pekerjaan (okupasi) baik yang sifatnya permanen maupun musiman (Sumaryanto dan Pasaribu, 1997 Aulisa Rahmi dkk, 2013 : 335)

Mobilitas penduduk vertikal sering disebut perubahan status pekerjaan. Misalnya seseorang yang sebelumnya bekerja di sektor pertanian sekarang bekerja di bidang non pertanian.

Migrasi semasa hidup (*life time migration*) yaitu banyaknya penduduk yang pada waktu diadakan sensus, bertempat tinggal di daerah yang berbeda dengan tempat kelahirannya.

Migrasi semasa hidup masuk (*Life time In-migration*) yaitu banyaknya penduduk yang tinggal di suatu daerah tetapi dilahirkan di tempat lain pada waktu sensus.

Migrasi semasa hidup keluar (*Life time Out-migration*) yaitu banyaknya penduduk yang dilahirkan di suatu daerah tetapi tinggal di daerah lain pada waktu sensus.

Modal Alam (*Natural Capital*) Modal alam terdiri dari tanah, air, dan sumber daya hayati yang dimanfaatkan oleh manusia untuk menghasilkan sarana untuk bertahan hidup.

Modal Finansial (*Financial/Economic Capital*) Modal finansial mengacu pada persediaan uang yang dapat diakses oleh rumah tangga terhadap sumber modal keuangan, terutama simpanan, dan akses kredit dalam bentuk pinjaman. Baik uang simpanan maupun pinjaman uang secara langsung adalah bentuk-bentuk modal produktif, yang dapat di alihkan ke bentuk-bentuk modal lain, atau langsung konsumsi. Kemudahan beralih antara menggunakan sebagai modal usaha atau langsung dikonsumsi merupakan karakteristik dasar modal dalam bentuk uang tunai. Sebagian besar masyarakat, ketiadaan pasar keuangan atau ketidakpercayaan lembaga keuangan, akibatnya tabungan disimpan dalam bentuk lain, misalkan kepemilikan hewan ternak (Ellis,2000:34).

Modal Fisik (*Phisical Capital*). Modal fisik atau "buatan manusia" dapat menggantikan modal alam dalam banyak keadaan, memang seluruh proses perubahan teknologi memerlukan jangka waktu yang lama, ditambah salah satunya adanya proses industrialisasi dan urbanisasi,di mana modal fisik yang secara

kumulatif menggantikan modal alam dari waktu ke waktu. Proses substitusi ini berpotensi membantu dari tekanan dari sumber daya alam yang akan habis. Modal fisik terdiri dari benda yang digunakan dalam proses produksi ekonomi seperti bangunan, saluran irigasi, jalan, peralatan, mesin, dan sebagainya. Hal penting dalam aset fisik yang memfasilitasi diversifikasi mata pencaharian adalah aset infrastruktur seperti jalan, jaringan listrik, dan (Ellis,2000:33).

Modal Manusia (*Human Capital*)Aset utama yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan adalah tenaga kerja mereka sendiri.

Modal Sosial (*Social Capital*)Modal sosial merujuk pada jejaring sosial dan kelembagaan dimana masyarakat berpartisipasi di dalamnya, dan yang dapat digunakan untuk mendukung sumber penghidupan mereka (Berry dalam Ellis 2000:10). Kelembagaan di deskripsikan sebagai regulator dari pola-pola perilaku oleh aturan-aturan yang ada di masyarakat (Lach at all dalam Ellis 2000:10).

INDEKS

A

Abad 21, 12
Angka migrasi bruto, 84
Angka migrasi keluar, 83
angka migrasi masuk, 83
Angka migrasi neto, 84, 88
Angka mobiltas penduduk,
82

B

Bentuk Mobilitas
Penduduk, xi, 60, 61
berkelanjutan, v, 17, 25,
29, 31, 32, 34, 35, 37,
38, 39, 41, 43, 44, 45,
47, 55, 160, 161, 171

D

Daerah Tujuan, ix, 103,
112
Derah Asal, 112
diversifikasi, 45, 46, 49,
51, 52, 53, 54, 55, 141,
177

E

ekstensifikasi, 44, 46, 49,
50, 51, 54, 55
emigrasi, 60, 85, 169, 172

F

Faktor penarik, 114
faktor pendorong, 69, 70,
114

G

geografi, v, 16, 17, 19, 20,
21, 22, 24, 58, 62, 75,
123, 173

H

horisontal, 58, 59, 60, 62,
64, 78

I

intensifikasi, 44, 46, 49,
50, 54, 55

J

Jumlah penduduk, 26, 27,
83, 89, 107, 127, 142,
145, 152

K

karakteristik, v, 17, 20, 23,
47, 111, 123, 135, 137,
140, 176
Kartu Tanda Penduduk,
156

- M**
- Migran Risen, x, 136
 Migran total, 81, 93, 94
 Migrasi, ix, xi, 54, 59, 64,
 69, 72, 73, 78, 88, 89,
 92, 94, 97, 99, 101, 103,
 105, 162, 169, 171, 172,
 173, 174, 175
 migrasi risen, 79
 migrasi seumur hidup, 79,
 80
 Mobilitas horisontal, 59
 mobilitas penduduk, v, 12,
 13, 15, 16, 17, 23, 24,
 26, 27, 28, 29, 56, 58,
 59, 62, 63, 67, 73, 75,
 78, 87, 88, 90, 92, 107,
 111, 112, 113, 115, 116,
 120, 121, 122, 124, 174,
 175
 Mobilitas Penduduk, ix, xi,
 58, 63, 64, 65, 66, 67,
 68, 78, 86, 90, 98, 99,
 106, 108, 125, 137, 157,
 158
 Mobilitas Permanen, ix, 89
- P**
- pembangunan
 berkelanjutan, 25, 31,
 36, 37, 38, 160
 Pembangunan
 Berkelanjutan, 30, 33,
 34, 37
- Pendekatan keruangan, 18
 Penghidupan, ii, xi, 41, 42,
 163, 167
 Pola mobilitas, 90, 91, 98
- R**
- revolusi industri, vi, 12,
 119, 160, 161
 Ruang, ix, 14, 15, 16, 18,
 58, 63, 162
- S**
- Sistem Informasi*
Kependudukan, 156
 Strategi penghidupan, 43,
 44, 45, 46, 47, 55
- T**
- Tempat tinggal, 94
- U**
- Undang-undang, 154, 155,
 162
 urbanisasi, 85, 125, 126,
 127, 128, 129, 130, 132,
 161, 176
- V**
- vertikal, 13, 58, 60, 78,
 175
- W**
- warga negara, 156



Puji Hardati, Lahir di Purworejo 60 tahun silam, menjadi seorang geografer, menekuni bidang geografi manusia. Pendidikan SD sampai dengan perguruan tinggi di Yogyakarta. Lulus S1, S2, dan S3 dari Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Sejak tahun 1986 menjadi dosen di Jurusan Geografi IKIP Negeri Semarang yang sekarang menjadi Universitas Negeri Semarang. Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dilaksanakan selain mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.